



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA PERUBAHAN)

TAHUN 2018 - 2023



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan dan ditetapkan.

UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RENSTRA Perangkat 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RENSTRA Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) Tahun dan disusun dengan berpedoman pada RPJMD. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsure pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

RENSTRA Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 ini dirumuskan dengan tahapan, tatacara, serta pendekatan yang diatur dalam peraturan perundangan dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program/kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan yang sejalan dengan Visi Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yaitu: “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”. Dengan demikian Renstra Perubahan ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah pada khususnya, dan pembangunan nasional pada umumnya.

Disamping sebagai pedoman dalam perencanaan, Renstra Perubahan ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu alat evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sehingga pada saatnya nanti dapat terwujud Pemerintahan yang baik (Good Governance). Semoga RENSTRA Perubahan Tahun 2018–2023 ini menjadikan arah proses pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan lebih terarah.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan tenaga dan pemikiran dalam penyelesaian Renstra ini, diucapkan terimakasih. Semoga Renstra Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah Sulawesi Selatan yang kita cintai.

Makassar, Desember 2020
Plt. Kepala Dinas

Ir. H. HARY RUSTAM. T, MM.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Halaman
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Landasan Hukum	3
1.3.Maksud dan Tujuan	6
1.4.Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan.....	9
2.1.1. Tugas Pokok.....	9
2.1.2. Fungsi.....	12
2.2. Struktur Organisasi.....	16
2.3. Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan.....	18
2.3.1. Sumber Daya Manusia.....	19
2.4. Sarana dan Prasarana (Aset).....	21
2.4.1. Bidang Perikanan Tangkap.....	22
2.4.2. Bidang Perikanan Budidaya.....	24
2.4.3. Perlindungan, Pengawasan dan Pengendalian.....	26
2.4.4. Kawasan Konservasi Perairan Daerah dan Perlindungan Laut.....	26

2.5. Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan.....	27
2.5.1. Tugas Pokok Capaian Kinerja Pelayanan.....	27
2.5.2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.....	61
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi	63
3.2. Telaahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	70
3.3. Telaahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	77
3.4. Telaah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan.....	85
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	97
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	103
 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1. Strategi dan Arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan	107
 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
7.1. Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada RPJMD.....	128
7.1.1. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	128
7.1.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	130
 BAB VIII PENUTUP.....	 133
 LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Komposisi PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin.....	18
Tabel 2.2 Komposisi PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Golongan.....	19
Tabel 2.3 Komposisi PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Eselon.....	20
Tabel 2.4 Komposisi PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Pendidikan Formal Yang ditamatkan.....	20
Tabel 2.5 Komposisi Diklat PIM Tahun 2014 -2019	21
Tabel 2.6 Daftar asset yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.....	21
Tabel 2.7 Kondisi Sarana Pelabuhan Perikanan di Sulawesi Selatan	23
Tabel 2.8 Sarana dan Prasarana Pendukung	26
Tabel 2.9 Produksi Perikanan Sulawesi Selatan Tahun 2015 – 2019	29
Tabel 2.10 Volume Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2015-2019	30
Tabel 2.11 Volume Produksi Perikanan Tangkap Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 – 2019.....	31
Tabel 2.12 Volume Produksi Garam	33
Tabel 2.13 Volume Produksi Olahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	33
Tabel 2.14 Konsumsi Ikan Kabupaten Kota Tahun 2015-2019.....	35
Tabel 2.15 Konsumsi Ikan Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	36
Tabel 2.16 Cakupan Bina Kelompok Nelayan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015-2019.....	36
Tabel 2.17 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	37
Tabel 2.18 Proporsi Tangkap Ikan yang Berada dalam Batasan Biologi yang Aman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 - 2019	38

Tabel 2.19	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial Provinsi	39
Tabel 2.20	Nilai Tukar Nelayan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 - 2019.....	41
Tabel 2.21	Kontribusi PDRB Perikanan Terhadap PDRB SulSel Tahun 2010-2019.....	41
Tabel 2.22	Peningkatan Produksi dan Nilai Hilirisasi Perikanan Tahun 2015-2019.....	42
Tabel 2.23	Produksi Rumput Laut Perkabupaten Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	43
Tabel 2.24	Produksi Ekspor dan Kontribusi Ekspor Hasil Perikanan Tahun 2015-2019	44
Tabel 2.25	Luas Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2015-2019.....	46
Tabel 2.26	Luas Lahan Mangrove di Provinsi Sulawesi Selatan	55
Tabel 2.27	Perkembangan Luas Lahan Mangrove di Provinsi Sulawesi Selatan	56
Tabel 2.28	Luas Lahan Padang Lamun di Provinsi Sulawesi Selatan	56
Tabel 2.29	Nilai Tukar Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah Provinsi Sulawesi Selatan 2015-2019.....	57
Tabel 2.30	Pengembangan SDM Aparat dan Masyarakat Usaha Perikanan (Berbasis Gender) dalam mendukung Peningkatan Produksi Perikanan Tahun 2015-2019.....	58
Tabel 2.31	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	59
Tabel 2.32	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan.....	61
Tabel 2.33	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.....	62
Tabel 2.34	Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Kelautan dan Perikanan	62
Tabel 3.1.	Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan....	63
Tabel 3.2	Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.....	65
Tabel 3.3	Permasalahan yang Relevan dengan Program dan Kegiatan	68

Tabel 3.4	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.....	72
Tabel 3.5	Sasaran dan Strategis Renstra Kementrian Provinsi Sulawesi Selatan.....	75
Tabel 3.6	Hasil Telaahan Struktural Ruang Wilayah.....	78
Tabel 3.7	Hasil Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	95
Tabel 3.8	Sasaran Strategis Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan	99
Tabel 3.9	Pembobotan Permasalahan yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Kajian	100
Tabel 3.10	Skor Kriteria Isu Strategis	101
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023.....	104
Tabel 4.2	Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Renstra Dinas.....	106
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan.....	107
Tabel 5.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2018-2023.....	110
Tabel 6.1	Indikator Tujuan Sasaran dan Program.....	114
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023.....	129
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2018-2023.....	131

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Keterkaitan Dokumen Renstra dan Dokumen RPJMD.....	3
Gambar 2.2	Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.....	17
Gambar 6.1	Arsitektur perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan sesuai tugas dan fungsi	120

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1(Satu) tahun sampai dengan 5(Lima) tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan tantangan yang ada atau timbul serta memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijaksanaan sasaran dan prioritas sasaran dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018-2023 yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Salah satu indikator makro ekonomi pada pembangunan Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan adalah pertumbuhan produksi perikanan. Indikator ini diarahkan untuk mendukung kebijakan Hilirisasi Komoditas Unggulan Sulawesi Selatan dalam rangka merenspon kebijakan pembangunan daerah dan pembangunan nasional yaitu Kemaritiman dan Kelautan. Selama kurun waktu 2013-2017, data pertumbuhan produksi perikanan Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan positif terutama pada Usaha Perikanan Budidaya, namun sejalan pencapaian pertumbuhan produksi di beberapa daerah masih terdapat beberapa permasalahan baik secara teknis, sosial dan lingkungan. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong peningkatan pertumbuhan produksi dengan fokus pada peningkatan produksi perikanan budidaya, sementara pada pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap diupayakan melalui pengembangan sarana dan prasarana teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Adapun Produksi Perikanan Sulawesi Selatan bersumber dari usaha perikanan penangkapan (Laut&PerairanUmum) dan usaha perikanan budidaya (Laut, Tambak, Kolam dan Sawah). Belum optimalnya pencapaian tingkat produktifitas usaha perikanan budidaya dan usaha penangkapan memberi dampak

pada kegiatan pembangunan dan pengembangan sektor perikanan secara keseluruhan. Pembangunan usaha Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan kedepan akan menjadi usaha perikanan yang berproduktivitas dan memiliki daya saing yang tinggi baik pasar dalam negeri maupun pasar ekspor.

Upaya yang dilakukan diarahkan pada tiga ruang lingkup pengembangan yaitu hilirisasi dan optimalisasi kegiatan produksi melalui pengembangan inovasi teknologi produktif, peningkatan daya saing melalui penanganan dan penerapan teknologi pengolahan produk hasil perikanan sehingga menghasilkan produk yang kompetitif dan berkarakter, dan pengembangan mekanisme serta jaringan pemasaran yang inklusif. Dengan komitmen ini, pembangunan Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan secara optimal akan mampu memberi kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Sulawesi Selatan dan Nasional.

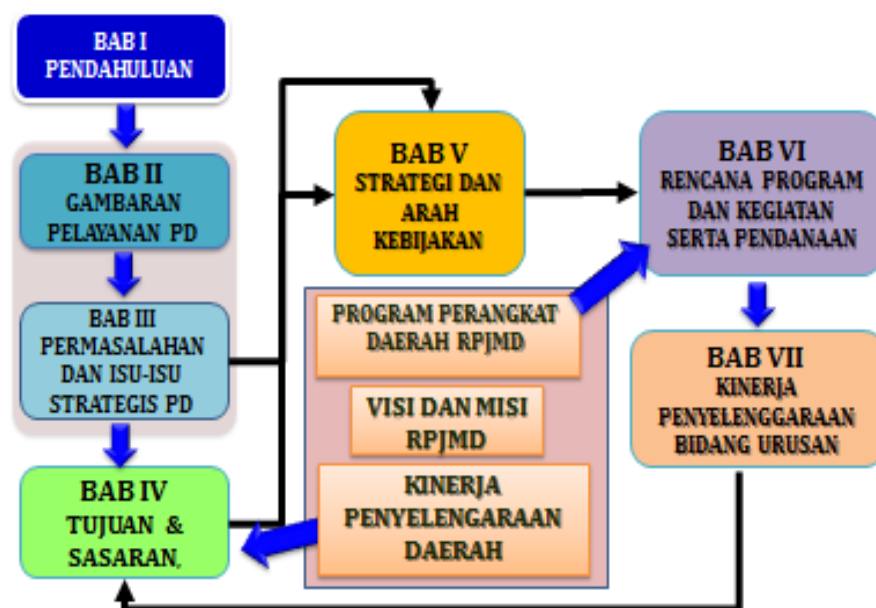
Beberapa alasan yang dapat menjadi pertimbangan terhadap pencapaian target pembangunan kelautan dan perikanan Sulawesi Selatan, diantaranya : (1) Pembangunan Sektor Perikanan Budidaya kedepan menekankan pada peningkatan produksi melalui upaya rekayasa teknologi dan upaya perbaikan lingkungan/habitat pemeliharaan; (2) Pembangunan Sektor Perikanan Tangkap diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan yang berbasis pada tiga fokus pengembangan, yaitu inovasi dan pengembangan teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan (fishing technology), penguasaan dan pengembangan pengetahuan terhadap target tangkapan (fish target), dan peningkatan pemahaman terhadap daerah penangkapan ikan (fishing ground); (3) Adanya Gerakan Peningkatan Produksi Komoditas terhadap 7 komoditi unggulan seperti udang, rumput laut, kepiting, cumi-cumi, bandeng, kakap kerapu dan tuna cakalang tongkol sebagai wujud dari Hilirisasi Perikanan dan Kelautan; (4) semakin bergairahnya masyarakat pembudidaya untuk berusaha karena lingkungan sumberdaya perikanan yang mendukung; (5) adanya trend dukungan kebutuhan akan semakin besar sehingga ada jaminan pasar.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Lembaga pemerintah diberi mandat untuk mengemban tugas dan tanggungjawab pembinaan,

pelayanan kepada masyarakat dimana dituntut untuk menyusun Perencanaan Strategis yang Akuntabel. Hal ini sejalan dengan tuntutan masyarakat kepada aparat pemerintah untuk merespon atas mandate yang diberikan dalam rangka pencapaian visi misi pembangunan.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018-2023 merupakan perencanaan pembangunan dalam jangka lima tahun dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang diarahkan sebagai langkah adaptasi terhadap era globalisasi, desentralisasi serta diposisikan sebagai tahapan penguatan, perluasan, pendalaman dan sekaligus penyempurnaan dari pelaksanaan program yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya, utamanya dalam mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter.

Gambar 1. Keterkaitan Dokumen Renstra dan Dokumen RPJMD



1.2. Landasan Hukum

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang

Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah,

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
4. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia;
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
12. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang

- Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 243)
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029,
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah,
 19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota,
 21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Daerah,
 22. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan No.80 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah,serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor1312);

24. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan No 37 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi UPT Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan;
25. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan No 38 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Cabang Dinas Kelautan;
26. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan No 39 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Cabang Dinas Kelautan;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Covid-19;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.2 Tahun 2019 tentang Rencana

Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil (RZWP3K) provinsi Sulawesi Selatan;

33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPJMD Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan, terutama yang terkait dengan urusan Kelautan dan Perikanan sehingga rumusan program strategis dengan skala prioritas, kebijakan, indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan lebih terarah. Adapun tujuan penyusunan Renstra Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah, 1) sebagai pedoman bagi unit kerja lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja) untuk lima tahun ke depan yang diimplementasikan dalam pelaksanaan program kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, 2) sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan bagi unit kerja lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan instansi terkait di kabupaten/kota dalam mendukung pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.

Penyusunan Rencana Strategis perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang diimplementasikan melalui dukungan dana yang dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Strategi yang

telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan. Bagian ini memuat uraian tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.
- Bab II Gambaran Pelayanan SKPD memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumberdaya yang dimiliki, dan kinerja pelayanan melalui pelaksanaan Renstra sebelumnya dan capaian program yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode 2018 - 2023 serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan.
- Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan beserta faktor-faktor yang menganalisis isu-isu strategis yang merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan

7

akseptabilitas prioritas pembangunan dapat dioperasionalkan dan secara moral serta estetika birokratis yang dapat dipertanggung jawabkan.

- Bab IV Tujuan dan Sasaran, memuat uraian tentang tujuan dan sasaran

Perangkat Daerah yang menggambarkan apa yang diharapkan pada yang akan datang, dan menggambarkan langkah - langkah utama yang akan diambil untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Bab V Strategi dan Arah Kebijakan, memuat uraian tentang penjelasan yang masing-masing tujuan dan sasaran yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya akan dirinci lebih detil bagaimana cara mencapainya melalui strategi dan arah kebijakan yang akan dirumuskan.
- Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan, memuat rencana program dan kegiatan serta pendanaan. Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, memuat indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- Bab VIII Penutup,

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan maka berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 89 Tahun 2016 telah disusun Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dirinci sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;

- g. menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan yang meliputi bidang pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, bidang perikanan tangkap, bidang perikanan budidaya dan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- h. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- i. menyelenggarakan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat, koordinasi perizinan, dan pengembangan usaha di bidang kelautan dan perikanan;
- j. menyelenggarakan usaha konservasi, rehabilitasi ekosistem/habitat, pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan;
- k. menyelenggarakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin bidang kelautan dan perikanan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi;
- l. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin bidang kelautan dan perikanan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi;
- m. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang kelautan dan perikanan;
- n. menilai hasil kerja aparatur sipil negara dalam lingkungan Dinas;
- o. menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;
- b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan

- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dirinci sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program Dinas;
- g. melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Dinas;
- h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- i. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan ;
- l. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur;
- m. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan dan asset;
- n. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tataaksana dalam lingkungan Dinas;
- o. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas;
- p. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan dan protokoler;
- q. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan mengelola penyusunan program, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas dirinci sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran;
- g. menyiapkan bahan dan menyosialisasikan peraturan perundang-undangan petunjuk teknis di bidang penyusunan perencanaan program kegiatan dan data statistik;
- h. mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi statistik kelautan dan perikanan;
- i. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan menyusun rancangan rencana strategis;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun pengusulan rencana anggaran pendapatan dan Dinas;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- l. menyiapkan bahan atau data untuk perhitungan anggaran dan perubahan anggaran;
- m. menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Dinas;
- n. mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian data berbasis teknologi informasi;
- o. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Dinas;
- p. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;
- q. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan tahunan dan statistik kelautan dan perikanan;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Program dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. melakukan tugas kedinasan lain yang perintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Subbagian Umum, Kepegawaian, Dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian, dan hukum.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas dirinci sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian, Dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian, Dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
- g. melakukan administrasi dan pendistribusian surat masuk dan keluar;
- h. menata dan melakukan pengarsipan naskah dinas dan pengelolaan perpustakaan;
- i. mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
- j. mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah tangga;
- k. mengkoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, dan pemeliharaan inventarisasi dan penghapusan barang;
- n. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
- o. menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai;
- p. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- q. menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- r. menyiapkan bahan dan menyusun rencana formasi, informasi jabatan, dan bezetting pegawai;
- s. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi aparatur meliputi usul kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, penilaian pelaksanaan pekerjaan, kenaikan gaji berkala, cuti, ijin, masa kerja, peralihan status, dan layanan administrasi kepegawaian lainnya;
- t. menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda jasa pegawai negeri sipil;
- u. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi,

- disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
- v. mengembangkan penerapan sistem informasi aparatur berbasis teknologi informasi;
 - w. menghimpun dan menyosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
 - x. menghimpun dan menyosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas;
 - y. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas;
 - z. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum, serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - aa. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas dirinci sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- g. meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang, pembayaran gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya untuk menjadi bahan proses lebih lanjut;
- h. mengkoordinasikan dan menyusun kerja sama anggaran;
- i. mengelola pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
- j. melakukan verifikasi harian atas penerimaan keuangan;
- k. melakukan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
- l. melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan;

- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- n. menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- o. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
- p. menginventarisasi sumber-sumber penerimaan keuangan;
- q. menggali sumber-sumber penerimaan baru yang potensial;
- r. melakukan pencatatan pemungutan dan pelaporan pendapatan asli daerah;
- s. mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindak lanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- t. melakukan penataan, pengelolaan, pemanfaatan dan penghapusan asset;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Bidang Pengelolaan dan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Pengelolaan Dan Penataan Ruang Laut, Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang Pengelolaan Dan Penataan Ruang Laut, Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Dan Penataan Ruang Laut, Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Dan Penataan Ruang Laut, Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil;
- d. pelaksanaan administrasi Bidang Pengelolaan Dan Penataan Ruang Laut, Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dirinci sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengelolaan Dan Penataan Ruang Laut, Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengelolaan Dan Penataan Ruang Laut, Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan dan Pemantauan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi tata ruang laut dan jasa kelautan, pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil dan konservasi dan keanekaragaman hayati laut;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Pengelolaan dan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi tataruang laut dan jasa kelautan, pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil dan konservasi dan keanekaragaman hayati laut;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis di Bidang Pengelolaan dan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi tataruang laut dan jasa kelautan, pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil dan konservasi dan keanekaragaman hayati laut;
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan pencadangan kawasan konservasi;
- j. mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan penerbitan dokumen rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi;
- k. mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan pencadangan kawasan konservasi;
- l. mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan penerbitan dokumen rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi;
- m. mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan penetapan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP3K), dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP3K);
- n. mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- o. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin bidang pengelolaan dan penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan kewenangan lokasi reklamasi, pelaksanaan reklamasi, izin lokasi perairan pesisir;
- p. melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan penerbitan izin wisata bahari; izin pemanfaatan air laut selain energi, izin lokasi pemasangan pipa dan kabel bawah laut, izin lokasi;

- q. melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan pemberian izin pemanfaatan kawasan konservasi, otoritas pengelolaan jenis ikan yang dilindungi dan terancam punah (CITES), serta penetapan kuota keanekaragaman hayati;
- r. melaksanakan penyiapan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- s. melaksanakan pembinaan teknis dan supervisi di bidang penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil serta jasa kelautan;
- t. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang Pengelolaan Dan Penataan Ruang Laut, Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil;
- u. melaksanakan administrasi bidang Pengelolaan Dan Penataan Ruang Laut, Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil;
- v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang Pengelolaan Dan Penataan Ruang Laut, Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di Bidang Perikanan Budidaya Dan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Perikanan Budidaya Dan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi serta pelaporan di bidang Perikanan Budidaya Dan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan ; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dirinci sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perikanan Budidaya Dan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perikanan Budidaya Dan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan dan merumuskan Kebijakan teknis bidang perikanan budidaya dan daya saing produk Kelautan dan Perikanan meliputi pengembangan kawasan dan usaha budidaya air payau dan air tawar, pengembangan kawasan dan usaha budidaya laut, dan pengembangan daya saing produk dan pemasaran hasil perikanan
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perikanan budidaya dan daya saing produk Kelautan dan Perikanan meliputi pengembangan kawasan dan usaha budidaya air payau dan air tawar pengembangan kawasan dan usaha budidaya laut dan pengembangan daya saing produk dan pemasaran hasil perikanan;
- h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang perikanan budidaya dan daya saing produk Kelautan dan Perikanan meliputi pengembangan kawasan dan usaha budidaya air payau dan air tawar, pengembangan kawasan dan usaha budidaya laut dan pengembangan daya saing produk dan pemasaran hasil perikanan;
- i. melaksanakan daya saing produk Kelautan dan Perikanan;
- j. mengoordinasikan dan melaksanakan pengembangan dan transformasi teknologi budidaya laut air payau dan air tawar;
- k. mengoordinasikan dan melaksanakan transformasi teknologi pemasaran hasil perikanan;
- l. Mengoordinasikan dan melaksanakan produk dan pemasaran hasil perikanan;
- m. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian perikanan budidaya, daya saing produk dan pemasaran hasil;
- n. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin bidang perikanan budidaya dan daya saing produk Kelautan dan Perikanan berdasarkan kewenangan pemerintah

daerah;

- o. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan izin bidang perikanan budidaya dan daya saing produk Kelautan dan Perikanan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah
- p. melaksanakan pemantauan pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis bidang perikanan budidaya dan daya saing produk Kelautan dan Perikanan meliputi pengembangan kawasan dan usaha budidaya air payau dan air tawar pengembangan kawasan dan usaha budidaya laut dan pengembangan daya saing produk dan pemasaran hasil perikanan;
- q. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- r. ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Perikanan Tangkap;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perikanan tangkap;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perikanan Tangkap;
- d. pelaksanaan administrasi Bidang Perikanan Tangkap ; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dirinci sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perikanan Tangkap sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perikanan Tangkap untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perikanan tangkap meliputi pengolahan sumber daya ikan, kenelayanan dan sarana penangkapan ikan dan kepelabuhanan Perikanan;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perikanan tangkap meliputi pengelolaan sumberdaya ikan kenelayanan dan sarana penangkapan ikan dan kepelabuhanan Perikanan;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang perikanan tangkap meliputi pengelolaan sumber daya ikan, kenelayanan dan sarana penangkapan ikan, dan kepelabuhanan Perikanan;
- i. tangkap di wilayah laut sampai dengan 12 mil;
- j. pengendalian penanganan konflik nelayan;
- k. mengordinasikan dan melaksanakan pembinaan kapasitas nelayan dalam bentuk sertifikasi awak kapal Perikanan, dan penguatan setelah nelayan sesuai kewenangan provinsi;
- l. mengoordinasikan dan melaksanakan penerapan kebijakan pembangunan kapal Perikanan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan pembuatan alat tangkap perikanan;
- m. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis penggunaan kapal ukuran diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan alat tangkap nelayan pada wilayah sampai dengan 12 mil;
- n. melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan Pelabuhan Perikanan dan kesahbandaran dalam peningkatan fungsi pelabuhan perikanan;
- o. mengordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana pelabuhan perikanan;
- p. mengordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin bidang perikanan tangkap berdasarkan kewenangan pemerintah daerah;
- q. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan izin bidang perikanan tangkap berdasarkan kewenangan pemerintah daerah;
- r. Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis bidang perikanan tangkap meliputi pengelolaan sumberdaya ikan, kena layanan dan sarana penangkapan ikan komet dan kepelabuhanan Perikanan;

- s. dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Perikanan Tangkap dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang perikanan tangkap .

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan di Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan ; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dirinci sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. merumuskan kebijakan di bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan

Perikanan sampai dengan 12 mil;

- g. melaksanakan kebijakan di bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan sampai dengan 12 mil;
- h. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan sampai dengan 12 mil;
- i. melaksanakan bimbingan, pembinaan teknis dan supervisi di bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan sampai dengan 12 mil;
- j. melaksanakan administrasi Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan ; dan
- k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan dan memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan koordiansi, fasilitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

UPT PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I DAN II

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengelolaan pemanfaatan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan.

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan;
- b. Pelaksanaan teknis pelayanan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan pemanfaatan Pelabuhan Perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi UPT; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

UPT BALAI PENERAPAN MUTU PRODUK HASIL PERIKANAN

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan

kegiatan pelayananpengujian mutu dan keamanan produk perikanan, diversifikasi produk perikanan, dan pemenuhan persyaratan SNI produk perikanan.

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan pengujian mutu dan keamanan produk perikanan, diversifikasi produk perikanan, dan pemenuhan persyaratan SNI pada produk hasil perikanan;
- b. pelaksanaan teknis pelayanan pengujian mutu dan keamanan produk perikanan, diversifikasi produk, dan penerapan persyaratan SNI produk perikanan pada produk hasil perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu dan keamanan produk perikanan, diversifikasi produk, dan penerapan persyaratan SNI pada produk hasil perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi UPT; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

UPT BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan pelayanan teknis operasional produksi dan pelayanan teknik budidaya ikan air payau dan laut, koordinasi teknis dengan jejaring pemuliaan ikan.Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan teknis produksi budidaya ikan air payau/laut, pelayanan teknologi dan jejaring pemuliaan ikan;
- b. Pelaksanaan teknis pelayanan teknis produksi budidaya ikan air payau/laut, pelayanan teknologi, dan jejaring pemuliaan ikan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan teknis produksi budidaya ikan air payau/laut, pelayanan teknologi dan jejaring pemuliaan ikan;
- d. Pelaksanaan administrasi UPT ; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

CABANG DINAS KELAUTAN

Dengan Peraturan Gubernur telah, dibentuk Cabang Dinas Kelautan, masing-masing:

- a. Cabang Dinas Kepulauan Selayar, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Selayar yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Kepulauan Selayar;

- b. Cabang Dinas Pangkajene dan Kepulauan, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Pangkep yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Kepulauan Pangkajene dan Kepulauan;
- c. Cabang Dinas Luwu Raya, Kelas A berkedudukan di Kota Palopo yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Toraja Utara;
- d. Cabang Dinas Ajatappareng, Kelas A berkedudukan di Kota Pare-Pare yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Barru, Kota Pare-Pare, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, dan Kabupaten Enrekang;
- e. Cabang Dinas Bosowasi, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Bone yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Sinjai;
- f. Cabang Dinas Wilayah Selatan, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Bulukumba yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Bulukumba;
- g. Cabang Dinas Wilayah Mamminasata, Kelas A berkedudukan di Kota Makassar yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar;

Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur berdasarkan wilayah kerja.

Kepala Cabang Dinas Kelautan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya

2.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembentukan Cabang Dinas Kelautan maka Rancangan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris membawahi 3 SubBagian
3. Bidang sebanyak 4 Unit
4. UPT sebanyak 4 unit dengan membawahi 1 Bagian Tata Usaha dan 2 Unit Seksi
5. Kepala CDK sebanyak 7 unit dengan membawahi 1 Bagian Tata Usaha dan 2 Unit Seksi

Gambar 1

Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan



2.2.SumberDayaDinasKelautandanPerikanan

2.2.1 SumberdayaManusia

a. Komposisi PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi terdiri atas 4 bidang teknis, Sekretariat dan didukung 5 Unit Pelayanan Teknis Daerah. Pada unit tersebut telah terdistribusi pegawai dengan jumlah sumberdaya kepegawaian sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Komposisi PNS Menurut Jenis Kelamin

Unit Kerja	PNS		Jumlah	Non PNS		Jumlah
	Pria	Wanita		Pria	Wanita	
Kepala Dinas	1	0	1			
Sekretariat	24	25	49	24	10	34
Bidang PPRLP3K	4	7	11	0	3	3
Bidang Perikanan Tangkap	5	7	12	2	1	3
Bidang Pengawasan SDKP	3	7	10	1	2	3
Bidang Perikanan Budidaya dan DSPKP	6	7	13	0	2	2
CDK Kep. Selayar	5	0	5	3	3	6
CDK Pangkajene dan Kepulauan	10	2	12	5	2	7
CDK Luwu Raya	2	3	5	3	4	7
CDK Ajatappareng	5	2	7	6	1	7
CDK Bosowasi	5	3	8	4	3	7
CDK. Wilayah Selatan	2	3	5	6	1	7
CDK Mamminasata	7	7	14	5	2	7
UPT PP Wilayah I	4	3	7	9	2	11
UPT PP Wilayah II	10	0	10	3	5	8
UPT BPMPP	3	9	12	5	8	13
UPT PBAP	7	0	7	15	3	18
Fungsional	2	5	7			

Dipekerjakan	1	0	1			
Jumlah	106	90	196	91	52	143

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019

- b. Komposisi PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan menurut Golongan Tingkat kepangkatan dan golongan pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan bervariasi dari Golongan I sampai Golongan IV, adapun strukturnya sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Komposisi PNS Menurut Golongan

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Golongan IV/d	-	-	-
2	Golongan IV/c	1	-	1
3	Golongan IV/b	11	1	12
4	Golongan IV/a	12	9	21
5	Golongan III/d	29	28	57
6	Golongan III/c	21	34	55
7	Golongan III/b	10	9	19
8	Golongan III/a	4	6	10
9	Golongan II/d	7	2	9
10	Golongan II/c	3	-	3
11	Golongan II/b	5	-	5
12	Golongan II/a	1	-	1
13	Golongan I/d	-	-	-
14	Golongan I/c	-	1	1
15	Golongan I/b	2	-	2
16	Golongan I/a	-	-	-
Jumlah		106	90	196

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019

- c. Komposisi PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Eselon Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) harus dibarengi dengan system karier yang baik. Tapi sebelumnya harus dilakukan

analisis beban kerja. Kepala Dinas harus memiliki komitmen yang kuat untuk membangun system karier dalam jabatan, sesuai dengan amanat UU No.5/2014 tentang ASN. Karier PNS berbasis pada system merit yang lebih terbuka, adil, transparan dengan kualifikasi, kompetensi, kinerja serta integritas, dan moralitas yang baik.

Tabel 2.3.

Komposisi PNS Menurut Golongan

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Eselon II	1	-	-
2	Eselon III	15	1	1
3	Eselon IV			
	Jumlah	106	90	196

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019

- d. Komposisi PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Pendidikan Formal Yang Ditamatkan
- Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 tercatat sebanyak 196 orang, dengan tingkat pendidikan bervariasi dari Sekolah Dasar (SD) sampai Doktor (S3). Adapun komposisi sebagai berikut.

Tabel.2.4.

Struktur Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Formal

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	S3	2	1	3
2	S2	29	20	49
3	S1	48	65	113
4	Sarjana Muda	8	1	9
5	SLTA	17	2	19
6	SLTP	0	1	1
7	SD	2	0	2
	Jumlah	106	90	196

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019

- e. Komposisi PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang mengikuti Diklat PIM Tahun 2014-2019

Tingkat penjenjangan yang telah diikuti oleh pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2014–2019 sebanyak 35 orang yang mulai dari Diklat PIM IV sampai dengan Diklat PIM II. Adapun komposisinya sebagai berikut:

Tabel 2.5.

Komposisi Diklat PIM Tahun 2014-2019

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Diklat PIM II	1	-	1
2	Diklat PIM III	13	1	14
3	Diklat PIM IV	17	6	23
	Jumlah	31	7	38

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019

2.3. Sarana dan Prasarana (Aset)

Sarana dan Prasarana (Aset) yang mendukung Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengembangkan Program dan kegiatan guna menunjang tugas dan fungsi pelayanan adalah :

Tabel. 2.6

Daftar Aset yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan

No.	Jenis Aset	Status			Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak Berat	
1	PPI Pelabuhan Perikanan	10	7	-	17
2	SPDN	2		2	4
3	Dempon Tambak	15	-	-	14
4	Gedung Konservasi	2	2	-	4
5	Kantor UPT	2	2	-	4

6	Kantor CDK	4	3	-	7
7	Laboratorium	1	-	2	3

8	Kolam Perbenihan Budidaya Payau	4	4	-	8
9	Kolam Perbenihan Budidaya Air Tawar	8	-	-	8
10	Kolam Pendederan Budidaya Payau	4	-	-	4
11	Kolam Pendederan Budidaya Air Tawar	3	-	1	4
12	Kendaraan Operasional (Mobil)	16	3	19	38
13	Kendaraan Operasional (Motor)	9	15	106	130
14	Kantor Pelayanan Pengujian Mutu	1	-	-	1
15	Speed Boat	2	-	-	2
16	Pos Pengawas	20	30	10	60
17	Tanah Bangunan Perumahan	12	5	3	20

Pengelolaan aset telah menjadi tanggung jawab unit kerja yang sesuai dengan tugas fungsi yaitu :

2.3.1. Bidang Perikanan Tangkap

1. Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan Perikanan adalah Prasarana Perikanan tangkap yang fungsinya :

Tempat kegiatan bongkar muat hasil perikanan. Sebagai sarana bengkel untuk perbaikan kapal, mesin dan alat tangkap ikan. Sebagai tempat sarana pembinaan nelayan dan sekaligus sebagai home base nelayan. Disamping sarana dan prasarana tersebut, juga dilengkapi sarana penunjang yakni (1) Tempat Pemasaran Ikan, (2) Tempat Kapal Bersandar, (3) Perkantoran, sampai dengan tahun 2018, terdapat 23 unit Pelabuhan Perikanan (Tipe D) yang ada di 15 Kabupaten/kota dengan kondisi rata-rata baik, dan beroperasi. Secara detail keberadaan Pelabuhan Perikanan di Sulawesi Selatan seperti pada table 2.7 baik yang sudah diserahkan ke Provinsi maupun yang belum diserahkan.

Tabel 2.7.

Kondisi Sarana Pelabuhan Perikanan di Sulawesi Selatan-1

No	Nama Pelabuhan Perikanan	Lokasi	Kelas / Type	Keterangan
		Kab /Kota		
1	Pelabuhan Perikanan Untia	Kota Makassar	PPN/B	UPT Pusat
2	Pelabuhan Perikanan Paotere	Kota Makassar	PPI / D	Operasional/ belum P3D
3	Pelabuhan Perikanan Bontobahari	Kab. Maros	PPI / D	Tdk Operasional/ P3D
4	Pelabuhan Perikanan Labuang	Kab. Maros	PPI / D	Operasional /TPI (SK Bupati)
5	Pelabuhan Perikanan Maccini Baji	Kab. Pangkep	PPI / D	Operasional/ P3D
6	Pelabuhan Perikanan Cempae	Kota Parepare	PPI / D	Operasional/ P3D
7	Pelabuhan Perikanan Lonrae	Kab. Bone	PPI / D	Operasional / P3D
8	Pelabuhan perikanan Bone Pute	Kab.Luwu	PPI / D	Tdk Operasional / P3D
9	Pelabuhan Perikanan Ulo-Ulo	Kab. Luwu	PPI / D	Operasional/P3D
10	Pelabuhan Perikanan Balambang	Kab. Luwu	PPI / D	Operasional/P3D
11	Pelabuhan Perikanan Pontap	Kota Palopo	PPI / D	Operasional/P3D
12	Pelabuhan Perikanan Malili	Kab. Luwu Timur	PPI / D	Tdk Operasional/TPI (SK Bupati)
13	Pelabuhan Perikanan Lappa	Kab. Sinjai	PPI / D	Operasional/belum P3D
14	Pelabuhan Perikanan Kajang	Kab. Bulukumba	PPI / D	Operasional /P3D
15	Pelabuhan Perikanan Bontobahari	Kab. Bulukumba	PPI / D	Operasional /P3D
16	Pelabuhan Perikanan Birea	Kab. Bantaeng	PPI / D	Operasional/P3D
17	Pelabuhan Perikanan Tanrusampe	Kab. Jeneponto	PPI / D	Operasional Musiman/P3D
18	Pelabuhan Perikanan Beba	Kab. Takalar	PPI / D	Operasional/P3D
19	Pelabuhan Perikanan Barombong	Kab. Gowa	PPI / D	Operasional/P3D
20	Pelabuhan Perikanan Bonehalang	Kab. Kep. Selayar	PPI / D	Operasional/belum P3D
21	Pelabuhan perikanan Polejiwa	Kab. Barru	PPI / D	Tdk Operasional/Belum P3D
22	Pelabuhan perikanan Sumpang Binangae	Kab. Barru	PPI / D	Operasional/Belum P3D

Sumber : Bidang Perikanan Tangkap dan Laporan Tahunan 2019

2. Stasiun Pengisian Bahan Bakar

Sarana Stasiun Pengisian Bahan Bakar yang berlokasi di Pelabuhan Perikanan dimana aset tersebut sudah diserahkan ke provinsi yaitu sebagai berikut :

1. SPDN Pelabuhan Perikanan Beba Kabupaten Takalar 1 unit
2. SPDN Pelabuhan Perikanan BireaKa bupaten Bantaeng 1 unit
3. SPDN Pelabuhan Perikanan Kajang Kabupaten Bulukumba 1 unit
4. SPDN Pelabuhan Perikanan Lonrae Kabupaten Bone 1 unit

2.3.2. Bidang Perikanan Budidaya

1. Dempon Tambak

Sarana Dempon tambak milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terdapat di hampir seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Adapun peranan sarana tersebut adalah :

- a. Tempat uji coba teknologi budidaya
- b. Tempat pelatihan dan pembinaan bagi petugas pemerintah dan swasta untuk berusaha di bidang perikanan tambak
- c. Sarana pembelajaran bagi petugas perikanan budidaya dalam peningkatan kinerjanya

2. Sarana Perikanan Budidaya Payau dan Laut

Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Payau dan Laut yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dikelola oleh UPT Perikanan Budidaya Payau dan Laut terdapat di kabupaten Barru, yang peranannya adalah:

- a. Sarana uji coba pembenihan udang untuk spesies atau jenis udang tertentu
- b. Sarana pengkajian terhadap tingkat produktivitas dan kelangsungan hidup budidaya payau dan laut.
- c. Sarana pelatihan, pembinaan petugas pemerintah dan swasta yang memiliki usaha dibidang pembenihan udang
- d. Sarana pembelajaran bagi petugas BPU dalam peningkatan kinerjanya
- e. Sebagai unit produksi benur udang yang berkualitas

Adapun unit sarana dan prasarana yang terletak di UPT Perikanan Budidaya Payau dan Laut yaitu:

- | | | |
|----|--|--------|
| 1. | Kantor UPT | 1 unit |
| 2. | Kendaraan operasional | 1 unit |
| 3. | Kolamperbenihan | 4 unit |
| 4. | Kolampendederan | 4 unit |
| 5. | Laboratorium | 1 unit |
| 6. | Instalasi Pengembangan Budiaya Air Tawar (Instalasi Lajoa) | |
| 7. | Sarana Pengembangan Budiaya Air Tawar (Instalasi Lajoa) yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terdapat di Kabupaten Soppeng dan pengembangannya didukung Lima (5) Kabupaten/Kota, masing-masing yaitu Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap, Kota Palopo dan Kabupaten Gowa. Adapun peranannya adalah: | |
| 8. | Sarana uji coba teknologi pembenihan dan pembesaran ikan air tawar | |
| 9. | Sarana Pelatihan dan Pembinaan kegiatan budidaya air tawar | |

10. Sarana pemurnihan benih ikan air tawar untuk menghasilkan bibit ikan dan calon induk unggul dan tahan terhadap penyakit
11. Sarana produksi untuk kebutuhan Restocking dan pemenuhan calon induk untuk Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan BBI local Kabupaten/Kota.

Adapun unit sarana dan prasarana yang terletak di Instalasi Lajoa yaitu :

1. Kantor Instalasi 1unit
2. Kendaraan operasional 1 unit
3. Kolam perbenihan 4 unit
4. Kolam pendederan 4 unit
5. Laboratorium 1 unit
6. Pembinaan Usaha dan Kelembagaan

Sarana Penerapan Mutu dan Pengembangan Produk Hasil Perikanan

Sarana dan Prasarana Penerapan Mutu dan Pengembangan Produk Hasil Perikanan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dikelola oleh UPT Balai Penerapan Mutu dan Pengembangan Produk Hasil Perikanan, yang berlokasi di kota Makassar adapun aset-aset yang berperan dalam pengembangan produk dan pelayanan mutu adalah:

1. Sarana pengujian terhadap mutu hasil perikanan,
2. Sarana pengkajian terhadap mutu hasil pengolahan modern dan tradisional hasil perikanan,
3. Sarana pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan,
4. Sarana pelatihan dan pembelajaran bagi petugas pemerintah dan swasta yang menangani hasil perikanan.

Depo

Disamping Sarana dan Prasarana Penerapan Mutu dan Pengembangan Produk Hasil Perikanan tersebut diatas, juga dilengkapi dengan Depo 1 unit yang peranannya adalah sarana penyimpanan produksi hasil perikanan terutama pada saat ikan/udang mengalami panen puncak yang berlokasi di Kabupaten Barru.

2.3.3 Perlindungan, Pengawasan dan Pengendalian

Unit perlindungan, pengawasan dan pengendalian melaksanakan tugas pada usaha penangkapan dan budidaya. Khusus untuk pelaksanaan tugas pada kegiatan penangkapan, unit ini dilengkapi dengan kapal pengawasan perikanan. Dalam kegiatan tugas pengawasan dilaut, petugas perikanan sering bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut dan Kepolisian

Perairan Laut, terutama pada saat operasi lapangan dilakukan. Secara keseluruhan sarana dan prasarana pengawasan pendukung Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.8.
Sarana dan Prasarana Pendukung

No	Sarana/Prasarana	Jumlah (Unit)
1	Pos Pengawas	60
2	Kapal Pengawasan	2

Sumber : Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya KP dan Laporan Tahunan 2019

2.3.4 Kawasan Konservasi Perairan Daerah dan Perlindungan Laut

Mengembangkan konservasi sumberdaya ikan dan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan pada tingkat ekosistem, jenis dan genetic serta mendorong penguatan fungsi otoritas pengelola konservasi sumberdaya ikan maka telah dibangun prasarana Konservasi di beberapa kabupaten yaitu:

1. Gedung Konservasi di Kabupaten Pangkep 1 unit
2. Gedung Konservasi di Kabupaten Barru 1 unit
3. Gedung Konservasi di Kabupaten Luwu Utara 1 unit
4. Gedung Konservasi di Kabupaten Selayar 1 unit

2.4. Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

2.4.1. Tugas pokok Capaian Kinerja Pelayanan

Capaian kinerja pelayanan selama 5 (lima) tahun berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib dan indikator sesuai urusan yang menjadi tugas dan fungsi (IKK) yaitu:

a. Produksi Perikanan

Produksi perikanan Sulawesi Selatan selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu rata-rata 1,9% pertahun, dimana produksi perikanan pada tahun 2015 hanya sebesar 3,786,837.2 ton meningkat menjadi sebesar 4,061,326.7 ton pada tahun 2019. Kenaikan produksi perikanan ini didukung dengan produksi perikanan budidaya yang juga mengalami kenaikan sebesar 1,5% dan perikanan tangkap sebesar 6,6 %. Komoditas yang dikembangkan adalah komoditas yang bertumpu pada potensi yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal seperti

Rumput Laut, Udang dan Bandeng. Dalam rangka pengembangan komoditas unggulan dan komoditas lain mulai tahun 2015 - 2019 telah dilakukan berbagai upaya salah satunya yaitu penguatan kelembagaan, bantuan bibit, akses permodalan dan perluasan jejaring serta kemitraan. Kenaikan produksi perikanan didukung pada nilai produksi, dimana kontribusi nilai produksi dari sektor Perikanan Budidaya sebesar 13,2% dan Perikanan Tangkap sebesar 8,3%. Kenaikan nilai produksi perikanan sangat dipengaruhi oleh nilai produksi rumput laut, dimana kontribusi nilai rumput laut terhadap nilai produksi perikanan budidaya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, yaitu tahun 2015 kontribusinya sebesar 48,9%, 2016 sebesar 42,7%, 2017 sebesar 46,7%, 2018 sebesar 50,6% dan tahun 2019 sebesar 51,8 %.

Pada tahun 2019 Kabupaten penghasil rumput laut di Sulawesi Selatan antara lain Kabupaten Luwu sebesar 604,420.8 ton, Kabupaten Wajo sebesar 476,055.2 ton, Kabupaten Takalar sebesar 466,014.1 ton, kabupaten Pangkep sebesar 445,608.0 ton, Kabupaten Bone sebesar 291,686.6 ton. Sulawesi Selatan merupakan penghasil rumput laut terbesar di Indonesia. Selain rumput laut, Sulawesi selatan juga dikenal sebagai penghasil udang terutama jenis udang Vannamei dan udang Windu. Selama 5 tahun terakhir kenaikan produksi udang di Sulawesi Selatan sebesar 2,6%. Pada tahun 2019 Kabupaten penghasil udang di Sulawesi Selatan antarlain kabupaten Pinrang sebesar 11,239.1 Ton, Kabupaten Bone sebesar 5,103.4 ton, Kabupaten Barru sebesar 4,211.4 Ton, kabupaten Pangkep sebesar 3,922.0 ton, kabupaten Luwu sebesar 3,691.7 Ton,

Bandeng merupakan salah satu komoditi unggulan sector perikanan budidaya, dimana kenaikan rata-rata selama 5 tahun terakhir sebesar 10,2%. Pada tahun 2019 Kabupaten penghasil Bandeng di Sulawesi Selatan antarlain kabupaten Bone sebesar 78,199.0 Ton, Kabupaten Wajo sebesar 22,144.1 ton, Kabupaten Pinrang sebesar 20,236.0 Ton, kabupaten Pangkep sebesar 14,541.0 ton, kabupaten Luwu Timur sebesar 11,710.0 Ton. Komoditas tuna dan Cakalang adalah komoditas yang berbasis pada usaha penangkapan sehingga produksi komoditas ini sepenuhnya tergantung pada tingkat upaya (effort) yang dilakukan oleh nelayan dan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pengkapanikan. Melalui kebijakan pengembangan sarana dan prasarana penangkapan serta peningkatan mutu hasil tangkapan, komoditas Tuna, Tongkol dan Cakalang (TTC), capaian produksi dapat dioptimalkan memberikan kontribusi nilai yang lebih baik dengan peningkatan jumlah produksi yang memiliki grade lebih tinggi pada pasar ekspor maupun lokal. Dari sisi produksi, capaian hasil komoditas Tuna, Tongkol dan Cakalang (TTC) telah terjadi kenaikan rata-rata selama 5 tahun sebesar 3,4%.

Tabel 2.9 Produksi Perikanan Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

Satuan : Ton

No	Bidang/Urusan	Sat	Tahun					Kenaikan Rata-Rata %
			2015	2016	2017	2018	2019	
a.	Jumlah produksi ikan	ton	3.786.837,2	3.941.648,8	4.262.554,7	3.935.493,0	4.061.326,7	1,9
b.	Target daerah	ton	3.349.134,60	3.517.298,70	4.145.760,60	4.906.672,70	5.117.387,52	114
	Produksi Perikanan	%	113,1	112,1	102,8	80,2	79	8,0
c.	Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	310.290,4	312.380,8	359.770,1	366.540,6	398.565,3	6,6
d.	Target daerah	ton	298.111,6	301.092,7	304.103,6	307.144,7	369.365,0	5,8
	Produksi Perikanan Tangkap	%	104,1	103,7	118,3	119,3	107,9	12
e.	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	3.476.546,8	3.629.268,0	3.902.784,6	3.568.952,3	3.662.761,4	1,5
f.	Target Daerah	ton	3.051.023	3.216.206	3.841.657	4.599.528	4.656.858,0	11,5
	Produksi Perikanan Budidaya	%	113,9	112,8	101,6	77,6	78,6	8,3

Sumber: Statistik Dinas Kelautan & Perikanan Prov. Sul-Sel 2019

Tabel. 2.10. Volume Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2015 - 2019

Rincian	Tahun (Ton)					Kenaikan Rata-Rata %
	2015	2016	2017	2018	2019	
Udang	40,346.8	41,686	45,341.8	46,524.0	44,520.5	2.6
• Udang Windu	14,835.1	14,776.7	12,045.8	10,169.5	10,370.2	(8.1)
• Udang Vannamae	12,768	14,834.5	20,643.9	23,701.6	21,615.3	15.3
• Udang Lainnya	12,743.7	12,074.8	12,652.1	12,652.9	12,534.9	(0.3)
Rumput Laut	3,289,907.6	3,409,048.2	3,662,969.9	3,317,524.9	3,406,924.6	1.1
• E. Cottoni	2,409,022.4	2,357,244.7	2,667,719.4	2,377,824.3	2,438,073.5	0.7
• Gracilaria Sp	880,885.2	1,051,803.5	995,250.5	939,700.6	968,851.2	2.9
• Bandeng	126,226.6	155,762.4	170,135.9	179,254.1	184,186.2	10.2
• Patin	55.5	36.4	41	30.2	21.1	(19.6)
• Lele	2,172.1	2,365.6	2,409.9	2,407.9	2,794.2	6.7
• Nila	4,139.8	5,711.2	7,058.6	8,219.8	8,664.6	20.9
• Kerapu	22.1	15.6	9.9	3.2	49.4	327.5
• Kakap	10.4	11.9	3.2	8.6	17.2	52.5
• Gurame	13.7	11.9	14.7	16.3	22.3	14.5
• Mas	9,291	9,829.5	9,792.3	9,869.0	10,186.3	2.4
• Ikan Lainnya	4,358.7	4,789.5	5,006.2	5,088.6	5,375.1	5.4
Jumlah	3,476,546.8	3,629,268	3,902,783.4	3,568,952.1	3,662,761.4	1.5

Sumber: Statistik Dinas Kelautan & Perikanan Prov. Sul-Sel 2019

Tabel 2.11 Volume Produksi Perikanan Tangkap
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 - 2019

NO	Kab/Kota	2015		Jumlah	2016		Jumlah	2017		Jumlah	2018		Jumlah	2019		Jumlah
		Laut	PUD		Laut	PUD		Laut	PUD		Laut	PUD		Laut	PUD	
1	SELAYAR	24,155.8	-	24,155.8	24,092.6	-	24,092.6	20,152.2	-	20,152.2	21,592.5	-	20,152.2	28,268.3	-	28,268.3
2	BULUKUMBA	52,888.4	-	52,888.4	50,693.7	-	50,693.7	53,392.8	-	53,392.8	53,671.0	-	53,392.8	52,651.6	-	52,651.6
3	BANTAENG	5,186.6	-	5,186.6	5,446.2	-	5,446.2	5,706	-	5,706	5,745.2	-	5,706	6,101.2	-	6,101.2
4	JENEPONTO	16,459	-	16,459	16,450.8	-	16,450.8	16,700.3	-	16,700.3	16,892.6	-	16,700.3	17,058.1	-	17,058.1
5	TAKALAR	11,444.2	-	11,444.2	10,614.8	-	10,614.8	11,444.2	-	11,444.2	10,267.5	-	11,444.2	18,990.9	-	18,990.9
6	SINJAI	39,972.1	-	39,972.1	36,882.5	-	36,882.5	38,165.9	-	38,165.9	33,470.7	-	38,165.9	35,995.1	-	35,995.1
7	MAROS	14,788.6	451.5	15,240.1	14,872.1	497.6	15,369.7	15,259.6	523.2	15,782.8	19,740.2	1,411.6	15,782.8	17,131.7	976.6	18,108.3
8	PANGKEP	7,733.8	-	7,733.8	6,389.4	-	6,389.4	15,110.9	-	15,110.9	16,676.1	-	15,110.9	22,913.4	-	22,913.4
9	BARRU	18,244.8	-	18,244.8	18,117.9	-	18,117.9	18,439.2	-	18,439.2	18,965.2	-	18,439.2	19,450.4	-	19,450.4
10	BONE	34,710.5	72.9	34,783.4	36,658.5	70.5	36,729	44,539.6	83.1	44,622.7	46,641.3	105.6	44,622.7	48,198.4	128.3	48,326.6
11	WAJO	4,255.1	8,647.3	12,902.4	6,306.6	6,356.3	12,662.9	15,942	19,413.5	35,355.5	16,409.9	18,945.9	35,355.5	17,269.6	20,232.3	37,501.9
12	PINRANG	12,943.9	280.5	13,224.4	13,171.9	255.1	13,427	13,404	285.7	13,689.7	13,820.7	263.7	13,689.7	14,005.8	271.5	14,277.3
13	LUWU	12,486.2	8.6	12,494.8	14,311.8	8.4	14,320.2	16,390	8.5	16,398.5	17,379.3	7.2	16,398.5	17,429.9	6.6	17,436.5
14	LUWU UTARA	1,570.9	64.9	1,635.8	1,646.5	64.9	1,711.4	1,716.5	181.5	1,898	1,716.7	183.3	1,898	1,708.4	186.0	1,894.4
15	LUWU TIMUR	8,659.9	328.7	8,988.6	9,328.2	328.7	9,656.9	8,471	334.4	8,805.4	9,651.7	331.3	8,805.4	9,736.4	258.6	258.6
16	MAKASSAR	12,740.8	-	12,740.8	12,989.3	-	12,989.3	13,462.8	-	13,462.8	13,525.5	-	13,462.8	19,943.1	-	19,943.1
17	PARE-PARE	4,313	-	4,313	4,571.9	-	4,571.9	4,629.7	-	4,629.7	4,647.8	-	4,647.8	4,731.9	-	4,731.9
18	PALOPO	12,685.6	-	12,685.6	14,861.6	-	14,861.6	16,951.9	-	16,951.9	18,387.5	-	18,387.5	18,347.1	-	18,347.1

Tabel 2.12
Volume Produksi Garam-1-1

Kabupaten/ Kota	Sat	2015	2016	2017	2018	2019	Rata- Rata %
Jeneponto	Ton	65,816	11,558.1	19,818.5	38,769.1	71,956.3	42.6
Takalar	Ton	14,252.7	1,421.5	13,943.6	11,104.5	22,358.9	218.0
Pangkep	Ton	34,694.2	1,002.04	5,475.3	36,723.4	45,719.9	236.1
Selayar	Ton	762	7,0	22.5	115.7	156.2	142.9
Maros	Ton	-	-	-	-	147.5	
Total		115,524.9	13,988.6	39,259.9	86,712.7	140,338.9	68.9

Sumber: Statistik Dinas Kelautan & Perikanan Prov. Sul-Sel 2019

Produksi perikanan tangkap dan budidaya menjadi pasokan dalam proses produksi ikan olahan. Selama kurun waktu 2015–2019, volume produk olahan mengalami peningkatan sebesar 9,3% dari 22,969 Ton pada tahun 2015 menjadi 5,332.1 Ton pada tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya ragam produk olahan bernilai tambah yang dihasilkan unit pengolahan ikan (UPI), baik skala besar maupun UMKM dalam upaya preferensi konsumen terhadap diversifikasi produk perikanan bermutu, aman dikonsumsi dan memiliki nilai tambah.

Tabel 2.13.
Volume Produksi Olahan Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018-1

Rincian	Tahun (Ton)					Kenaikan Rata- Rata %
	2015	2016	2017	2018	2019	
Volume Produk Olahan (Ton)	22,969	23,997	24,424.4	54,033.5	5,332.1	9,3

Sumber: Statistik Dinas Kelautan & Perikanan Prov. Sul-Sel 2019

Adapun jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Sulawesi Selatan yaitu Unit Pengolahan Ikan sebanyak 86 Unit. Berdasarkan jenis pengolahan dan penanganan :

- a. Produk Beku : 36 Unit
- b. Kering dan Ikan Lainnya : 22 Unit

- c. Eksportir Rumpaut Laut : 28Unit

Sedangkan jumlah UKM di Sulawesi Selatan rata-rata dengan jenis olahan yang berupa :

- a. Bakso (ikan /rumpautlaut)
- b. Kerupuk&Kripik(ikan/rumpautlaut)
- c. Sirup,dodolrumpautlau
- d. Bandeng tanpaduri
- e. AbonIkan
- f. NuggetIkan
- h. Ikanasap
- i. Pengolahanrajudangan
- j. dll

b. Konsumsi Ikan

Dalam periode 2015-2019 telah terjadi peningkatan konsumsiikan dengan capaian rata-rata 8.5% pertahun yaitu 49,7 kg/kap pada tahun 2015,menjadi 52,5 kg/kap pada tahun 2016, menjadi 55,2 kg/kap pada tahun 2017, menjadi 56,3kg/kap pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 sebesar 64,7 kg/kap. Sedangkan pencapaian konsumsi ikan nasional pada tahun 2019 (datasementara) telah mencapai 61,5kg/kap (Data Susenas).

Hal ini menggambarkan bahwa produk perikanan untuk dikonsumsi tersedia dan cukup baik yang berasal dari kegiatan penangkapan ikan maupun budidaya. Selainitu, peningkatan capaian rata-rata konsumsi ikan perkapita Sulawesi Selatan tersebut juga menggambarkan bahwa pelaksanaan kebijakan dan kampanye Gemar Makan Ikan memberikan hasil yang signifikan.

Tabel 2.14
Konsumsi Ikan Kab/kota Tahun 2015-2019-1

N O	Kabupaten/ Kota	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-Rata pertumbu han %
1	SELAYAR	49,45	53,45	53,45	53,5	57,4	3,9
2	BULUKUMBA	45	44.18	45.2	45,2	48,6	2,0
3	BANTAENG	30.7	30.9	33.63	51,0	48,8	14,2
4	JENEPONTO	39.7	39.9	40.5	40,8	41,0	0,8
5	TAKALAR	54.69	54.25	55.55	55,7	55,8	0,5
6	SINJAI	45	45	46	47,0	47,0	1,1
7	MAROS	39.7	40.03	40.4	40,9	41,3	1,0
8	PANGKEP	39.31	47.6	47	48,0	49,0	6,0
9	BARRU	45.32	45.32	45.43	45,6	45,7	0,2
10	BONE	56.25	57.88	56.86	57,9	58,2	0,9
11	WAJO	78,56	65,92	63,47	63,5	63,9	4,8
12	PINRANG	43.24	44.05	44.05	50,5	52,0	4,9
13	LUWU	48.05	50.32	52.00	53,0	53,6	2,8
14	LUWU UTARA	56.61	57.18	57.75	58,0	59,5	1,2
15	LUWU TIMUR	43.23	43.86	44.9	44,8	45,0	1,0
16	MAKASSAR	57.72	57.8	58.66	58,7	58,7	0,4
17	PARE-PARE	31.30	32.75	28.28	32,9	33,2	2,0
18	PALOPO	49,83	49,53	54,43	54,6	53,8	2,0
19	SIDRAP	40.08	40.00	40.08	40,1	40,1	0,0
20	SOPPENG	29,56	33,48	33,58	30,7	33,4	3,4
21	ENREKANG	16.62	20.13	21	22,5	22,6	8,2
22	TANA TORAJA	23	23	14,59	20,0	21,0	1,4
23	TORAJA UTARA	18.50	19	19	20,0	21,0	3,2
24	GOWA	46,4	45,7	47,41	46,6	47,3	0,5
Sulawesi Selatan		46.8	49.7	52.5	56.3	64.7	8.5

Sumber: Data Olahan Statistik Dinas Kelautan & Perikanan Prov. Sul-Sel 2018

*Tabel 2.15 Konsumsi Ikan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 - 2019-1*

Bidang/ Urusan	Sat	Tahun					Kenaikan
		2015	2016	2017	2018	2019	Rata-Rata %
Jumlah Konsumsi Ikan	(Kg/kap/thn)	49.7	52.5	55.2	56.3	64.7	8.5
Target Daerah	Kg/kap/thn)	45.2	45.6	46.1	46.5	57.02	6.4
Konsumsi Ikan	%	110.0	115.1	119.7	121.1	113	0.8

Sumber: Data Olahan Statistik Dinas Kelautan & Perikanan Prov. Sul-Sel 2019

c. CakupanBinaKelompokNelayan

Jumlah Kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan selama 5 tahun terakhir sekitar 465 kelompok dengan jenis bantuan sarana dan prasarana alat tangkap sesuai permohonan proposal yang diajukan oleh kelompok. Tahun 2015 hanya 89 kelompok yang mendapatkan bantuan sedangkan tahun yang paling banyak mendapatkan bantuan pemerintah daerah adalah tahun 2016 yaitu sebesar 193 kelompok. Kemudian ditahun 2017 kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan sebanyak 78 kelompok, ditahun 2018 kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan sebanyak 50 Kelompok dan pada tahun 2019 sebanyak 55 kelompok.Cakupan bina kelompok nelayan diarahkan untuk kontribusi terhadap ketahanan pangan.

Tabel.2.16 Cakupan Bina Kelompok Nelayan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019-1

Bidang/Urusan	Sat	Tahun					Kenaikan
		2015	2016	2017	2018	2019	Rata-Rata %
Jumlah Kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda tahun n	klp	89	193	78	50	55	7.8

n Jumlah kelompok nelayan	klp	295	303	308	311	314	1.6
---------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	30,17	63.7	25.32	16.08	17.52	30,17
--------------------------------------	----------	-------	------	-------	-------	-------	-------

Sumber: Data Olahan Statistik Dinas Kelautan & Perikanan Prov. Sul-Sel 2018

d. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Jumlah produksi ikan kontribusi hasil kelompok nelayan selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, dimana produksi ikan kontribusi kelompok nelayan pada tahun 2015 sebesar 93.614 ton, pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 181.055,91 ton, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 78.393,90 ton kemudian pada Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 173.412,00 ton, dan pada tahun 2019 meningkat kembali menjadi 174.620,24 ton. Produksi kontribusi hasil kelompok nelayan didapatkan berdasarkan data kelompok yang menerima bantuan pemerintah provinsi berdasarkan usulan yang diajukan oleh Dinas KP Pemerintah kab/kota dan pemangku kepentingan.

Tabel. 2.17
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2015-2019

Bidang/ Urusan	Sat	Tahun					Kenai kan Rata- Rata %
		2015	2016	2017	2018	2019	
Jumlah produksi ikan kontribusi hasil kelompok nelayan	ton	93.614	181.055,91	78.393,90	173.412,00	174.620,24	39.7
Jumlah produksi ikan di daerah	ton	310.290,4	312.380,8	359.770,1	366.540,6	436.550,6	9.2

Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	%	28,71	55,18	20,02	47,66	40	37.6
--	----------	-------	-------	-------	-------	----	------

Sumber: Data Olahan Statistik Dinas Kelautan & Perikanan Prov. Sul-Sel 2018

e. Proporsi Tangkap Ikan yang berada dalam Batasan Biologis yang Aman

Dari tahun 2015 sampai saat ini, proporsi tangkapan ikan di Sulawesi Selatan berada dalam batasan biologis yang aman. Dalam kerangka menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan pada pembangunan nasional, proporsi tangkapan ikan harus dipertahankan untuk berada dalam batasan biologis yang aman.

Tabel. 2.18

Proporsi Tangkap Ikan yang berada dalam batasan Biologis yang Aman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

Bidang/Urusan	Sat	Tahun					Kenaikan Rata-Rata %
		2015	2016	2017	2018	2019	
Jumlah tangkapan ikan	ton	310,290.4	312,380.8	359,770.1	363,853.0	436,550.6	9.2
80% dari tangkapan maksimum lestari	ton	743,776	743,776	743,776	743,776.0	743,776.0	-
Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	41.7	42.0	48.4	48.92	58.69	9.3

Sumber: Data Olahan Statistik Dinas Kelautan & Perikanan Prov. Sul-Sel 2018

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2015, jumlah tangkapan ikan sebesar 310.290,4 ton mengalami peningkatan ditahun 2016 sebesar 312.380,8 ton. Kemudian di tahun 2017 kembali mengalami peningkatan sebesar 359.770,1 ton, tahun 2018 sebesar 363,853.0ton dan mengalami

peningkatan sampai tahun 2019 mencapai sebesar 436.550,6 ton. Walaupun proporsi tersebut mengalami kenaikan, namun masih dapat dikendalikan untuk tidak melebihi 100 persen dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan (Total Allowable Catch/TAC). Potensi lestari (Maximum Sustainable Yield/MSY) sumberdaya perikanan tangkap tahun 2011 untuk nasional diperkirakan 6,4 juta ton per tahun dan untuk Provinsi Sulawesi Selatan dengan potensi 929,7 ribu ton per tahun, sedangkan potensi yang dapat dimanfaatkan (Total Allowable Catch/jumlah tangkapan yang diperbolehkan/JTB) adalah 80 persen dari MSY atau sebesar 5,12 juta ton untuk nasional dan untuk Provinsi sebesar 743.800 ton. Jumlah total hasil tangkapan ikan dari laut adalah penjumlahan dari produksi ikan dari seluruh kabupaten/kota. Jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 80% dari jumlah tangkapan lestari (maximum sustainable yield–MSY). Data MSY ini diperoleh dari Komisi Nasional Pengkajian Ikan. Batasan biologis aman adalah proporsi tangkapan ikan <100%. Manfaat Indikator ini digunakan untuk memantau kelestarian sumberdaya ikan dan kelangsungan usaha penangkapan ikan.

f. Rasio Kawasan Lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial

Luas Kawasan konservasi perairan di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 sebesar 674.119,88 Ha, dan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanan maka pada periode tahun 2018-2023 luas kawasan akan ditargetkan seluas 1.038.859,36 Ha dengan penambahan sebesar 97.648,48 Ha.

Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanan maka pada periode tahun 2015-2019 telah dikelola seluas 92.557,1 Ha pada tahun 2015, dengan melakukan upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan pada tingkat ekosistem, jenis dan genetik termasuk penguatan fungsi otoritas pengelolaan

konservasi sumberdaya ikan maka pada tahun 2016 pengelolaan meningkat menjadi 95,241.0Ha hingga pada tahun 2016 dengan adanya kewenangan pengelolaan yang diatur dalam UU23/2014 sehingga pengelolaan Kawasan konservasi berdasarkan kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai 95.241,0 Ha, tahun 2017 pengelolaan kawasan konservasi sebesar 95.752,1 Ha, pada tahun 2018 pengelolaan Kawasan konservasi sebesar 433.551,94 Ha dan pada tahun 2019 sebesar 674,135.80 Ha.

Tabel. 2.19
Rasio Kawasan Lindung perairan terhadap total luas perairan territorialProvinsi

Bidang/ Urusan	Sat	Tahun					Kenaikan Rata- Rata %
		2015	2016	2017	2018	2019	
Kawasan lindung perairan	Ha	92.557,1	95.241,0	95.752,1	433.551,94	433.574,94	89.1
Total Luas perairan territorial	Ha	43.047.900	43.047.900	43.047.900	43.047.900	43.047.900	-
Rasio Kawasan Lindung perairan terhadap total luas perairan territorial	%	0,22	0,22	0,22	1,01	1,57	89.8

Sumber: Data Olahan Statistik Dinas Kelautan & Perikanan Prov. Sul-Sel 2018

g. Nilai TukarNelayan

Pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan diidentifikasi dengan mengukur Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya (NTN). Nilai tukar digunakan untuk mempertimbangkan seluruh penerimaan (revenue) dan seluruh pengeluaran (expenditure) keluarga nelayan dan pembudidaya ikan. Selain itu, juga digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan secara relatif dan merupakan ukuran kemampuan keluarga nelayan dan pembudidaya ikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan keluarga nelayan dan pembudidaya ikan telah memenuhi kebutuhan keluarganya. Selama periode

2015-2019 rata-rata pendapatan nelayan dan pembudidaya telah mengalami laju pertumbuhan untuk nelayan telah mencapai 22,8% pertahun sedangkan pembudidaya 13,3% pertahun.

Berdasarkan hasil perhitungan BPS, NTN tahun 2014 telah dibagi menjadi dua yaitu Nilai Tukar Nelayan dan Nilai Tukar Pembudidaya, hal ini disebabkan karena Tahun dasar perhitungan NTN telah mengalami perubahan dari tahun dasar 2007 menjadi tahun dasar 2012 sehingga Nilai Tukar NTN Tahun 2013 masih di gabung Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya dengan pencapaian Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya sebesar 111,45 dan Tahun 2014 Nilai Tukar Nelayan sebesar 106,40 dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan sebesar 106,47. Kemudian pada tahun 2015 rata-rata Nilai Tukar Nelayan sebesar 107,1 dan Nilai Tukar Pembudidaya sebesar 102,1 pada tahun 2016 Nilai Tukar Nelayan telah mencapai 103,5 dan Nilai Tukar Pembudidaya sebesar 99,1, hingga tahun 2017 Nilai Tukar Nelayan telah mencapai 107,6 dan Nilai Tukar Pembudidaya sebesar 97,9. Menurunnya angka nilai tukar pembudidaya disebabkan beberapa faktor selain faktor alam, faktor harga pakan dan pupuk yang cukup tinggi sehingga dibutuhkan modal awal yang cukup besar untuk melakukan usaha budidaya.

Tabel. 2.20
Nilai Tukar Nelayan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

Bidang/ Urusan	Sat	Tahun					Kenaikan
		2015	2016	2017	2018	2019	Rata- Rata %
Indeks yang diterima nelayan		128.05	127.14	135.6	140.75	143.07	2.8
Indeks yang dibayar nelayan		119.79	122.86	126.0	130.52	132.94	2.6
Nilai Tukar Nelayan		107.14	102.77	107.6	107.8 3	107.6 2	0.2

Sumber : Data BPS Prov. SulSel

Sedangkan capaian kinerja antara Renstra dan RPJMD periode sebelumnya yaitu :

g. Kontribusi PDRB Perikanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan

Laju pertumbuhann PDRB Sektor Perikanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan dalam 8 tahun terakhir telah mencapai rata-rata 7,814% terlihat pada pencapaian PDRB Perikanan setiap tahun seperti berikut:

Tabel. 2.21
Kontribusi PDRB Perikanan terhadap PDRB Sulsel Tahun 2010-2019

o.	Tahun	Kontribusi PDRB (%)	Nilai PDRB Sulsel (Rp)	Nilai PDRB Perikanan (Rp)
1	2010	8,2	113,7 T	7.71 T
2	2011	7,5	137,4 T	9.09 T
3	2012	8,4	159,4 T	10.94 T
4	2013	6,9	258,7 T	17.91 T
5	2014	7,6	300,1 T	22.83 T
6	2015	7,9	341.7 T	27.33 T
7	2016	8,2	379,2 T	30.95 T
8	2017	8,3	418.9 T	34,9 T
9	2018	8,4	462,3 T	38,8 T
10	2019	8,4	504,8 T	42,5 T

Sumber : Data BPS Prov. Sulsel

h. Produksi dan Nilai Hasil Perikanan

Produksi perikanan Sulawesi Selatan selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu 1,9%, dimana produksi perikanan pada tahun 2015 hanya sebesar 3,786,837.2 ton meningkat sebesar 4,061,326.7 ton pada tahun 2019. Kenaikan produksi perikanan ini didukung dengan produksi perikanan budidaya yang juga mengalami kenaikan sebesar 1,5% dan perikanan tangkap sebesar 6,6%.

Tabel. 2.22
Peningkatan Produksi dan Nilai Hasil Perikanan Tahun 2015-2019

No	Rincian	Tahun					Kenaikan Rata-Rata 2015-2019
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Produksi Perikanan (Ton)	3,786,837.2	3,941,648.8	4,262,554.7	3,935,493.0	4,061,326.7	1.9
	* Perikanan Tangkap	310,290.4	312,380.8	359,770.1	366,540.6	398,565.3	6.6
	* Perikanan Budidaya	3,476,546.8	3,629,268.0	3,902,784.6	3,568,952.3	3,662,761.4	1.5
2	Nilai Produksi (Rp.Trilyun)	15.78	15.60	16.90	21.71	23.48	11.0
	* Perikanan Tangkap	6.60	6.41	5.82	7.98	8.63	8.3
	* Perikanan Budidaya	9.18	9.19	11.08	13.73	14.85	13.2
3	Produksi Komoditi Unggulan (Ton)						
	• RumpuLaut	3,289,907.6	3,409,048.2	3,662,970.4	3,317,524.9	3,406,924.6	1.1
	• Udang	40,346.8	41,686.0	45,342.4	46,524.0	44,520.5	2.6
	• Bandeng	126,226.6	155,761.2	170,135.8	179,254.1	184,186.2	10.2
	• Tuna Cakalang Tongkol	60,706.1	57,273.3	59,075	75,843	66,385.4	3.4
4	Nilai Prod Komoditi Unggulan (Rp.Trilyun)						
	• RumpuLaut	4.49	3.92	5.18	6.95	7.69	16.1
	• Udang	2.41	2.51	2.36	2.56	2.65	2.5
	• Bandeng	1.89	2.34	2.93	3.49	3.69	18.5
	• Tuna Cakalang Tongkol	1.85	1.39	0.97	1.90	1.72	7.8

Kenaikan produksi perikanan didukung pada nilai produksi, dimana kontribusi produksi dari sektor Perikanan Budidaya sebesar 13,2% dan Perikanan Tangkap sebesar 8,3 %.Kenaikan nilai produksi perikanan sangat dipengaruhi oleh nilai produksi rumput laut, dimana kontribusi nilai rumput laut terhadap nilai produksi perikanan budidaya dari tahun ketahun mengalami peningkatan,yaitu tahun 2015 kontribusinya sebesar 48,9%, 2016. Sebesar 42,7%, 2017 sebesar 46,7%, 2018 sebesar 50,6% dan 2019 sebesar 51,8%. Data produksi Rumput Laut perkabupaten kota dapat dilihat pada table 2.23.

Tabel. 2.23
Produksi Rumput Laut per Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan 2015-2019

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Rumput Laut				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Luwu	677,151.7	540,583.0	622,251.11	598,037.33	604,420.76
2	Luwu Utara	179,432.2	183,780.4	190,254.65	196,988.64	206,618.48
3	Wajo	276,468.0	389,626.0	462,479.00	462,474.73	476,055.25
4	Bone	201,853.2	215,601.9	247,178.00	275,627.00	291,686.60
5	Sinjai	19,200.0	30,200.0	40,208.10	40,775.81	47,733.99
6	Bulukumba	158,880.0	159,099.9	168,716.50	178,848.40	177,351.10
7	Selayar	284.9	170.2	333.94	365.50	395.74
8	Bantaeng	85,348.8	82,628.0	83,454.45	84,076.79	84,805.21
9	Jeneponto	138,080.7	149,885.1	150,509.69	193,517.76	165,036.22
10	Takalar	950,390.0	1,034,305.0	996,550.00	538,680.37	466,014.05
11	Makassar	187.0	-	-	-	-
12	Maros	71.0	117.9	124.90	13,240.80	12,475.00
13	Pangkep	185,322.0	208,502.0	280,976.00	314,201.30	445,608.00
14	Barru	788.0	891.6	936.20	959.00	1,114.00
15	Pare-Pare	27.6	-	-	-	-
16	Pinrang	7,104.3	9,398.3	11,055.90	15,448.80	16,266.30
17	Gowa	-	-	-	-	-
18	Luwu Timur	293,159.0	299,968.0	294,406.00	294,897.00	299,067.50
19	Palopo	116,159.2	104,290.9	113,536.04	109,385.91	112,276.43
20	Sidrap	-	-	-	-	-
21	Enrekang	-	-	-	-	-
22	Soppeng	-	-	-	-	-
23	Tana Toraja	-	-	-	-	-
24	Toraja Utara	-	-	-	-	-
Sulawesi Selatan		3,289,907.6	3,409,048.2	3,662,970.5	3,317,525.1	3,406,924.6

Rumput laut jenis *E.Cottoni* SP banyak diproduksi di kabupaten Takalar, Luwu, Wajo, Pangkep, Bulukumba, Bone, Luwu Timur, Jeneponto. Sedangkan rumput laut jenis *Gracilaria* Sp banyak diproduksi di kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Takalar, Wajo, Bone, Sinjai, Palopo. Kemudian jenis *Spinosum* SP banyak diproduksi di Takalar, Sinjai, Bantaeng, dan Jeneponto.

- i. Perkembangan pangsa pasar (industri) produk hasil kelautan dan perikanan

Pasar/Perdagangan luar Negeri Produksi dan Nilai Ekspor Perikanan

Selama periode 2013-2017 telah terjadi peningkatan Volume Ekspor perikanan dengan capaian rata-rata 8,1% dengan NilaiEkspor dengan capaian rata-rata 5,6%, yaitu dari 98.275,9 ton dengan nilai ekspor US\$221 juta pada tahun 2013, menjadi 126.244,8 ton dengan nilai ekspor US\$ 251,8 juta pada tahun 2017.

Tabel. 2.24
Produksi Ekspor dan Kontribusi Ekspor Hasil
Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2015-2019

Bidang/ Urusan	Sat	Tahun					Kenaikan
		2015	2016	2017	2018	2019	Rata-Rata %
Ekspor Perikanan Sulsel	ton	139,602	118,256.3	126,245	130,623.1	166,373.2	5.6
Ekspor Sulsel	ton	830,390	1,087,750	1,266,295.2	2,081,510	2,058,090	27.7
Kontribusi Ekspor Perikanan	%	16.8	10.9	10.0	6.3	8.1	(13.0)

Adapun Komoditi Ekspor Yang Menjadi Primadona Adalah Sebagai Berikut: Komoditi Rumput laut selama Periode 2015-2019 Telah Terjadi Peningkatan Volume Ekspor Rumput Laut Dengan Capaian Rata-Rata 5 % Dengan Peningkatan Nilai Ekspor Rumput Laut Dengan Capaian Rata-Rata13,1%, Yaitu Dari 121,748.4 Ton Dengan Nilai Ekspor US\$ 104,9 Juta Pada Tahun 2015, Menjadi 140,420.1 Ton Dengan Nilai US\$160,3 Juta Pada Tahun 2019. Adapun Negara Tujuan Ekspor Yang Dominan Terutama Ke Cina, Chili, Hongkong, Korea Selatan Dan Vietnam.

Komoditi Udang

Selama Periode 2015-2019 telah terjadi Peningkatan Volume Ekspor Udang Dengan Capaian Rata-Rata 20,8 % Dengan nilai ekspor Udang dengan Capaian rata-rata 7,4 % Pertahun, yaitu dari 4,219.9 ton dengan nilai ekspor US\$54,54 juta pada tahun 2015, menjadi 7,098.1 ton dengan nilai US\$ 63,96 juta pada tahun 2019. Adapun negara tujuan Ekspor yang dominan yaitu Amerika Serikat, Jepang, Vietnam, Belgia dan Belanda.

Komoditi TTC (Tuna, Tongkol, Cakalang)

Selama Periode 2015-2019 telah terjadi Peningkatan Volume Ekspor TTC dengan capaian Rata-Rata 16,6% dengan peningkatan nilai ekspor dengan capaian rata-rata 22,9%, yaitu dari 1.652,5 ton dengan nilai ekspor US\$11,95 juta pada tahun 2015, menjadi 2.915,4 ton dengan nilai US\$27,08 juta pada tahun 2019. Adapun negara tujuan ekspor yang dominan yaitu Amerika Serikat, Jepang, Australia, Thailand.

Komoditi Gurita

Selama Periode 2015-2019 telah terjadi Peningkatan Volume Ekspor Gurita dengan capaian rata-rata 45,1%, dengan peningkatan nilai ekspor dengan capaian rata-rata 63,6% yaitu dari 1,160 ton dengan nilai ekspor US\$5,2 juta pada tahun 2015, menjadi 2,186 ton dengan nilai US\$12,2 juta pada tahun 2019. Adapun negara tujuan ekspor yang dominan yaitu Amerika Serikat, Italia, Rusia, Thailand dan Yunani.

Peningkatan kualitas lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanan

Luas Kawasan konservasi perairan di provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2012 sebesar 674.119,88 Ha. Dalam rangka meningkatkan Kualitas Lingkungan dan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan maka pada periode tahun 2015-2019 telah dikelola seluas 433.574,94 Ha. Adanya Kewenangan Pengelolaan Yang Diatur Dalam UU 23/2014 sehingga Pengelolaan Kawasan konservasi berdasarkan kewenangan provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai 1,022,264.54 Ha tahun 2015, Kemudian tahun 2016 mencapai 1,117,092.35 Ha. Tahun 2017 mencapai 1,117,097,97 Ha, Tahun 2018 mencapai 1,646,465.53 Ha dan pada Tahun 2019 sebesar 1,646,465.53 Ha Sehingga Total Pengelolaan Luas Kawasan Konservasi dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan seluas 6,549,385.92 Ha.

Tabel. 2.25
Luas Kawasan Konservasi Sumberdaya
Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi
Selatan 2015-2019

Bidang/ Urusan	Sat	Tahun					Kenaikan Rata- Rata %
		2015	2016	2017	2018	2019	
Taman Nasional Perairan	Ha	583,841.50	583,841.50	583,841.50	583,841.50	583,841.50	0
Taman Wisata Perairan	Ha	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0
Daerah Perlindungan Laut	Ha	5,170.45	5,682.32	5,682.32	5,682.32	5,682.32	2,5
Kawasan Konservasi Perairan Daerah	Ha	378,252.59	472,982.17	472,982.17	1,001,941.71	1,001,941.71	34,2

Cakupan Luasan Kawasan Konservasi Periaran	Ha	1,022,264.54	1,117,092.35	1,117,097,97	1,646,465.53	1,646,465.53	14,2
--	----	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------

Dalam rangka penurunan karbon maka telah dilakukan upaya rehabilitasi Kawasan mangrove dan padang lamun yang tersebar di beberapa kabupaten/kota yaitu :

Tabel 2.26
Luas Lahan Mangrove di Provinsi Sulawesi Selatan

No	Kabupaten/kota	Luas Lahan Mangrove (Ha)	Kondisi Hutan Mangrove		
			Baik (Ha)	Sedang (Ha)	Rusak (Ha)
SULAWESI SELATAN		39,949,9	8,444.3	11,351.9	20,017.9
1	Selayar	555.0	528.00	24.00	3.00
2	Bulukumba	674.3	312.11		362.22
3	Bantaeng	0.2	0.13	-	0.10
4	Jeneponto	171.5	171.50	-	-
5	Takalar	1,017.5	84.37	881.10	52.00
6	Pangkep	1,626.6	164.60	67.00	1,395.00
7	Barru	379.6	289.64	-	90.00
8	Bone	1,565.8	369.20	870.50	326.10
9	Wajo	458.0	311.00	61.00	86.00
10	Pinrang	54.6	23.70	13.50	17.40
11	Luwu	12,868.0	2,881.00	3,553.00	6,434.00
12	Luwu Utara	11,102.5	2,220.50	1,110.25	7,771.75
13	Palopo	26.5	11.32	6.38	8.80
14	Sinjai	169.1	94.45	65.37	9.23
15	M a r o s	203.3	85.00	10.30	108.00
16	Luwu Timur	8,674.4	512.30	4,699.81	3,462.29
17	Makassar	399.0	381.95	-	17.00
18	Parepare	3.5	3.50	-	-

Sumber Data : Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan

Perkembangan luas lahan mangrove disajikan dalam tabel 1 dibawah ini.

Tabel 2.27
Perkembangan Luas Lahan Mangrove di Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun	Luas lahan (ha)	Kondisi Baik (Ha)	Kondisi Sedang (Ha)	Kondisi Rusak (Ha)
2013	33.240,2	10.711,8	8.769,3	13.759,1
2014	40.223,3	7.469,4	8.941,1	23.812,8
2015	40.223,3	7.469,4	8.941,1	23.812,8
2016	41.065,2	8.901,9	10.551,6	21.116,7
2017	39.949,9	8.444,3	11.351,9	20.017,9
2018	39.952,9	8.444,3	11.354,9	20.014,9
2019	39.967,9	8.444,3	11.369,9	19.999,9

Tabel 2.28

Luas Lahan Padang Lamun di Provinsi Sulawesi Selatan

Kabupaten/kota	Luas Lahan (Ha)	Kondisi Padang Lamun		
		Baik (Ha)	Sedang (Ha)	Rusak (Ha)
SULAWESI SELATAN	18,865.0	16,274.5	560.9	2,029.5
Bulukumba	275.9	219.30	34.12	22.51
Bantaeng	-			
Jeneponto	590.1	590.1	-	-
Takalar	951.0	951.0		
Pangkep	3,857.0	1,721.0	323.0	1,813.0
Barro	190.9	190.9	-	-
Bone	-			
Wajo	32.0	32.0	-	-
Pinrang	69.1	14.5	-	54.6
Luwu	3,668.0	3,668.0	-	-
Luwu Utara	-			
Palopo	1.0	0.5		0.5
Sinjai	1,042.0	811.00	157.00	74.00
M a r o s	-			
Luwu Timur	167.3	55.6	46.8	64.9
Makassar	-	-	-	-
Parepare	0.04	0.040	-	-

Sumber Data : Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan

Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

Pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan diidentifikasi dengan mengukur Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya (NTN). Nilai tukar digunakan untuk mempertimbangkan seluruh penerimaan (revenue) dan seluruh pengeluaran (expenditure) keluarga nelayan dan pembudidaya ikan. Selain itu, juga digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan secara relatif dan merupakan ukuran kemampuan keluarga nelayan dan pembudidaya ikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan keluarga nelayan dan pembudidaya ikan telah memenuhi kebutuhan keluarganya. Selama periode 2008-2012 dan periode 2013-2016 rata-rata pendapatan nelayan dan pembudidaya pada periode 2008-2012 telah mengalami laju pertumbuhan untuk nelayan telah mencapai 43,2% pertahun sedangkan pembudidaya 33,8%. Kemudian pada periode 2015-2019 pendapatan untuk nelayan telah mencapai 8,7 % pertahun sedangkan pembudidaya 11,2% pertahun.

Tabel. 2.29

Nilai Tukar Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah
Provinsi Sulawesi Selatan 2015-2019

Bidang/ Urusan	Sat	Tahun					Kenaikan
		2015	2016	2017	2018	2019	Rata-Rata %
Nilai Tukar Nelayan	%	107.1	103.5	107.6	107.8	107.62	0,2

Nilai Tukar Pembudidaya	%	102.1	99.1	97.9	101.5	104.13	0,5
Kesejahteraan Masyarakat Pesisir	Indeks	104.6	99.3	102.75	104.65	105.87	

Berdasarkan hasil perhitungan BPS, pada tahun 2015 rata-rata Nilai Tukar Nelayan sebesar 107,1 dan Nilai Tukar Pembudidaya sebesar 102,1 pada tahun 2016 Nilai Tukar Nelayan telah mencapai 103,5 dan Nilai Tukar Pembudidaya sebesar 99,1, tahun 2017 Nilai Tukar Nelayan telah mencapai 107,6 dan Nilai Tukar Pembudidaya sebesar 97,9, Tahun 2018 Nilai Tukar Nelayan mencapai 107,8 dan Nilai Tukar Pembudidaya mencapai 101,5 dan di Tahun 2019 Nilai Tukar Nelayan sebesar 107,62 dan Nilai Tukar Pembudidaya sebesar 104,13. Pencapaian indeks kesejahteraan masyarakat pesisir dipengaruhi indeks yang diterima lebih kecil dari pada indeks yang dikeluarkan.

Pengembangan SDM Aparat dan Masyarakat berbasis Gender

Dalam rangka mengefektifkan kinerja pelayanan , Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan beberapa upaya untuk mencapai target sasaran yang diinginkan. Beberapa upaya strategis dilakukan untuk mewujudkan-kannya, salah satunya adalah pengembangan SDM Aparat dan Masyarakat. Berdasarkan data dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhatikan penilaian yang sama dan diberikan pada masyarakat atas kesamaan dan perbedaan antara laki-laki dan perempuan serta atas berbagai peran yang mereka lakukan untuk mewujudkan Pengarusutamaan Gender, maka persentase keterwakilan perempuan terhadap laki-laki untuk memperoleh kesempatan untuk pengembangan SDM dapat dilihat pada tampilan data pada tabel 2.25.

Tabel 2.30
Pengembangan SDM Aparat dan Masyarakat Usaha Perikanan
(Berbasis Gender) dalam Mendukung
Peningkatan Produksi Perikanan sampai tahun 2015-2019

Uraian	Realisasi (%) per Tahun									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Aparat Dinas KP	60,88	39,10	59,97	39,11	70,74	29,26	56,67	43,33	62,69	41,33
Pembudidaya	96,17	3,82	97,56	3,82	98,31	1,69	95,25	4,75	90,15	14,75

Nelayan	97,80	2,80	94,29	2,80	94,24	5,76	95,22	4,78	90,22	14,78
Pengolah dan Pemasar	49,11	50,88	27,86	50,88	41,62	58,38	58,11	41,89	68,11	51,89
Jumlah	303,9 6	37,71	279,6 8	96,60	304,9 1	95,09	305,2 5	94,75	311,1 7	122,7 5
Rasio	1,31		1,42		2,21		2,22		1,53	

Sumber : Data Olahan DKP Prov. Sulsel Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat perkembangan rasio gender yang berperan dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Sesuai data diatas maka dapat diliha kontribusi peran mulai dari aparat hingga pelaku usaha berdasarkan gender. Rasio antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi peningkatan setiap tahunnya .

Tabel 2.31
Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
I	PENYELENGGARAAN PELAYANAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
1	a.	Meningkatnya produksi Kelautan dan Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (1000 ton)	Jumlah Produksi Perikanan	3,349.1	3,517.3	4,145.8	4,906.6	5,117.4	3,786.8	3,941.7	4,262.6	3,935.5	4,061.3	2,18	2,17	2,20	1,97	1,87
				Produksi Perikanan Budidaya (1000 ton)	3,051.0	3,216.2	3,841.7	4,599.5	4,656.9	3,476.5	3,629.3	3,902.8	3,568.9	3,662.8	1,4	1,13	1,02	0,78	0,79
				Produksi Perikanan Tangkap (1000 ton)	298.1	301.1	304.1	307.1	369.4	310.3	312.4	359.8	366.5	398.6	1,04	1,04	1,18	1,19	1,08
2	a.	Meningkatnya Konsumsi Ikan	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg/ Kap/th)		45.2	45.6	46.1	46.5	57.02	49.7	52.5	55.2	56.3	64.7	1,10	1,15	1,20	1,21	1,13
3		Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Jumlah Kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda tahun n		295	303	308	311	314	89	193	78	50	55	0,30	0,64	0,25	0,16	0,18
4		Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	Jumlah produksi ikan kontribusi hasil kelompok nelayan (1000 ton)							93.6	181.1	78.4	173.4	174.6	-	-	-	-	-

Capaian Kinerja Pendanaan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi serta kewenangan yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tidak lepas dari adanya dukungan pembiayaan/ penganggaran. Adapun Sumber pembiayaan yang tertuang didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.32
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -						Realisasi Anggaran pada Tahun ke -						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
PENDAPATAN DAERAH	2,795,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	1,209,025,000	1,818,930,000	2,139,425,000	3,001,917,283	2,428,416,358	2,167,625,412	1,276,687,404	2,239,460,000	2,258,325,000	0,80	0,72	1,05	1,23	1,05	-0,11	-0,02
Pendapatan Asli Daerah	2,795,000,000	2,778,000,000	2,778,000,000	757,025,000	1,818,930,000	2,139,425,000	3,001,917,283	2,428,416,358	2,167,625,412	658,627,404	2,239,460,000	2,258,325,000	0,87	0,78	0,87	1,23	1,05		
- Hasil retribusi daerah	-	50,000,000	50,000,000	100,000,000	-	-	-	44,220,000	78,285,000	272,565,000	-	-	0,88	1,56	2,72	-	-		
- Lain-lain PAD yang Sah	-	172,000,000	172,000,000	352,000,000	-	-	-	169,950,000	285,310,000	345,495,000	-	-	0,98	1,65	0,98	-	-		
Belanja tidak langsung	14,458,386,427	16,846,441,712	16,498,236,542	18,188,149,256	18,158,440,138	18,188,149,265	14,154,921,486	15,656,078,797	16,295,494,117	16,815,795,645	16,645,117,669	21,918,369,701	0,92	0,98	0,92	0,91	1,20	0,02	0,11
Belanja langsung	35,944,485,714	59,716,846,500	57,364,337,664	69,747,742,156	79,687,654,229	58,823,343,000	34,697,833,657	55,203,467,995	53,304,160,317	62,332,854,689	74,228,979,393	54,599,447,772	0,92	0,92	0,89	0,93	0,92	-0,01	-0,003

-	Belanja Pegawai	-	-	-	1,528,950,000	2,292,300,000	-	-	-	-	1,448,225,000	2,215,979,393	-	-	-	0,94	0,96	-		
-	Belanja Barang dan jasa	-	-	-	62,414,948,156	65,310,331,929	47,078,527,120	-	-	-	56,282,950,189	61,169,975,573	43,825,311,092	-	-	0,90	0,93	0,93		
-	Belanja Modal	-	-	-	5,803,844,000	12,085,022,300	11,744,815,880	-	-	-	4,561,679,500	10,834,801,320	10,774,136,680	-	-	0,78	0,89	0,91		
	Total BELANJA DAERAH	53,197,872,141	79,563,288,212	76,862,574,206	89,144,916,412	99,665,024,367	79,150,917,265	51,854,672,426	73,287,963,150	71,767,279,846	80,425,337,738	93,113,557,062	78,776,142,473	0,92	0,93	0,90	0,93	0,99	-0,002	0,02

Tabel 2.33.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sulawesi Selatan

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke -						Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-7	-8	-9	-10	-11	-12
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,462,457,714	5,959,069,100	16,246,336,914	6,141,850,000	9,283,523,500	5,051,891,082	4,322,670,076	5,610,100,115	14,784,73,454	5,213,246,251	9,052,273,658	4,734,809,742
Program Peningkatan Kapasitas dan kinerja SKPD	150,000,000	490,000,000	770,000,000	7,167,261,000	7,104,861,000	3,038,610,700	149,781,000	450,732,300	756,935,250	6,755,502,132	7,391,735,848	2,799,251,546
Program Peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan sistem evaluasi kinerja SKPD	704,060,000	894,500,000	1,235,670,000	1,739,732,772	1,994,117,929	1,460,572,680	701,911,600	893,533,200	1,210,257,035	1,722,451,875	1,954,378,009	1,444,819,661
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	2,312,400,000	2,712,725,000	3,318,725,000	5,423,233,000	14,651,424,000	2,903,000,000	2,306,952,100	2,505,805,380	3,176,773,920	4,690,490,620	14,213,065,640	5,425,082,360
Program pemberdayaan masyarakat pengawasan dan pengendalian	1,226,500,000	980,400,000	1,654,683,000	3,983,693,384	967,775,100	7,531,625,100	963,973,300	1,617,083,540	3,729,457,967	3,729,457,967	9,227,468,732	6,646,785,160
Program pengembangan perikanan budidaya	13,334,165,000	33,227,261,600	20,013,734,750	23,731,874,500	15,562,386,000	13,497,620,385	13,170,453,954	31,614,036,000	19,359,877,403	20,477,918,178	14,857,751,725	13,016,912,128

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke -						Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
Program pengelolaan perikanan tangkap	9,546,648,000	10,649,865,800	9,514,750,000	14,197,935,000	13,062,281,800	20,210,600,601	8,682,112,300	9,367,572,600	8,025,242,300	13,696,161,900	12,812,243,650	18,578,596,075
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	4,208,275,000	4,803,025,000	4,610,438,000	7,362,172,500	3,829,499,000	2,154,383,772	4,180,773,127	3,767,695,100	4,393,217,415	6,047,625,766	4,720,062,131	1,953,191,100
Total	35,944,505,714	59,716,846,500	57,364,337,664	69,747,752,156	66,455,868,329	55,848,304,320	34,478,627,457	55,826,558,235	55,436,534,744	62,332,854,689	74,228,979,393	54,599,447,772

Pendapatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2108, dengan rincian yang disajikan pada tabel 2.12. Pendapatan pada tahun 2013-2018 rata-rata ditargetkan sebesar Rp.2 Milyar dan realisasi pendapatan rata-rata mencapai target Belanja. Untuk tahun 2013-2018, total alokasi belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung dirinci seperti pada table 2.12. Pada tahun 2013 anggaran pembangunan Kelautan dan perikanan sebesar Rp. 51,854,672,426, tahun 2014 sebesar Rp.73,287,963,150, Tahun 2015 Rp. 71,767,279,846, Tahun 2016 Rp.80,425,337,738, Tahun 2017 Rp.93,113,557,062, dan Tahun 2018 Rp.78,776,142,473.

2.4.1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan

Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tantangan dan peluang. Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dan Renstra Kabupaten/Kota, hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi terhadap perencanaan lima tahun kedepan. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan

lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Tabel 2.34
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

Peluang (Opportunities)	Ancaman/Tantangan (Threats)
1. Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 2. Kelembagaan Masyarakat usaha perikanan, SDM dan Pelaku Usaha Perikanan 3. Pemanfaatan SDA sesuai RZWP3K dan RTRW 4. Aspek pasar, permintaan ekspor dan peluang usaha 5. Akses Permodalan dan dukungan pemerintah	1. Produktivitas dan daya saing produksi kelautan dan perikanan masih rendah 2. Menurunnya ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil akibat dampak bencana dan pandemic Covid 19 3. Pemanfaatan SDA yang cukup tinggi 4. Kurangnya informasi Pasar Ekspor dan Domestik 5. Degradasi lingkungan, Gas Rumah Kaca dan penurunan mutu air 6. Hama penyakit dan virus pada perikanan budidaya 7. Penggunaan teknologi sesuai perkembangan zaman

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

2.3. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang telah dilaksanakan menggambarkan layanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang senantiasa menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternal merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak dapat diabaikan. Isu yang diuraikan yaitu keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan memberikan dampak yang signifikan di masa datang dan akan berpengaruh terhadap layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan di masa lima tahun mendatang. Informasi berdasarkan perumusan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tabel.3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Menurunnya ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil akibat dampak pandemic Covid 19	Adanya pembatasan sosial dalam melakukan aktivitas usaha perikanan	Pertumbuhan produksi perikanan terjadi perlambatan
2	Produktivitas dan daya saing produksi kelautan dan perikanan masih rendah	Sarana dan prasarana pendukung masih terbatas	Pengelolaan sumberdaya dan kebutuhan sarana dan prasarana tidak terstruktur

3	Nilai tambah produk olahan dan pemasaran belum optimal dan berdaya saing	Penerapan inovasi dan teknologi pada produk olahan masih terbatas	Penguatan aparatur yang terampil berinovasi dan pembinaan daya saing produk perikanan yang masih rendah
4	Masih lemahnya manajemen pelabuhan perikanan dan TPI sehingga kualitas produksi kurang	Pelayanan pelabuhan perikanan, PPI dan TPI tidak optimal	• Sarana dan prasarana pelabuhan belum Optimal • Pembinaan terhadap nelayan dan petugas pelabuhan belum Optimal
6	Kualitas Kelembagaan Nelayan, Pembudidaya & Pengolah serta Kesenjangan Gender dalam kelembagaan kelompok	Kelompok nelayan masih menggunakan sarana prasarana alat tangkap tradisional dan Masih kurangnya Kelompok nelayan dalam bentuk korporasi	Kualitas SDM nelayan sebagian besar masih relatif rendah
7	Masih maraknya Kegiatan Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing	Kegiatan pengawasan belum optimal	• Kurangnya sarana prasarana dan SDM dalam penegak hukum di laut • Kurangnya regulasi terkait penataan dan pembinaan terhadap pelaku usaha perikanan terhadap kepatuhan kelengkapan dokumen perizinan
8	Marak terjadi pelanggaran dan kerusakan lingkungan pesisir dan laut serta Padat tangkap (Overfishing) di perairan pantai	Pemanfaatan pesisir dan ruang laut belum mengacu pada Dokumen RZWP3K dan rencana alokasi ruang	• Terjadinya konflik kepentingan antar sektor kelautan dan perikanan dengan sektor pertambangan dan pariwisata khususnya di wilayah laut dan pesisir • Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dasar hukum pemanfaatan ruang laut
9	Kebijakan "limited access" belum diterapkan secara menyeluruh.	Degradasi habitat dan ekosistem pesisir dan laut	Kondisi terumbu karang yang persentasinya lebih besar sudah

			dalam keadaan rusak dan Penurunan kuantitas mangrove akibat adanya eksploitasi besar-besaran
10	Mekanisme pengumpulan data perikanan bersifat masif dan belum adanya sistem pengelolaan data yang terintegrasi	Sistem data belum terkoordinasi dengan baik	Sistem pendataan dan informasi perikanan yang belum andal dan masih parsial
	Data yang terintegrasi Penerapan Teknologi untuk budidaya, penangkapan serta pengolahan hasil kelautan dan perikanan yang belum merata	SDM yang masih menerapkan teknologi Lama	Pendampingan dalam penerapan teknologi belum terlaksana dengan baik dan holistik.

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 4 aspek yang menjadi dasar penentuan permasalahan yaitu dari aspek pelayanan perangkat daerah, arahan RPJMD, arahan RTRW dan arahan KLHS. Selanjutnya analisis isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dari faktor-faktor eksternal seperti yang termuat di tabel bawah ini. Selain itu adanya Pandemi COVID19 juga sangat berdampak pada baik itu produksi perikanan tangkap maupun budidaya, serta menghambat pendistribusian hasil kelautan perikanan.

Tabel.3.2
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan

No	Bidang Urusan Dan Indikator KinerjaPenyele nggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<),Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
8	Kelautan Dan Perikanan			
8.1	Produksi perikanan	Belum tercapai (<)	Sarana dan prasarana belum memadai	Peningkatan dan Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana modern serta kemudahan akses usaha
			Kualitas dan mutu produk perikanan baik dari budidaya maupun hasil tangkapan belum optimal	Penerapan CBIB dan Cara Penanganan Ikan baik hasil tangkapan maupun budidaya

			Produksi perikanan tangkap didominasi ikan-ikan pelagis	Restrukturisasi alat tangkap ikan dari alat tangkap ikan pelagis ke alat tangkap ikan demersal
			Kurangnya akses pasar domestik dan ekspor	Penguatan kemitraan dan jaringan pasar, koordinasi lintas sektor
8.2	Konsumsi ikan	Melampaui (>)	Sistem Logistik belum optimal	Peningkatan Sarpras Logistik dan SDM
			Jaminan keamanan mutu ikan	Fasilitasi, pembinaan dan promosi produk
			Sistem pendataan produksi masih masif	Peningkatan Sarana pengolahan data
8.3	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	Melampaui (>)	Belum ada regulasi terkait batasan penangkapan ikan dalam batas biologis yang aman	Melakukan kajian terkait SDI di wilayah Sulsel dan menyusun regulasi terkait penataan jalur penangkapan dan menjaga kelestarian SDI
8.4	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Belum tercapai (<)	Lemahnya pendataan kelompok nelayan dan dukungan anggaran tidak memadai	Melakukan pembinaan dan koordinasi dengan penyuluh kab/kota serta melakukan pendataan ulang
8.5	Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	Belum tercapai (<)	Lemahnya pencatatan secara tertib oleh nelayan yang telah memanfaatkan bantuan	Melakukan pembinaan dan meningkatkan keterampilan nelayan dalam manajemen kelompok
8.6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial	Melampaui (>)	Efektivitas rencana pengelolaan sesuai RZWP3K	Penyusunan dokumen pengelolaan dan rencana aksi disusun setiap tahun dan melakukan koordinasi dengan Cabang dinas
8.6	Nilai tukar nelayan	Belum tercapai (<)	Indeks yang dikeluarkan nelayan cukup tinggi	Subsidi dan sarpras produksi yang lebih efisien dan ekonomis

Masalah utama yang dihadapi Sektor Kelautan dan Perikanan adalah tersedianya bahan baku yang cukup namun tidak ada peningkatan diversifikasi pada produk sehingga kurang bersaing pada pangsa pasar baik domestik maupun ekspor. Kemudian Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan belum optimal karena keterbatasan sarana dan prasarana untuk peningkatan pengelolaan kawasan lindung perairan.

Tabel 3.3
Permasalahan yang relevan dengan Program Kegiatan

No	Permasalahan	Program	Indikator Kinerja	Target				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kualitas dan mutu produk perikanan hasil tangkapan belum optimal, perikanan tangkap didominasi ikan-ikan pelagis, kapal penangkapan ikan masih tradisional dan biaya operasional melaut yang cukup tinggi	Program pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	398.565,2	389.052,4	396.992,3	404.932,2	413.030,8
2	Kurangnya akses pasar domestik dan ekspor, Sistem Logistik belum lancar, kualitas produk olahan masih kurang berdayasaing	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Nilai produksi olahan konsumsi dan non konsumsi (Hilirisasi) (Rp.Milyar)	293,12	298,10	304,96	311,06	317,28
3	Produk yang dijual dalam bentuk raw material namun ukuran, kualitas dan mutu produk perikanan baik dari budidaya belum optimal	Program pengelolaan perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.662.761,4	3.703.829,0	3.898.767,4	4.093.705,8	4.298.391,1
			Persentase ketersediaan benur	90%	100%	100%	100%	100%

			berkualitas					
4	Masih adanya Pelanggaran terkait IUU fishing.	Program Pengawasan SD Kelautan dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	82,4%	86,88%	87,48%	88,73%	89,85%
5	Terjadinya konflik kepentingan antar sektor kelautan dan perikanan dengan sektor pertambangan khususnya di wilayah laut dan pesisir serta Padat tangkap (Overfishing) di perairan pantai	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Cakupan Luas Kawasan Konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (%)	67,28	67,29	67,30	67,31	67,33
			Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Perikanan	23,91%	15,22%	37,50%	68,75%	100%

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Program Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi, Misi dan Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter, dengan Misi yang diamanahkan adalah Misi ke-3 yaitu Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif dan Misi ke-5 yaitu Meningkatkan Produktifitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan. Dalam pencapaian visi, misi dan sasaran di atas tentunya Dinas Kelautan dan Perikanan harus dapat mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi dari tiap aspek kajian, baik itu dari sisi permasalahan berdasarkan pelayanan perangkat daerah, arahan RPJMD, arahan RTRW dan arahan KLHS.

Berdasarkan telaahan terhadap pelayanan perangkat daerah, maka Dinas mengidentifikasi 3 permasalahan utama, yaitu menurunnya produksi, nilai tambah serta akses permodalan, sedangkan berdasarkan arahan RPJMD Perubahan 2018-2023, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah menurunnya pendapatan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil pasca pandemic Covid-19. Untuk telaahan berdasarkan arahan RTRW, maka permasalahan yang dihadapi adalah pembangunan kawasan kelautan dan perikanan yang belum optimal dan belum berpedoman pada arahan tataruang dan zonasi WP3K dan dari sisi arahan KLHS maka permasalahan yang masih dihadapi adalah tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan, proporsi penangkapan ikan dan praktek IUU Fishing. Hasil identifikasi Dinas Kelautan dan Perikanan tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan

yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan dan berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel. 3.3

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap Pencapaian Visi, Misi dan
Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan**

Visi Sulawesi Selatan : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter				
No	Misi dan Program /Sasaran KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif	1. Kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan	Jumlah dan kualitas SDM, Sarpras pendukung operasional yang modern belum optimal	Kebijakan dan dukungan anggaran
2	Misi 5 : Meningkatkan produktifitas dan daya saing produk sumberdaya Alam yang berkelanjutan	1. Produktivitas dan daya saing produksi perikanan masih rendah	Sarana dan prasarana pendukung masih terbatas	Potensi sumberdaya yang cukup besar dan Revitalisasi Sistem Produksi
		2. Pendapatan masyarakat nelayan, pembudidaya dan petambak garam yang masih dibawah standar	Belum menerapkan CBIB, CPIB, Aspek pasar, SDM, Prasarana yang belum memadai	Kebijakan dan dukungan anggaran dan potensi SDA

	Sasaran 5.1: Meningkatkan produksi dan kontribusi sektor perikanan	3. Nilai tambah produk olahan dan pemasaran belum optimal dan berdaya saing	Penerapan inovasi dan teknologi pada produk olahan masih terbatas	Penerapan teknologi serta membangun jejaring bisnis dengan lintas sektor
	Penguatan pada on Mina Farm : Program : • Pengelolaan perikanan tangkap • Pengelolaan Perikanan Budidaya • Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Penguatan pada Hilirisasi: Program : • Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Penguatan pada Pembangunan berkelanjutan Program : • Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan • Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	1. Masih lemahnya manajemen pelabuhan perikanan dan TPI sehingga kualitas produksi kurang 2. Belum meratanya penerapan teknologi untuk budidaya, penangkapan serta pengolahan hasil kelautan dan perikanan 3. Kualitas Kelembagaan Nelayan, Pembudidaya & Pengolah serta Kesenjangan Gender dalam kelembagaan kelompok 4. Sebagian besar operasional usaha perikanan skala kecil 5. Nelayan bergantung pada Ponggawa Sawi 6. Masih maraknya Kegiatan Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing 7. Terjadinya konflik kepentingan antar sektor kelautan dan perikanan dengan sektor pertambangan	1. Sarana dan prasarana pelabuhan belum Optimal 2. Penerapan teknologi pada sector kelautan perikanan terbatas dikarenakan SDM baik itu pembudidaya, nelayan maupun pengolah pemasar masih belum bisa mengoptimalkan teknologi 3. Kelompok nelayan, Pembudidaya & Pengolah masih menggunakan sarana prasarana alat tangkap tradisional dan masih kurangnya Kelompok nelayan dalam bentuk korporasi 4. Kurangnya informasi akses perbankan 5. Kegiatan pengawasan belum optimal, penertiban	1. Kerja sama dengan lintas sektor dan stakeholder terkait 2. Peningkatan kualitas SDM pada sektor kelautan dan perikanan 3. Regulasi, Kebijakan, dan dukungan anggaran 4. Memanfaatkan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan dalam akses permodalan pada perbankan 5. Penyusunan RAD terkait

		terutama di wilayah laut dan pesisir serta Padat tangkap (Overfishing) di perairan pantai 8. Kondisi terumbu karang yang persentasinya lebih besar sudah dalam keadaan rusak dan Penurunan kuantitas mangrove dan padang lamun akibat adanya eksploitasi besar-besaran	Dokumen kapal dan usaha perikanan lainnya, SDM pengawas masih kurang, sarpras pengawasan belum optimal 6. Zona pemanfaatan ruang yang berada di laut dan pesisir belum maksimal dipedomani 7. Degradasi habitat dan ekosistem pesisir dan laut 8. Penguatan dan pengelolaan kelembagaan konservasi serta rehabilitasi ekosistem pesisir belum optimal	pengelolaan dan pemanfaatan pesisir dengan mengacu pada Dokumen RZWP3K
--	--	--	---	---

b. Telaahan Renstra K/L

Analisis Renstra K/L dan SKPD Provinsi ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mengetahui sejauhmana tingkat capaian kinerja Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan berkontribusi pada sasaran Renstra K/L atau rata-rata Kabupaten/Kota maka dapat disampaikan bahwa rata-rata pencapaian kinerja Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan telah bersinergi baik secara nasional dan regional. Namun berdasarkan hasil review terhadap Renstra K/L tahun rencana ditujukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.

Upaya yang harus ditempuh adalah mensinergikan upaya penyelesaian permasalahan yang ada, baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/kota.

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome/impact) dari satu atau beberapa program. Indikator Kinerja Sasaran Strategis KKP adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Sasaran Strategis Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 – 2024

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		2019 (realisasi)	2020	2021	2022	2023	2024
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE							
SS 1. Masyarakat KP yang meningkat kesejahteraannya							
1	Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP		59,16	60,31	61,47	62,66	63,87
CUSTOMERS PERSPECTIVE							
SS 2. Ekonomi sektor KP yang meningkat							
2	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	5,81	7,9	8,11	8,31	8,51	8,71
3	Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)	4,93	6,17	6,43	6,86	7,27	7,55
4	Konsumsi ikan (kg/kap/thn)	54,49	56,39	58,08	59,53	61,02	62,05
SS 3. Sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan							
5	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman pada tahun 2024 (%)	-	≤53,7%				≤80%
6	Luas kawasan konservasi perairan (juta ha)	23,14	23,4	24,1	25,1	26	26,9
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE							
SS 4. Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat							
7	Lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap dunia usaha dan dunia industri / DUDI (org)	-	17.175	17.696	18.296	18.916	19.546
SS 5. Hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan							
8	Hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan (hasil	-	5				15

	riset)						
SS 6. Tatakelola SDKP yang bertanggung jawab							
9	WPP yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola (WPP)	-	3	5	7	11	11
10	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (RZ)	-	24				102
SS 7. Industrialisasi KP yang berdaya saing							
11	Produksi perikanan	23,86	26,46	27,86	29,39	30,98	32,72
12	Produksi garam rakyat	2,85	3	3,1	3,2	3,3	3,4
SS 8. Industrialisasi KP yang berdaya saing							
13	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing	-	54,18	60	65	70	75
14	Persentase Kepatuhan (<i>compliance</i>) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	93,57	89	90	91	92	93
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE							
SS 9. Tatakelola pemerintahan yang baik							
15	Nilaikinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP	78,60	85	85	85	85	85

Tahun 2019 Sulawesi Selatan berkontribusi terhadap capaian produksi hasil kelautan dan perikanan sebesar 17, 01 % yaitu sebesar 4,06 juta ton yang terdiri atas produksi perikanan tangkap dan budidaya sedangkan untuk garam hanya mampu berkontribusi sebesar 4,9% yaitu sebesar 140 ribu ton. Adapun Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan garam adalah terbatasnya sarana dan prasarana produksi serta penerapan inovasi teknologi untuk dapat memproduksi setiap bulan. Kemudian untuk pengembangan pelabuhan perikanan pada tahun 2019 sebanyak 19 unit PPI. Permasalahan yang dihadapi untuk pelabuhan perikanan yaitu pemanfaatan pelabuhan perikanan yang ada belum optimal disebabkan sarana dan prasarana belum memadai untuk pelabuhan perikanan Higienis.

Dalam RPJMN 2020-2024 terdapat empat major project terkait dengan pembangunan bidang kelautan dan perikanan yaitu:

1. Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan
2. Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng

3. Integrasi Pelabuhan Perikanan dan
4. Pasar Ikan (Fish Market) Bertaraf Internasional

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Dibandingkan dengan struktur dan pola eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan dalam lima tahun mendatang. Sehingga rancangan program beserta targetnya dapat disusun sesuai dengan RTRW tersebut.

Tabel 3.5

Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengembangan kawasan produksi	Sentra Produksi	Hilirisasi dan peningkatan Produksi	Peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah	Sentra Produksi BD Payau : Kabupaten Pinrang, Barru, Pangkep, Bone, Luwu Timur, Jeneponto, Takalar, Bulukumba, Wajo Sentra Produksi BD Laut : Takalar, Jeneponto Bantaeng, Sinjai, Pinrang, Barru, Pangkep, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Selayar, Palopo Sentra Produksi BD Air Tawar : Enrekang, Sidrap, Tator, Torut, Soppeng Sentra Produksi Penangkapan Ikan : Sinjai, Bulukumba, Takalar, Bone, Palopo, Selayar
2	Pengembangan kawasan Hilirisasi	Pusat pertumbuhan	Hilirisasi	pertumbuhan ekonomi daerah	Makassar, Maros, Bantaeng
3	Pengembangan Kawasan Industri	Hinterland dan pemasaran (Outlet)	Hilirisasi, Penerapan Mutu, Pengembangan Usaha dan Daya Saing	pertumbuhan ekonomi daerah	Makassar, Maros
4	Pengembangan Kawasan Konservasi	Zonasi Wilayah Pesisir dan P3K	Pengawasan, Konservasi, Penataan Dan Rehabilitasi Pesisir Dan Laut	Keberlanjutan dan kelestarian lingkungan	Luwu Utara, Selayar, Pangkep, Makassar, Barru
5	Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus	Kawasan Strategis		pertumbuhan ekonomi daerah	Kepulauan Selayar

Dalam rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis terlihat bahwa pola penggunaan dan pemanfaatan kawasan dititik beratkan pada konsep agribisnis perikanan yang terdiri dari sub-sistem agribisnis hulu (up-streem agribusiness) berupa ragam kegiatan industri dan perdagangan sarana produksi perikanan, sub-sistem budidaya/penangkapan (on-farm agribusiness) yang menghasilkan komoditas perikanan, sub-sistem agribisnis hilir (downstream agribusiness) berupa ragam kegiatan industri pengolahan hasil perikanan dan pemasaran, dan sub-sistem jasa penunjang (supporting institution) yang mendukung pengembangan semua sub-sistem, meliputi : perbankan, transportasi, penelitian dan pengembangan, kebijakan pemerintah, penyuluhan, dan lain-lain. Semua sub-sistem berada dalam simpul keterkaitan fungsional yang saling mendukung dalam eksistensi sistem yang terpadu dalam berakselerasi mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Struktur tata ruang menentukan kualitas interkoneksi antar simpul-simpul wilayah dalam kawasan, sekaligus merupakan suatu komunitas yang utuh yang memungkinkan sebuah kawasan berartikulasi secara optimal terhadap dinamika lingkungan eksternalnya. Untuk mengintegrasikan titik-titik ruang, maka dibuat struktur ruang berdasarkan fungsinya masing-masing. Secara garis besar, rencana struktur ruang, Peran kawasan terkait dengan rencana tata ruang bagi pengembangan perekonomian, Pengembangan daya tarik kawasan (dukungan regulasi dan kemudahan investasi).

Rencana Struktur Tata Ruang menentukan interkoneksi antar simpul-simpul wilayah dalam kawasan, secara garis besar rencana struktur ruang kawasan minapolitan dikabupaten/kota terdiri atas : Pusat satuan kawasan perikanan, pusat distrik minapolitan (pusat pertumbuhan), kota minapolis (Sentra produksi), wilayah-wilayah hinterland, dan kota pemasaran (outlet). Mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029, Rencana pengembangan kawasan strategis nasional dan kawasan budidaya nasional dengan sektor unggulan Perikanan meliputi :

1. Kawasan Andalan Darat

- Kawasan andalan Mamminasata dan sekitarnya
- Kawasan andalan Palopo dan sekitarnya

- Kawasan andalan Bulukumba-Watampone dan sekitarnya
- Kawasan andalan Pare-pare dan sekitarnya

2. Kawasan Andalan Darat

- Kawasan andalan Laut Kapoposan dan sekitarnya
- Kawasan andalan Laut Teluk Bone dan sekitarnya
- Kawasan andalan Laut Singkarang – Takabonerate dan sekitarnya
- Kawasan andalan Laut Selat Makassar dan sekitarnya

3. Kawasan potensial yang merupakan Kawasan Strategis Provinsi (KSP)

Dimanfaatkan untuk budidaya unggulan meliputi

- Kawasan potensial budidaya Rumput Laut meliputi wilayah perairan pantai dan tambak di masing-masing kabupaten : Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone, Luwu, Palopo, Luwu Utara, dan Luwu Timur.
- Kawasan potensial budidaya udang bandeng meliputi tambak-tambak di masing-masing kabupaten : Pinrang, Barru, Pangkep, Bone dan Wajo
- Kawasan potensial perikanan tangkap meliputi Selat Makassar, Laut Flores dan Teluk Bone

4. Kawasan Wisata Bahari yang merupakan Kawasan Strategis Provinsi (KSP)

- Kawasan wisata bahari Mamminasata dan sekitarnya (kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Pangkep)
- Kawasan Wisata bahari Takabonerate (Kabupaten Kepulauan Selayar)

5. Indikasi Arah Peraturan Zonasi untuk Pola Ruang

Peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau disusun dengan memperhatikan :

- Pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan wisata alam
- Ketentuan pelarangan pemanfaatan kayu bakar; dan

- Ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah mengurangi luas dan atau mencemari ekosistem bakau dan ekosistem lainnya seperti rawa pasang surut dan padang lamun.

Peraturan zonasi untuk taman nasional dan taman nasional laut disusun dengan memperhatikan :

- Pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam
- Pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat
- Ketentuan pelarangan kegiatan budidaya di zona inti
- Ketentuan pelarangan kegiatan budidaya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau terumbu karang di zona penyangga.

Peraturan zonasi untuk terumbu karang disusun dengan memperhatikan

- Pemanfaatan untuk pariwisata bahari
- Ketentuan pelarangan kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan terumbu karang
- Ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf b yang dapat menimbulkan pencemaran air

6. Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Kawasan Budidaya

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan perikanan disusun dengan memperhatikan :

- Pemanfaatan ruang untuk pemukiman pembudidaya dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah
- Pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan atau kawasan hijau
- Pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari.

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan industri disusun dengan memperhatikan :

- Pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia di wilayah sekitarnya
- Pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukkan industri

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki sumber daya pesisir yang cukup potensial dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah. Berbagai potensi tersebut seperti perikanan, pariwisata, perhotelan, kepelabuhanan, dan industri pesisir. Mengingat potensi yang besar tersebut, maka dalam pengelolaannya perlu dilakukan secara terpadu (Integrated Coastal Management) dengan melibatkan semua stakeholder terkait. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir belum dilaksanakan secara optimal.

Wilayah pesisir Sulsel telah membentuk budaya tradisional masyarakat yang telah berlangsung terus-menerus selama bertahun-tahun dengan mengelola sumber-daya pesisir yang mencakup berbagai jenis ikan dan kerang-kerangan sebagai sumber protein hewani, mangrove, terumbu karang, padang lamun dan estuaria.

Potensi sumber daya pesisir tersebut telah mengalami degradasi ekosistem terutama populasi ikan dan biota lainnya yang cukup terdapat didalamnya sebagai akibat dari dampak laju pertumbuhan penduduk, kegiatan pembangunan fisik, peningkatan sampah organik dan anorganik serta kegiatan-kegiatan illegal dalam industri perikanan, pertambangan, dan pembalakan.

Peningkatan konsumsi dan pemanfaatan sumberdaya pesisir yang berlebihan, tanpa mempertimbangkan aspek pelestarian lingkungannya, akan semakin menurunkan daya lingkungan dan nilai serta keberadaan potensi sumberdaya pesisir, sehingga mengancam potensi ekonomi dan sosial budaya yang terkandung didalamnya. Hal ini tentunya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan, karena sebagian masyarakat lokal yang berdomisili di

wilayah pesisir di Sulsel bermata pencaharian sebagai nelayan yang menggantungkan kehidupannya pada sumberdaya pesisir, khususnya kegiatan perikanan sebagai sumber pendapatan utamanya.

Faktor pendorong yang diperkirakan akan mempengaruhi kecenderungan masa depan :

- Meningkatnya degradasi ekosistem sumberdaya alam diwilayah pesisir termasuk laju degradasi mangrove semakin hari meningkat seiring dengan meningkatnya eksploitasi terutama alih fungsi (konversi) untuk tujuan lain seperti tambak dan pemukiman
- Penangkapan ikan
- Pencemaran laut

Perkiraan dampak negatif dan positif faktor pendorong terhadap kecendrungan masa depan dimana saat ini ekosistem dominan diwilayah pesisir Sulawesi Selatan seperti:

1. Ekosistem mangrove, rawa pasang surut, padang lamun dan terumbu karang sedang mengalami kerusakan yang sangat berat.
2. Dari total kerusakan terumbu karang sebesar 42% (29 % rusak berat, 23% rusak sedang) dan hanya 6% yang sangat baik.
3. Pada umumnya kerusakan tersebut hancur akibat masih maraknya kegiatan illegal fishing dan pola penangkapan Ikan yang tidak ramah lingkungan yang dilakukan para nelayan untuk menangkap ikan sehingga sejumlah habitat lainnya yang berada disekitar kawasan lokasi penangkapan ikanpun ikut rusak.
4. Masih terdapat terumbu karang yang dapat diselamatkan hal tersebut disebabkan karena lokasinya berada daerah pesisir yang dilindungi pemerintah sehingga akses masyarakat terbatas pada lokasi – lokasi tersebut.
5. Laju degradasi mangrove semakin hari semakin meningkat seiring dengan maraknya eksploitasi terutama alih fungsi (konversi) untuk tujuan lain seperti tambak dan pemukiman. Jumlah total hutan mangrove seluas 22.35 ha, diperkirakan 40% yang telah mengalami gangguan dan dalam proses dijadikan tambak. Hutan mangrove tersebut tersebar di 18 kab/ kota.

6. Kerusakan memanjang dari wilayah pesisir pantai barat yang mencakup kabupaten Pangkep, Maros, Takalar hingga kewilayah pantai timur, mulai dari Kabupaten Sinjai hingga daerah Luwu.

Ketika hutan mangrove rusak, maka ekosistem disekitarnya juga akan rusak dan bahkan pengaruhnya bisa berakibat luas yaitu terjadi kepunahan ekosistem. Bila pemerintah setempat melakukan pembiaran dikhawatirkan keberlangsungan ekosistem laut akan punah dan kerusakan habitat laut lainnya dan diyakini akan berdampak pada kehidupan disekitarnya khususnya para nelayan. Hal ini tentunya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan nelayan sebagai masyarakat lokal yang berdomisili di wilayah pesisir di Sulawesi Selatan yang bermata pencaharian sebagai nelayan yang menggantungkan kehidupannya pada sumberdaya pesisir khususnya kegiatan perikanan sebagai sumber pendapatan utamanya dimana 80% masyarakat pesisir adalah masyarakat miskin dengan tingkat pendidikan rendah. Disisi lain dengan semakin berkurangnya populasi ikan dikawasan pesisir mengakibatkan hasil tangkapan nelayan pun semakin berkurang dan membuat nelayan terpaksa mencari ikan pada jarak yang semakin jauh melewati wilayah laut. Semakin bertambah besar-nya biaya operasional para nelayan dikhawatirkan kondisi tersebut dapat mengakibatkan konflik antar nelayan yang saling memperebutkan lokasi penangkapan ikan. Dengan demikian diperlukan perhatian lebih dari pemerintah untuk mengatur dan mengelola wilayah pesisir ini agar nelayan menangkap ikan tanpa merusak ekosistem lainnya dan terlibat konflik sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya dengan mencoba sumber mata pencaharian baru seperti pengembangan rumput laut dll.

Situasi terburuk yang diperkirakan akan terjadi jika semakin meningkatnya kegiatan illegal fishing dan pola penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dikhawatirkan ketergantungan ekosistem laut akan punah dan kerusakan habitat laut pun diyakini akan berdampak pada kehidupan disekitarnya khususnya pada nelayan. Situasi terburuk yang diperkirakan akan terjadi jika semakin meningkatnya laju degradasi mangrove dikhawatirkan akan berdampak pada rusaknya ekosistem pesisir, hilangnya habitat satwa daratan

dan lautan, hilangnya pulau, kematian dari berbagai jenis satwa dan flora serta dampak-dampak lingkungan lainnya seperti abrasi, intrusi, banjir dan kematian organisme perairan serta mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir.

- **Telaahan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Provinsi Sulawesi selatan**

Pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil diatur dalam RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan 2019-2039 sesuai perda No 2 tahun 2019. Adapun ruang lingkup RZWP3K terdiri atas Tujuan, kebijakan dan strategi pengelolaan WP3K, Alokasi Ruang, arahan pemanfaatan ruang, Pulau-pulau kecil, Mitigasi bencana, Pengendalian dan Pengawasan. Batas wilayah perencanaan RZWP3K meliputi :

- a. Kearah Darat mencakup batas wilayah adminidstrasi kecamatan di wilayah pesisir
- b. Kearah Laut sejauh 12 Mil Laut diukur dari garis pantai padda saat pasang tertinggi kearah laut lepas dan /atau ke perairan kepulauan
- c. Pengaturan wilayah pesisir sesuai dengan ketentuan dalam RTRW

Pulau – Pulau kecil provinsi dalam batas wilayah perencanaan RZWP3K berjumlah 332 Pulau meliputi :

1. Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari 131 (seratus tiga puluh satu) pulau;
2. Kabupaten Bulukumba terdiri dari 5 (lima) pulau;
3. Kabupaten Jeneponto terdiri dari 1 (satu) pulau;
4. Kabupaten Takalar terdiri dari 9 (sembilan) pulau;
5. Kabupaten Sinjai terdiri dari 10 (sepuluh) pulau;
6. Kabupaten Bone terdiri dari 2 (dua) pulau;
7. Kabupaten Pangkajene Kepulauan terdiri dari 140 (seratus empat puluh) pulau;
8. Kabupaten Barru terdiri dari 9 (sembilan) pulau;
9. Kabupaten Pinrang terdiri dari 4 (empat) pulau;
10. Kabupaten Luwu Timur terdiri dari 4 (empat) pulau;

11. Kabupaten Luwu Utara terdiri dari 1 (satu) pulau;
12. Kota Makassar terdiri dari 14 (empat belas) pulau;
13. Kota Palopo terdiri dari 1 (satu) pulau; dan
14. Sulawesi Selatan terdiri atas 1 (satu) pulau.

Garis pantai sepanjang $\pm 1.993,7$ km (kurang lebih seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga koma tujuh kilometer). Luas wilayah lautan $\pm 94.399,85$ Km² (kurang lebih sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan koma delapan puluh lima kilometer persegi), yang meliputi 4 (empat) kawasan laut yaitu Selat Makassar, Laut Flores, Laut Jawa, dan Teluk Bone.

Pengelolaan WP-3-K Provinsi bertujuan untuk:

1. Perlindungan lingkungan, yakni pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan melalui pendekatan kemandirian lokal;
2. Pembangunan sosial ekonomi, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing ekonomi wilayah dengan tidak mengganggu fungsi konservasi setempat;
3. Pemberdayaan masyarakat, yakni peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya serta mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim; dan
4. Penataan kelembagaan dan penegakan hukum, yakni penataan wilayah, sinergi antar sektor dan pembangunan wibawa dan budaya sadar hukum.

Kebijakan pengelolaan WP-3-K Provinsi, Meliputi:

- a. Kebijakan perlindungan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
 1. Mewujudkan pengendalian laju kerusakan ekosistem di bawah tingkat kemampuan pemulihannya;
 2. Mewujudkan peningkatan kelestarian dan penanganan dampak lingkungan;

3. Mewujudkan peningkatan konservasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan lahan kritis lainnya;
 4. Memelihara dan mengembangkan konservasi WP-3-K; dan
 5. Mengurangi tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan di kawasan pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- b. Kebijakan pembangunan sosial, meliputi:
1. Mewujudkan peningkatan kualitas dan kesehatan sumber daya manusia;
 2. Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana di WP-3-K;
 3. Mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana transportasi laut untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonomi masyarakat pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 4. Mewujudkan pengembangan mata pencaharian alternatif di WP-3-K;
 5. Mewujudkan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir dan Pulau-pulau Kecil melalui peningkatan produksi perikanan;
 6. Mewujudkan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir dan Pulau-pulau Kecil melalui peningkatan daya saing dan diversifikasi produk perikanan kelautan;
 7. Mewujudkan pengembangan dan penguatan sistem produksi hulu hilir dalam peningkatan ekonomi berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan;
 8. Mewujudkan pengembangan daya tarik objek dan daerah tujuan wisata bahari;
 9. Mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat pesisir dan Pulau-pulau Kecil melalui pengembangan wisata bahari;
 10. Mewujudkan pembangunan sistem tata-niaga hasil perikanan yang berkeadilan; dan
 11. Mewujudkan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir dan Pulau-pulau Kecil melalui kemudahan

dalam mengakses lembaga perbankan dan informasi pasar.

- c. Kebijakan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 - 1. Mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan Pulau-pulau Kecil secara optimal;
 - 2. Mewujudkan pengelolaan pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang tanggap terhadap bencana; dan
 - 3. Mewujudkan pengelolaan pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang mengantisipasi perubahan iklim.
- d. Kebijakan penataan kelembagaan dan penegakan hukum, meliputi:
 - 1. Mewujudkan pengendalian kegiatan reklamasi pantai untuk mencegah kerusakan lingkungan di kawasan pesisir;
 - 2. Mewujudkan peningkatan penataan dan penegakan hukum;
 - 3. Mewujudkan penataan ruang WP-3-K yang terintegrasi antar wilayah, sektor maupun pemangku kepentingan; dan
 - 4. Mewujudkan pengembangan sistem informasi terpadu.

Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan pengendalian laju kerusakan ekosistem di bawah tingkat kemampuan pemulihannya terdiri atas:

- 1. Peningkatan kelestarian dan penanganan dampak lingkungan; dan
- 2. Peningkatan konservasi dan rehabilitasi hutan mangrove dan lahan kritis.

Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan peningkatan kelestarian dan penanganan dampak lingkungan terdiri atas:

- 1. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian ekosistem WP-3-K; dan
- 2. Peningkatan pengetahuan konservasi ekosistem WP-3-K dalam kurikulum lokal pendidikan formal.

Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan peningkatan konservasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan lahan kritis lainnya terdiri atas:

- 1. Peningkatan rehabilitasi kawasan yang terdegradasi berat/kritis;

2. Peningkatan sistem monitoring, controlling dan surveillance berbasis masyarakat;
3. Peningkatan status Kawasan Konservasi ekosistem WP-3-K; dan
4. Peningkatan dan pengembangan model konservasi berbasis masyarakat.

Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan pemeliharaan dan pengembangan konservasi WP-3-K terdiri atas:

1. Peningkatan konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan ekosistem melalui pengelolaan Kawasan Konservasi WP-3-K; dan
2. Peningkatan dan pengembangan perlindungan biota laut langka.

Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan pengurangan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan di kawasan pesisir dan Pulau-pulau Kecil terdiri atas:

1. Peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam pengawasan dan pengelolaan WP-3-K; dan
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen pengelolaan lingkungan di setiap kegiatan pemanfaatan WP-3-K.

Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan peningkatan kualitas dan kesehatan sumber daya manusia terdiri atas:

1. Peningkatan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan pengelolaan WP-3-K; dan
2. Peningkatan pengembangan sarana dan prasarana kesehatan serta peningkatan program penyuluhan kesehatan masyarakat dan sanitasi lingkungan.

Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana di WP-3-K terdiri atas:

1. Peningkatan prioritas pembangunan sarana dan prasarana di WP-3-K; dan
2. Peningkatan pelibatan masyarakat dalam pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana yang terbangun di WP-3-K.

Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana transportasi laut untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonomi masyarakat pesisir dan Pulau- pulau Kecil terdiri atas:

1. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi laut di WP-3-K;
2. Peningkatan pengembangan sarana dan prasarana transportasi laut yang telah ada di WP-3-K;
3. Peningkatan kerjasama swasta dan masyarakat dalam memelihara sarana dan prasarana transportasi laut; dan
4. Peningkatan konektivitas antara transportasi darat, laut maupun udara di wilayah pesisir.

Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan pengembangan mata pencaharian alternatif di WP-3-K terdiri atas:

1. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat pesisir dan Pulau-pulau Kecil; dan
2. Peningkatan penciptaan mata pencaharian alternatif.

Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir dan Pulau-pulau Kecil melalui peningkatan produksi perikanan terdiri atas:

1. Peningkatan produksi dan nilai produk perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
2. Peningkatan pengembangan sistem jaringan distribusi komoditas strategis; dan
3. Peningkatan intensifikasi sistem perikanan budidaya dan teknologi perikanan tangkap.

Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir dan Pulau-pulau Kecil melalui peningkatan daya saing dan diversifikasi produk perikanan kelautan terdiri atas:

1. Peningkatan pengembangan sistem pengolahan ikan yang higienis;
2. Peningkatan kualitas produk perikanan;

3. Peningkatan manajemen mutu terpadu unit pengelolaan hasil perikanan;
4. Peningkatan pembinaan usaha kelompok masyarakat perikanan; dan
5. Peningkatan penumbuhan wirausaha baru.

Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan pengembangan dan penguatan sistem produksi hulu hilir dalam peningkatan ekonomi berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan terdiri atas:

1. Peningkatan pengembangan iklim pendukung investasi di WP-3-K;
2. Peningkatan pengembangan sistem jaringan distribusi komoditi strategis;
3. Peningkatan penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi pedesaan; dan
4. Peningkatan produksi perikanan.

Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan pengembangan daya tarik objek dan daerah tujuan wisata bahari terdiri atas:

1. Peningkatan pengembangan obyek wisata unggulan dan promosi wisata;
2. Peningkatan pengembangan manajemen wisata;
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata bahari; dan
4. Peningkatan produk domestik regional bruto daerah melalui sektor wisata.

Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat pesisir dan Pulau-pulau Kecil melalui pengembangan wisata bahari terdiri atas:

1. Peningkatan dan perluasan kerjasama antara pemangku kepentingan wisata bahari; dan
2. Peningkatan pengembang sarana dan prasarana wisata bahari.

Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan pembangunan sistem tata-niaga hasil perikanan yang berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 10 terdiri atas:

1. Peningkatan pengembangan jaringan informasi dan komunikasi;
2. Peningkatan pengembangan sistem tataniaga yang efisien; dan
3. Peningkatan penguatan kapasitas kelembagaan ekonomipesisir.

Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir dan Pulau-pulau Kecil melalui kemudahan dalam mengakses lembaga perbankan dan informasi pasar terdiri atas:

1. Peningkatan inventarisasi dan pengelompokan jenis usaha;
2. Peningkatan penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi di WP-3-k;
3. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap modal usaha; dan
4. Peningkatan penguatan permodalan dan manajerial usaha kecil menengah bukan bank perkreditan rakyat serta koperasi.

Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan Pulau-pulau Kecil secara optimal sebagaimana terdiri atas:

1. Peningkatan pengembangan pola kemitraan antar pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan program di WP-3-K;
2. Peningkatan pemberian wewenang yang lebih luas bagi lembaga lokal untuk berpartisipasi dalam pengelolaan WP-3-K; dan
3. Peningkatan Kearifan Lokal sebagai pedoman pemanfaatan sumber daya pesisir dan penguatan kelembagaan lokal dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan pengelolaan pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang tanggap terhadap bencana terdiri atas:

1. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana sesuai dengan kebutuhan wilayah dan kemampuan lokal; dan
2. Peningkatan pelatihan mitigasi bencana, resiko bencana dan

ketahanan terhadap bencana kepada masyarakat dengan memanfaatkan sistem mitigasi yang telah dibangun.

Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan pengelolaan pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang mengantisipasi perubahan iklim terdiri atas:

1. Peningkatan sosialisasi dampak perubahan iklim terhadap kehidupan masyarakat pesisir dan Pulau-pulau Kecil; dan
2. Peningkatan antisipasi perubahan iklim.

Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan pengendalian kegiatan Reklamasi pantai untuk mencegah kerusakan lingkungan di kawasan terdiri atas:

1. Peningkatan sosialisasi pengendalian kegiatan Reklamasi pantai;
2. Peningkatan pemberian sanksi yang tegas kepada kegiatan Reklamasi yang merusak lingkungan; dan
3. Peningkatan penuntutan kompensasi dari pengelola/pengembang perusak pantai.

Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan peningkatan penataan dan penegakan hukum terdiri atas:

1. Peningkatan penegakan hukum dan norma sosial;
2. Peningkatan pelibatan masyarakat dalam proses pembentukan produk hukum;
3. Peningkatan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat; dan
4. Peningkatan pemeliharaan ketertiban dan keamanan.

Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan penataan ruang WP-3-K yang terintegrasi antar wilayah, sektor maupun pemangku kepentingan terdiri atas:

1. Peningkatan optimalisasi peran dan fungsi Pemerintah Daerah dan lembaga terkait dalam pengelolaan WP-3-K secara terpadu dan berkelanjutan; dan
2. Peningkatan penerapan RTRW Provinsi dan/atau RTRW

Kabupaten/Kota dan RZWP-3-K sebagai basis perizinan di WP-3-K.

Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan pengembangan sistem informasi terpadu terdiri atas:

1. Peningkatan pengembangan basis data dan jaringan informasi wisata bahari; dan
2. Peningkatan pengembangan pusat informasi wisata bahari.

Alokasi Ruang WP-3-K, meliputi:

1. Kawasan Pemanfaatan Umum yang selanjutnya disingkat KPU;
2. Kawasan Konservasi yang selanjutnya disingkat KK; dan
3. Alur Laut yang selanjutnya disingkat AL.

Selain Alokasi Ruang, sebagian perairan provinsi dialokasikan KSN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi Ruang untuk KPU terdiri atas:

1. Zona pariwisata yang selanjutnya disebut KPU-W;
2. Zona permukiman yang selanjutnya disebut KPU-PM;
3. Zona pelabuhan yang selanjutnya disebut KPU-PL;
4. Zona hutan mangrove yang selanjutnya disebut KPU-M;
5. Zona pertambangan yang selanjutnya disebut KPU-TB;
6. Zona perikanan tangkap yang selanjutnya disebut KPU-PT;
7. Zona perikanan budidaya yang selanjutnya disebut KPU-BD;
8. Zona pergaraman yang selanjutnya disebut KPU-GR;
9. Zona industri yang selanjutnya disebut KPU-ID;
10. Zona bandar udara yang selanjutnya disebut KPU-BU;
11. Zona fasilitas umum yang selanjutnya disebut KPU-FU;
12. Zona pertahanan keamanan yang selanjutnya disebut KPU-PK; dan
13. Zona jasa perdagangan yang selanjutnya disebut KPU-JP.

Alokasi Ruang untuk KK dikategorikan atas:

1. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disebut KKP3K;
2. Kawasan Konservasi Perairan yang selanjutnya disebut KKP;
3. Kawasan Konservasi Maritim yang selanjutnya disebut KKM.

Selain KK. KK dapat berupa Kawasan Lindung yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut KK-KL. Alokasi Ruang untuk AL terdiri atas:

1. Alur pelayaran yang selanjutnya disebut AL-AP;
2. Pipa/kabel bawah laut yang selanjutnya disebut AL-APK; dan
3. Migrasi biota laut yang selanjutnya disebut AL-AMB.

Alokasi Ruang untuk KSN terdiri atas:

1. Daerah latihan militer yang selanjutnya disebut KSN-LM;
2. Pangkalan utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang selanjutnya disebut KSN-LT; dan
3. Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar (MAMMINASATA) yang selanjutnya disebut KSN-Mamminasata.

Alokasi Ruang WP-3-K untuk wilayah perairan laut sampai dengan 2 (dua) mil laut diutamakan untuk Kawasan Konservasi, ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil dan wisata bahari berkelanjutan.

Ketentuan mengenai Alokasi Ruang RZWP-3-K dibuat dalam peta dengan skala minimum 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu). Ketentuan mengenai KPU dan/atau KK dijabarkan lebih lanjut dalam zona dan/atau subzona, dan dituangkan dalam peta dengan skala minimum 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).

Tabel 3.6

Hasil Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulsel	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Tujuan 14. Ekosistem Lautan			
	TARGET 14. Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang			

	tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.			
	Persentase Kepatuhan pelaku Usaha	• Maraknya penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan bus sehingga merusak lingkungan dan ekosistem sekitarnya • Rusaknya ekosistem akan mempengaruhi jumlah stock ikan sehingga akan berpengaruh pada ketersediaan pangan	• Pengetahuan dan Kapasitas SDM nelayan terhadap tekno-logi alat tangkap, target tangkapan, & daerah penangkapan ikan masih rendah • Teknologi penangkapan ikan sangat konvensional dan sulit berubah. • Sarana dan prasarana tempat pendaratan ikan serta fasilitas kebutuhan melaut (operasi penangkapan ikan) masih sangat terbatas • Penanganan dan pengolahan ikan belum menjadi perhatian yang serius (terkesan seadanya) • Mekanisme dan jaringan pemasaran masih sangat konvensional, dengan metode transaksi langsung	• Semangat etos kerja nelayan yang sangat kuat • Potensi sumberdaya perikanan belum dimanfaatkan secara optimal • Kebutuhan pasar akan pangan sumberdaya ikan semakin meningkat • Perhatian terhadap Perbaikan infrastruktur pendukung serta sarana dan prasarana perikanan tangkap semakin besar

b	Ketersediaan kerangka Hukum/Regulasi/Kebijakan/Kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	Kurangnya kebijakan hak akses nelayan dan perlindungan nelayan	- Pola pikir dan Kualitas SDM - Eksploitasi yang berlebihan	- Dukungan Pembiayaan - Penyuluhan
2	Jumlah kab/Kota dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan	Kerjasama perbankan dan akses	- Mitra Usaha - Akses perbankan - Jalur penangkapan ikan - Kesadaran masyarakat	- Potensi Perikanan - Kebijakan dan Regulasi - Perencanaan dan Evaluasi
3	Jumlah nelayan yang terlindungi	Ketersediaan data kelompok nelayan yang valid	Minimnya aturan dan regulasi	- Penyuluhan - Penyadaran Masyarakat (Public Awareness)

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam penentuan Isu-Isu Strategis, maka perlu mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan ditinjau dari permasalahan pembangunan daerah yaitu :

1. Produktivitas dan daya saing produksi perikanan masih rendah,
2. Nilai tambah produk olahan dan pemasaran belum optimal dan berdaya saing,
3. Masih lemahnya manajemen pelabuhan perikanan dan TPI sehingga kualitas produksi kurang,
4. Kualitas Kelembagaan Nelayan, Pembudidaya & Pengolah serta Kesenjangan Gender dalam kelembagaan kelompok,
5. Sebagian besar operasional usaha nelayan skala kecil bergantung pada Ponggawa Sawi,
6. Masih maraknya Kegiatan Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing,

7. Terjadinya konflik kepentingan antar sektor kelautan dan perikanan dengan sektor pertambangan dan pariwisata bahari khususnya di wilayah laut dan pesisir serta padat tangkap (Overfishing) di perairan pantai
8. Kondisi terumbu karang yang persentasinya lebih besar sudah dalam keadaan rusak dan penurunan kuantitas mangrove akibat adanya eksploitasi besar-besaran

Sedangkan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka menjalankan amanah berdasarkan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Kelautan dan Perikanan didukung oleh :

1. Bidang teknis sebanyak 4 unit kerja
2. Unit Pelayanan Teknis sebanyak 4 unit
3. Cabang Dinas Kelautan sebanyak 7 unit kerja

Setelah terbentuknya Cabang Dinas yang tersebar di wilayah kabupaten/kota maka diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam hal pelayanan dan pembinaan terhadap pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut, namun dalam melaksanakan tata kelola tugas dan fungsi masih terkendala dengan SDM yang terampil dan sarana prasana sistem informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja pelayanan yaitu berdasarkan hasil analisis peta jabatan maka Dinas Kelautan dan Perikanan masih kekurangan pegawai.

Kemudian untuk mencapai Sasaran Strategis pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan 2019-2024 dengan menitikberatkan pada Pengembangan sentra industri kelautan dan perikanan yang memiliki komoditas unggulan dan menerapkan teknologi inovatif dengan mutu dan keamanan konsumsi terjamin dengan sasaran target sampai lima tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.7

Sasaran Strategis Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan

NO	SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA	Target sampai denganTahun 2024
1	Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP (indeks)	51
2	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	12
3	Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (%)	87
4	Jumlah pulau-pulau kecil yang Mandiri (pulau)	31
5	Nilai Pengelolaan wilayah KP yang berkelanjutan (%)	65
6	Nilai peningkatan ekonomi KP (%)	100
7	Produksi perikanan (juta ton)	39,97
8	Produksi garam rakyat (juta ton)	4,5
9	Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)	9,54
10	Konsumsi ikan (kg/kap/thn)	54,49

Sedangkan Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Provinsi yaitu meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sektor perekonomian berbasis sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan fokus pada Komoditi Unggulan dengan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas agar dapat berdaya saing sehingga memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pengembangan hilirisasi berbasis kawasan, maka dikembangkan melalui :

1. Mengembangkan komoditi unggulan dan komoditi penunjang melalui sistem agribisnis dengan pola klaster (cluster).
2. Mengelompokkan dan menentukan struktur ruang berdasarkan keunggulan masing-masing wilayah dalam kawasan.
3. Mengembangkan prasarana dan sarana yang dapat meningkatkan sinergitas kegiatan dalam kawasan.
4. Mengelompokkan dan menentukan pola ruang kawasan berdasarkan zona-zona kawasan.

Sesuai dengan klausul yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, diperlukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai instrumen

pendukung dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. KLHS merupakan self assesment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang diusulkan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. KLSH diperlukan karena prinsip pembangunan berkelanjutan perlu terintegrasi dalam pengambilan keputusan melalui informasi yang lebih komprehensi tentang lingkungan hidup. Fakta menunjukkan bahwa laju degradasi sumberdaya lahan dan kualitas lingkungan hidup semakin meningkat, dan umumnya bersifat kausalitas lintas wilayah dan antar sektor. Oleh karena itu, diperlukan instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang memungkinkan penyelesaian masalah yang bersifat berjenjang (dari pusat ke daerah), lintas wilayah dan antar sektor. Salah satu sumber permasalahan degradasi sumberdaya lahan dan kualitas lingkungan hidup berawal dari proses pengambilan keputusan, sehingga perlu upaya penanggulangan degradasi sumberdaya lahan dan kualitas lingkungan hidup .

Tabel.3.8
Pembobotan Permasalahan yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan
berdasarkan Kajian

No	Permasalahan	Nilai Skala Kriteria ke						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	Produktivitas dan daya saing produksi perikanan masih rendah	20	10	20			15	65
2	Nilai tambah produk olahan dan pemasaran belum optimal dan berdaya saing	20	10	20			15	65
3	Masih lemahnya manajemen pelabuhan perikanan dan TPI sehingga kualitas produksi kurang	20	10		10		15	55
4	Kualitas Kelembagaan Nelayan, Pembudidaya & Pengolah serta Kesenjangan Gender dalam kelembagaan kelompok	20	10		10		15	55
5	Sebagian besar operasional usaha nelayan skala kecil bergantung pada Ponggawa Sawi	20	10		10	15		55
6	Masih maraknya Kegiatan Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing		10	20	10			40
7	Terjadinya konflik kepentingan antar sektor kelautan dan perikanan dengan sektor pertambangan khususnya di wilayah laut dan pesisir serta Padat tangkap (Overfishing) di perairan pantai		10	20	10			40
8	Kondisi terumbu karang yang persentasinya lebih besar sudah dalam keadaan rusak dan Penurunan kuantitas mangrove akibat adanya eksploitasi besar-besaran							

Tabel.3.9
Skor Kriteria penentuan isu strategis

NO	KRITERIA	BOBOT
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran renstra K/L atau Renstra provinsi/Kabupaten/Kota	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab DKP Prop Sulsel	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik cukup besar	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	15
	TOTAL	100

Kemudian melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala tersebut. Hasil pembobotan menunjukkan bahwa terdapat 2 permasalahan yang memiliki jumlah bobot tertinggi dengan nilai 65 poin yaitu permasalahan nomor 1 dan 2 dengan variasi bobot angka yang berbeda. Jika kita mengkaji lebih jauh ternyata kedua permasalahan ini dapat dijadikan satu bahasa yang lebih sederhana dan diangkat menjadi isu strategis, yaitu belum optimalnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berbasis pengembangan kawasan kelautan dan perikanan secara berdaya saing.

Selanjutnya, terdapat 2 permasalahan yang memiliki jumlah bobot yang sama juga dengan nilai 55 poin, yaitu permasalahan nomor 3, nomor 4 dan nomor 5. Kembali, secara garis besar permasalahan ini dapat lebih disederhanakan dan diangkat menjadi satu isu strategis berikutnya, yaitu masih rendahnya SDM yang terampil pada pelaku aparat dan pelaku usaha perikanan serta akses permodalan bagi pelaku usaha perikanan.

Kemudian permasalahan nomor 8 memiliki bobot dengan nilai 50 dapat diangkat menjadi satu isu strategis, yaitu . Terakhir, permasalahan yang memiliki jumlah bobot terendah, yaitu 40 poin adalah permasalahan nomor 6, nomor 7 dan nomor 8. Secara lebih sederhana dapat diangkat menjadi isu strategis yang terakhir, yaitu degradasi daya dukung Lingkungan Pesisir dan Laut serta ketaatan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan . Secara berurutan berdasarkan pembobotan yang telah dilaksanakan seperti pada tabel di atas, maka dapat disampaikan bahwa

Isu Strategis Renstra Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada periode 2021 - 2023 adalah:

1. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing berbasis pengembangan Kawasan dan komoditas unggulan akibat masih rendahnya SDM yang terampil pada aparatur dan pelaku usaha perikanan serta dukungan infrastruktur dan sarana prasarana perikanan.
2. Kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil masih dibawah serta kurangnya akses permodalan untuk mendukung usaha
3. Degradasi daya dukung Lingkungan Pesisir dan Laut serta masih rendahnya ketaatan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan dan memiliki keterkaitan dengan Visi yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi serta melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun peta strategis pembangunan dan sebagai sarana dalam mengevaluasi capaian yang telah dilaksanakan.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sesuai dengan Tabel T-C.25 sebagaimana berikut ini.

Tabel. 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Selatan selama 5 tahun

NO	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR SASARAN	(baseline)	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -			
			2019	2020	2021	2022	2023
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi OPD	75,00	75,15	75,30	75,45	75,60
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,61	85,81	86,01	86,21	86,41
		Persentase capaian kinerja Program Perangkat Daerah (%)	95	95	95	95	95
		Persentase Nilai Temuan Material LHP yang ditindaklanjuti (%)	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk komoditas unggulan kelautan dan perikanan	Pertumbuhan PDRB Subsektor Perikanan (%)	8,7	9,2	10,01	10,9	11,8
2.1	Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah produksi dan produktivitas produksi	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	8.4	4.2	4.6	5.1	5.6
		Produksi Perikanan (ton)	4.061.326,7	4.092.881.4	4.342.259,8	4.546.138,0	4.759.871,9

NO	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR SASARAN	(baseline)	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -			
			2019	2020	2021	2022	2023
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
2.2	Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan	Konsumsi Ikan (kg/Kap/th)	64,70	55,00	59,50	62,70	65.9
2.3	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan	Nilai Tukar Nelayan	107	100.58	101.59	102.60	103.63
3	Meningkatkan kelestarian dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan	Potensi penurunan emisi GRK (juta ton CO2) dari sektor perikanan	0.67	0.68	0.69	0.69	0.7
3.1	Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial (%)	0.24	1.01	1.05	1.07	1.09
		Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	48.85	29.47	33.89	36.27	38.80
		Prosentase Penurunan tindakan IUU Fishing (%)	5,88	17,24	20,83	26,32	35,71

Berdasarkan uraian atas tujuan dan sasaran dari Dinas Kelautan dan Perikanan di atas serta tujuan dan sasaran dari RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan maka dapat ditarik satu garis yang linear antara keduanya. Secara lebih jelas akan digambarkan dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel 4.2
Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Renstra Dinas

No	RPJMD		Renstra	
	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	1.1.Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan 1.2 Berkembangnya inovasi dalam pelayanan public	1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1.1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
2.	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan	2.1. Meningkatkan produktivitas pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru	2. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk komoditas unggulan Kelautan dan Perikanan	2.1. Meningkatkan produksi dengan menambah jumlah produksi dan produktivitas produksi
				2.2. Meningkatkan konsumsi ikan dan daya saing produk Kelautan dan Perikanan
				2.3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan
3.	Mengoptimalkan pengelolaan Sumberdaya alam secara berdaya saing tanpa mengabaikan kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup	3.1.Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	3.Meningkatkan kelestarian dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan	3.1 Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka mendukung 5 program nyata Gubernur, dimana dinas kelautan berkontribusi terhadap : 1. Sulsel mandiri dan sejahtera, 2. Sulsel sehat dan cerdas, 3. Sulsel Terkoneksi, 4. Sulsel bersih melayani, Sehingga dibutuhkan strategi dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan. Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif, untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sedangkan kebijakan merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani Dinas Kelautan dan Perikanan, dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan. Strategi dan arah kebijakan merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai dijabarkan dalam serangkaian kebijakan pada tabel 5.1 sesuai tabel T-C.26.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif ,Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter			
MISI : (1) Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	(1) Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah	(1) Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan kualitas pengolahan keuangan perangkat daerah	(1) Pengelolaan dan penataan administrasi sesuai aturan serta Perencanaan yang SMART

MISI : (5) Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengoptimalkan pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing secara berkelanjutan	(1) Meningkatnya produksi dan kontribusi sektor perikanan	(1) Pembinaan yang Inklusif bagi pelaku usaha untuk mendorong produktivitas serta Revitalisasi Wilayah-wilayah yang pernah menjadi pusat produksi	(1.1) Pengelolaan berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan secara ekologis dan berbasis kawasan serta pemulihan ekonomi pasca bencana alam dan pandemik global (1.2) Pengembangan pola kemitraan usaha untuk peningkatan daya saing dan nilai tambah produk
		(2) Perbaikan sarana dan prasarana produksi perikanan baik pada faktor produksi maupun metode kerja serta Perbaikan standarisasi dalam hal mutu dan kualitas produk dari hulu ke hilir	(2.1) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk komoditas unggulan (udang Windu, Rumput Laut) dan komoditas Perikanan lainnya yang berkelanjutan (2.2) Pengembangan pola kemitraan untuk peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perikanan yang berkelanjutan
		(3) Peningkatan produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya yang didukung oleh inovasi teknologi dan informasi	(3) Penerapan dan pengembangan teknologi dan system informasi
	(2) Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan	(1) Pengembangan usaha pengolahan Perikanan dan diversifikasi produk dengan inovasi teknologi olahan yang bermutu dan berdaya saing	(1.1) Pengembangan Hilirisasi Perikanan (1.2) Inovasi Olahan dan penerapan Standarisasi produk dalam rangka peningkatan imun dan penurunan stunting
		(2) Fasilitasi dalam pengembangan jejaring dan akses keuangan serta permodalan dalam rangka perluasan usaha dan penguatan pasar	(2.1) Peningkatan volume dan nilai produksi hilirisasi perikanan
	(3) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan	Penguatan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pelaku usaha kelautan dan Perikanan	Pengembangan SDM, perluasan usaha dan kemitraan

Meningkatkan kelestarian dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan	Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan	(1) Pengawasan wilayah laut, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan serta Koordinasi dan kerjasama, pengelolaan serta pengamanan wilayah laut dari pemanfaatan sumberdaya kelautan dan Perikanan	(1) Peningkatan kepatuhan pelaku usaha perikanan dalam rangka penurunan IUU Fishing
		(2) Rehabilitasi ekosistem Pesisir dan Laut, pengendalian dan konservasi kawasan pesisir dan laut serta Penataan dan pengelolaan ruang laut	(2) Pengelolaan kawasan konservasi perairan dan pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau serta Pelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan
		(3) Peningkatan Pengawasan kolaborasi Multipihak dan penerapan inovasi teknologi informasi pada sektor kelautan dalam menjaga dan mengawasi perairan laut dalam rangka pengendalian dan pengurangan IUU Fishing	(3) Menjaga Ketersediaan stock ikan dan terkendalinya pemanfaatan SDI yang lestari dan keberlanjutan
		(4) Peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi Ekosistem Pesisir dan Laut serta kelestarian lingkungan pesisir dan laut	(4) Pengembangan inovasi teknologi, edu wisata dan eko wisata untuk pengelolaan kawasan konservasi dan daerah perlindungan laut, kelestarian lingkungan serta penurunan emisi karbon dan gas rumah kaca
		(5) Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam memelihara Lingkungan pesisir dan Laut	(5) Penataan dan pengelolaan sector kelautan dan perikanan Integrasi terhadap dokumen RTRW dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau kecil

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Penekanan prioritas kebijakan pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka

percepatan pemulihan ekonomi pasca COVID19 dan pencapaian sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Dengan prioritas kebijakan tersebut bukan berarti program/kegiatan pembangunan operasional SKPD di luar yang diprioritaskan tidak berjalan, ia tetap berjalan tetapi dengan penekanan strategis yang lebih rendah dibanding yang diprioritaskan. Kebijakan Pembangunan dengan penekanan strategis lebih rendah dimaksud adalah program-program operasional pada semua SKPD yang melaksanakan program pembangunan daerah untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan. Rencana pelaksanaan kebijakan selama 5 tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2

Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan tahun 2018-2023

VISI : “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”							
MISI 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif							
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun 1	Arah Kebijakan Tahun 2	Arah Kebijakan Tahun 3	Arah Kebijakan Tahun 4	Arah Kebijakan Tahun 5
Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	Pengelolaan dan penataan administrasi sesuai aturan serta Perencanaan yang SMART	Akselerasi Pengelolaan dan penataan administrasi sesuai aturan serta Perencanaan yang SMART (Penerapan Reformasi Birokrasi)	Akselerasi Pengelolaan dan penataan administrasi sesuai aturan serta Perencanaan yang SMART (Penerapan Reformasi Birokrasi)	Pemantapan Pengelolaan dan penataan administrasi sesuai aturan serta Perencanaan yang SMART (Penerapan Reformasi Birokrasi)	Pemantapan Pengelolaan dan penataan administrasi sesuai aturan serta Perencanaan yang SMART (Penerapan Reformasi Birokrasi)
MISI 5 : Meningkatkan produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang berkelanjutan							
Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berdaya saing tanpa mengabaikan kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup	Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah faktor produksi dan produktivitas produksi berbasis sumberdaya alam	Pembinaan yang Inklusif bagi pelaku usaha untuk mendorong produktivitas serta Revitalisasi Wilayah-wilayah yang pernah menjadi pusat produksi	Pengelolaan berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan secara ekologis dan berbasis kawasan serta pemulihan ekonomi pasca bencana alam dan pandemik global	Akselerasi Pengelolaan berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan secara ekologis dan berbasis Kawasan serta pemulihan ekonomi pasca bencana alam dan pandemik global	Akselerasi Pengelolaan berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan secara ekologis dan berbasis Kawasan serta pemulihan ekonomi pasca bencana alam dan pandemik global	Pemantapan Pengelolaan berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan secara ekologis dan berbasis Kawasan serta pemulihan ekonomi pasca bencana alam dan pandemik global	Pemantapan Pengelolaan berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan secara ekologis dan berbasis Kawasan serta pemulihan ekonomi pasca bencana alam dan pandemik global

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun 1	Arah Kebijakan Tahun 2	Arah Kebijakan Tahun 3	Arah Kebijakan Tahun 4	Arah Kebijakan Tahun 5
			---	Pengembangan pola kemitraan usaha untuk peningkatan daya saing dan nilai tambah produk	Akselerasi Pengembangan pola kemitraan usaha untuk peningkatan daya saing dan nilai tambah produk	Pemantapan Pengembangan pola kemitraan usaha untuk peningkatan daya saing dan nilai tambah produk	Pemantapan Pengembangan pola kemitraan usaha untuk peningkatan daya saing dan nilai tambah produk
		Perbaikan dan mengganti sarana dan prasarana produksi perikanan baik pada faktor produksi maupun metode kerja serta Perbaikan standarisasi dalam hal mutu dan kualitas produk dari hulu ke hilir	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk komoditas unggulan (udang Windu, Rumput Laut) dan komoditas Perikanan lainnya yang berkelanjutan	Akselerasi Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk komoditas unggulan (udang Windu, Rumput Laut) dan komoditas Perikanan lainnya yang berkelanjutan	Akselerasi Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk komoditas unggulan (udang Windu, Rumput Laut) dan komoditas Perikanan lainnya yang berkelanjutan	Pemantapan Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk komoditas unggulan (udang Windu, Rumput Laut) dan komoditas Perikanan lainnya yang berkelanjutan	Pemantapan Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk komoditas unggulan (udang Windu, Rumput Laut) dan komoditas Perikanan lainnya yang berkelanjutan
			---	---	Pengembangan pola kemitraan untuk peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perikanan	Akselerasi pengembangan pola kemitraan untuk peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perikanan	Pemantapan Pengembangan pola kemitraan untuk peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perikanan
		Peningkatan produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya yang didukung oleh inovasi teknologi dan informasi	---	---	Penerapan dan pengembangan teknologi dan system informasi	Akselerasi Penerapan dan pengembangan teknologi dan system informasi	Akselerasi Penerapan dan pengembangan teknologi dan system informasi
Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berdaya saing tanpa mengabaikan kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup	Meningkatnya konsumsi ikan dan dayasaing produk kelautan dan perikanan	Pengembangan usaha pengolahan Perikanan dan diversifikasi produk dengan inovasi teknologi olahan yang bermutu dan berdayasaing	Pengembangan Hilirisasi Perikanan	Akselerasi Pengembangan Hilirisasi perikanan	Akselerasi Pengembangan Hilirisasi perikanan	Pemantapan Pengembangan Hilirisasi perikanan	Pemantapan Pengembangan Hilirisasi perikanan
			Inovasi Olahan dan penerapan Standarisasi produk	Akselerasi Inovasi Olahan dan penerapan Standarisasi produk	Inovasi Olahan dan penerapan Standarisasi produk dalam rangka peningkatan imun dan penurunan stunting	Akselerasi Inovasi Olahan dan penerapan Standarisasi produk dalam rangka peningkatan imun dan penurunan stunting	Pemantapan Inovasi Olahan dan penerapan Standarisasi produk dalam rangka peningkatan imun dan penurunan stunting

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun 1	Arah Kebijakan Tahun 2	Arah Kebijakan Tahun 3	Arah Kebijakan Tahun 4	Arah Kebijakan Tahun 5
		Fasilitasi dalam pengembangan jejaring dan akses keuangan serta permodalan dalam rangka perluasan usaha dan penguatan pasar	Peningkatan volume dan nilai hilirisasi	Akselerasi Peningkatan volume dan nilai hilirisasi	Akselerasi Peningkatan volume dan nilai hilirisasi	Pemantapan Peningkatan volume dan nilai hilirisasi	Pemantapan Peningkatan volume dan nilai hilirisasi
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan	Penguatan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan	Pengembangan SDM, perluasan usaha dan kemitraan	Akselerasi Pengembangan SDM, perluasan usaha dan kemitraan	Akselerasi Pengembangan SDM, perluasan usaha dan kemitraan	Pemantapan Pengembangan SDM, perluasan usaha dan kemitraan	Pemantapan Pengembangan SDM, perluasan usaha dan kemitraan
Meningkatkan kelestarian dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan	Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan	gawasan wilayah laut, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya laut serta Koordinasi dan asama, pengelolaan a pengamanan wilayah dari pemanfaatan berdaya kelautan dan kanan	ngkatan kepatuhan pelaku usaha perikanan dalam rangka penurunan IUU Fishing	Akselerasi Peningkatan kepatuhan pelaku usaha perikanan dalam rangka penurunan IUU Fishing	Akselerasi Peningkatan kepatuhan pelaku usaha perikanan dalam rangka penurunan IUU Fishing	Pemantapan peningkatan kepatuhan pelaku usaha perikanan dalam rangka penurunan IUU Fishing	Pemantapan peningkatan kepatuhan pelaku usaha perikanan dalam rangka penurunan IUU Fishing
		abilitasi ekosistem Pesisir dan laut, gendalian dan servasi kawasan pesisir dan laut serta Penataan dan pengelolaan ruang laut	elolaan kawasan konservasi perairan dan pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau serta Pelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan	erasi Pengelolaan kawasan konservasi perairan dan pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau serta Pelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan	Akselerasi Pengelolaan kawasan konservasi perairan dan pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau serta Pelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan	Pemantapan Pengelolaan kawasan konservasi perairan dan pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau serta Pelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan	Pemantapan Pengelolaan kawasan konservasi perairan dan pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau serta Pelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun 1	Arah Kebijakan Tahun 2	Arah Kebijakan Tahun 3	Arah Kebijakan Tahun 4	Arah Kebijakan Tahun 5
		Peningkatan Pengawasan kolaborasi Multipihak dan penerapan inovasi teknologi informasi pada sektor kelautan dalam menjaga dan mengawasi perairan laut dalam rangka pengendalian dan pengurangan IUU Fishing	Ketersediaan stock ikan dan terkendalinya pemanfaatannya SDI yang lestari dan keberlanjutan	Akselerasi Ketersediaan stock ikan dan terkendalinya pemanfaatannya SDI yang lestari dan keberlanjutan	Akselerasi Ketersediaan stock ikan dan terkendalinya pemanfaatannya SDI yang lestari dan keberlanjutan	Pemantapan Ketersediaan stock ikan dan terkendalinya pemanfaatan SDI yang lestari dan keberlanjutan	Pemantapan Ketersediaan stock ikan dan terkendalinya pemanfaatannya SDI yang lestari dan keberlanjutan
		Peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi, daerah perlindungan laut, ekosistem Pesisir dan Laut serta kelestarian lingkungan pesisir dan laut	Pengembangan inovasi teknologi, eduwisata dan ekowisata untuk pengelolaan kawasan konservasi, daerah perlindungan laut, kelestarian lingkungan dan penurunan emisi karbon dan gas rumah kaca	Pengembangan inovasi teknologi, eduwisata dan ekowisata untuk pengelolaan kawasan konservasi, daerah perlindungan laut, kelestarian lingkungan dan penurunan emisi karbon dan gas rumah kaca	Pengembangan inovasi teknologi, eduwisata dan ekowisata untuk pengelolaan kawasan konservasi, daerah perlindungan laut, kelestarian lingkungan dan penurunan emisi karbon dan gas rumah kaca	Pengembangan inovasi teknologi, eduwisata dan ekowisata untuk pengelolaan kawasan konservasi, daerah perlindungan laut, kelestarian lingkungan dan penurunan emisi karbon dan gas rumah kaca	Pengembangan inovasi teknologi, eduwisata dan ekowisata untuk pengelolaan kawasan konservasi, daerah perlindungan laut, kelestarian lingkungan dan penurunan emisi karbon dan gas rumah kaca
		Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam memelihara Lingkungan pesisir dan Laut	Pemantapan dan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan Integrasi terhadap dokumen RTRW dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil	Akselerasi Penataan dan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan Integrasi terhadap dokumen RTRW dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil	Akselerasi Penataan dan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan Integrasi terhadap dokumen RTRW dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil	Pemantapan Penataan dan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan Integrasi terhadap dokumen RTRW dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil	Pemantapan Penataan dan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan Integrasi terhadap dokumen RTRW dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

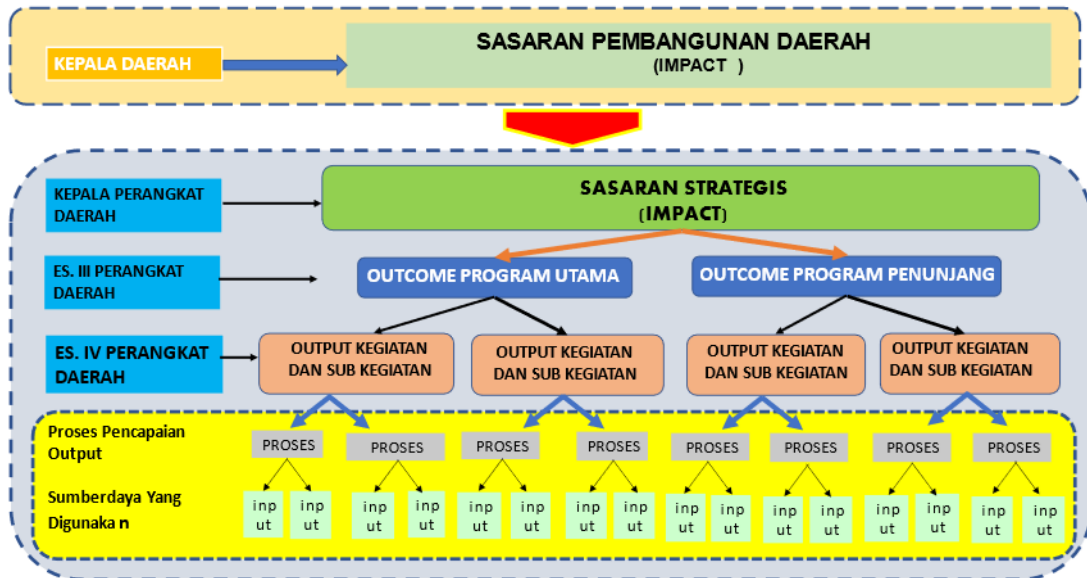
Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap misi, maka langkah operasional harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, dan misi organisasi.

Program Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program per pagu sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, yang selanjutnya dijabarkan Dinas Kelautan dan Perikanan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan.

Sehingga dalam lima (5) tahun, arsitektur perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan dipisahkan menjadi dua: (1) perencanaan strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi-misi kepala daerah dan wakil kepala daerah; (2) perencanaan operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan setiap urusan.

Gambar 6.1

Arsitektur perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan sesuai tugas dan fungsi



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah (eselon II). Sedangkan pencapaian outcome suatu program menjadi tanggung jawab kepala bidang/kepala bagian (eselon III). Sementara untuk pencapaian output kegiatan dan sub kegiatan menjadi tanggung jawab kepala subbagian/ kepala seksi. Adapun staf pelaksana bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan kegiatan (input dan proses).

Rencana Program Kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada prinsipnya merupakan kegiatan sesuai dengan hasil pemetaan dari numenklatur program kegiatan di Permendagri 90 Tahun 2019 dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan dan keberlanjutan program kegiatan sebelumnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai maka dukungan Indikator sasaran program dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1
Indikator Tujuan, Sasaran dan Program

NO	TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	Baseline	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -			
			2019	2020	2021	2022	2023
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
1	Tujuan : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi OPD	75,00	75,15	75,30	75,45	75,60
1.1	Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,61	85,81	86,01	86,21	86,41
		Persentase capaian kinerja Program Perangkat Daerah (%)	95	97,5	98	98,5	95
		Persentase Nilai Temuan Material LHP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100	100
a.	Program Penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase realisasi kegiatan perangkat daerah (%)	100.	100.	100.	100.	100.
		Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan Sangat baik (%)	100	100.	100.	100.	100.
		Persentase penurunan temuan berdasarkan LHP (%)	7.41	8.00	8.70	9.52	10.53

NO	TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	Baseline	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -			
			2019	2020	2021	2022	2023
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
2	Tujuan : Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk komoditas unggulan kelautan dan perikanan	Pertumbuhan PDRB Subsektor Perikanan (%)	8,7	9,2	10,01	10,9	11,8
2.1	Sasaran : Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah produksi dan produktivitas produksi	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (%)	8.4	4.2	4.6	5.1	5.6
		Produksi Perikanan (ton)	4.061.326,7	4.092.881,4	4.342.259,8	4.546.138,0	4.759.871,9
a.	Program Pengelolaan Perikanan tangkap	Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan Tangkap (Rp.M)	8.631,30	8.675,44	8.852,48	9.029,52	9.210,12
		Produksi perikanan tangkap (ton)	398.565,2	389.052,4	396.992,3	404.932,2	413.030,8
		Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional (%)	31,58	47,37	57,89	68,42	78,95
b.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Nilai Hilirisasi produksi perikanan budidaya (Rp.M)	14.856,34	14.250,56	14.474,73	15.198,47	15.958,39
		Produksi perikanan budidaya (ton)	3.662.761,4	3.703.829,0	3.898.767,4	4.093.705,8	4.298.391,1
		Persentase ketersediaan benur berkualitas (%)	90	100	100	100	100

NO	TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	Baseline	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -			
			2019	2020	2021	2022	2023
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
c.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Keci	Produksi garam rakyat (ton)	140.338,9	45.846	46.500	47.500	48.450
		Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Perikanan (%)	4,35	23.91	23.91	23.91	23.91
2.2	Sasaran : Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan	Konsumsi Ikan (kg/kap/th)	64.7	55	59.50	62.7	65.90
a.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai hilirisasi produk olahan ikan konsumsi dan non konsumsi (Rp. M)	293,12	298,10	304.96	304.96	317.28
		Produksi olahan ikan konsumsi dan non konsumsi (ton)	5332.1	5,492.06	7,051.70	8.109,5	9,325.90
		Persentase pengujian (pembinaan) mutu produk perikanan (%)	20	20	20	20	20
2.3	Sasaran : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan	Nilai Tukar Nelayan	107	101.35	102.37	102.78	103.19
a.	Program Pengelolaan Perikanan tangkap	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	30,18	20.06	23,89	27,07	30,25
		Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	20.32	24.26	25.61	26.79	27.17

NO	TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	Baseline	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -			
			2019	2020	2021	2022	2023
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
3	Tujuan : Meningkatkan kelestarian dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan	Potensi penurunan emisi GRK (juta ton CO ₂) dari sektor perikanan	0.67	0.68	0.69	0.69	0.7
3.1	Sasaran: Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (%)	0.24	1,01	1.03	1.05	1,07
		Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	48.85	35.37	35.72	38.58	42.44
		Prosentase Penurunan tindakan IUU Fishing (%)	5,88%	17,24%	20,83%	26,32%	35,71%
a.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan PPK	Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (%)	67,28	67,28	67,29	67,30	67,31
b.	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (%)	82.40	86,88	87,48	88,73	89,85

Pada tabel 6.1 dapat diuraikan bahwa dari 4 sasaran RPJMD Perubahan maka telah didukung 5 Sasaran Strategis OPD dalam Renstra Perubahan sehingga untuk mencapai sasaran strategis tersebut didukung oleh 5 program teknis sesuai numenklatur permendagri 90 tahun 2019 dan dengan adanya sasaran strategis baru maka akan dilaksanakan sesuai dengan kaidah pelaksanaan yang berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah. Oleh karena pencapaian target untuk tahun 2021-2023 pada Renstra

Perubahan ini maka perlu dilakukan penyesuaian penyajian data IKU yang digambarkan dalam bentuk tabel pada Bab VII. Adapun penjelasan program kegiatan dalam mendukung Misi pembangunan adalah sebagai berikut.

Misi 5

Meningkatkan produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang berkelanjutan

Tujuan : Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk komoditas unggulan kelautan dan perikanan

Sasaran :

- 1. Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah produksi dan produktivitas produksi**
- 2. Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan**
- 3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan**

Didukung oleh program :

Program Prioritas :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Indikator Program :

- a. Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan Tangkap pada tahun 2021 sebesar Rp. 8.852,48 M menjadi Rp. 9.210,12 M pada tahun 2023**
- b. Produksi Perikanan Tangkap pada tahun 2021 sebesar 396.992,3 ton menjadi 413.030,8 ton pada tahun 2023**
- c. Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional tahun 2023 sebesar 57,89% menjadi 78,94% pada tahun 2023**
- d. Cakupan Bina Kelompok Nelayan pada tahun 2021 sebesar 23,89% menjadi 30,89% pada tahun 2023**
- e. Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan pada tahun 2021 sebesar 25,61% menjadi 27,17% pada tahun 2023**

Program ini meliputi kegiatan :

- a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
- b. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
- c. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
- b. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
- b. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
- c. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
- c. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
- b. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
- c. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
- d. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil
- b. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil

- e. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
- b. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
- f. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan perikanan Provinsi

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan
- b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
- c. Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
- g. Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
- b. Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
- h. Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT
- b. Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT

i. Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
 - b. Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
- j. Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT
- b. Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
- c. Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT

Berdasarkan aspek kajian pengembangan dan pembangunan perikanan tangkap yang menentukan keberhasilan dan tingkat produktifitas unit usaha. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil berbasis Teknologi penangkapan ikan (fishing technology) yang diarahkan pada peningkatan produktifitas penangkapan sebagai target pencapaian dengan indikator kinerja diarahkan pada efektifitas dan efisiensi upaya penangkapan ikan yang dilakukan meliputi:

- a) Penerapan teknologi penangkapan ikan berbasis potensi ruang dengan menetapkan komoditas unggulan sebagai target tangkapan,
- b) Pemanfaatan teknologi alat bantu penangkapan ikan seperti, penggunaan Global Position Service (GPS), cahaya, umpan, dan resonansi suara
- c) Penanganan dan pengendalian teknologi penangkapan ikan yang overfishing dan tidak ramah lingkungan (destructive fishing) melalui pengelolaan jumlah dan jenis alat tangkap, pengaturan ukuran mata

jaring untuk selektifitas target tangkapan, dan pembatasan daerah operasi penangkapan ikan pada zona terlarang.

- d) Pengelolaan dan pengembangan Sumberdaya Ikan
- e) Pelayanan rekomendasi usaha Perikanan tangkap dalam rangka perijinan dan kemudahan akses nelayan dalam melakukan usaha Perikanan tangkap di luar wilayah penangkapan ikan provinsi Sulawesi Selatan.
- f) Penguatan kelembagaan dan peningkatan kerjasama yang berbasis antar pemerintah, institusi, lembaga dan swasta dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.
- g) Revitalisasi sarana dan prasarana penangkapan ikan yang lebih modern untuk menjaga kualitas hasil tangkapan dan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca bencana alam dan pandemik global.

Gambaran umum potensi pembangunan perikanan tangkap Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tiga karakteristik wilayah pesisir yang khas/spesifik, yaitu perairan wilayah pesisir Teluk Bone, wilayah pesisir Laut Flores, dan wilayah pesisir Selat Makassar. Ketiga karakteristik wilayah perairan ini seharusnya mampu dioptimalkan pemanfaatannya sebagai potensi yang sangat besar dan luar biasa dalam mengakselerasi pembangunan perikanan tangkap dan mendukung *Marine Culture*.

Kajian ikan target tangkapan (fish target) dan daerah penangkapan ikan (fishing ground) dititikberatkan pada analisis entitas dan potensi ruang yang ditetapkan sebagai daerah penangkapan ikan sebagai wilayah kajian dengan segala potensi sumberdaya ikan yang terkandung didalamnya. Ruang lingkup kajian target tangkapan akan mendeskripsikan produksi dan potensi sumberdaya ikan yang berada pada suatu daerah penangkapan ikan melingkupi komposisi jenis, ukuran ikan, jumlah hasil tangkapan sebagai total produksi dan jumlah stok sumberdaya ikan, ekosistem dan habitat keberadaan target tangkapan, dan tingkah laku ikan target tangkapan. Pengetahuan dan pemahaman tingkah laku ikan target tangkapan terhadap penguasaan karakteristik daerah penangkapan merupakan acuan dasar dan basis pengembangan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan.

Diperlukan manajemen pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan, baik yang bersifat teknis pada teknologi penangkapan ikan maupun yang bersifat manajemen dalam pengelolaan base-line data secara sistematis dan terstruktur dari waktu ke waktu untuk memperbaiki dan mengembangkan kondisi eksisting yang telah dicapai. Selain itu memberdayakan armada plasma yang merupakan kapal/perahu nelayan skala kecil untuk mendukung *marine culture*.

Peluang pengembangan perikanan tangkap dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan melakukan pengelolaan pelabuhan perikanan yang tersebar di 19 kabupaten/kota dengan memfasilitasi pelayanan kepada nelayan baik skala besar maupun skala kecil dengan memperhatikan aspek kualitas mutu dan higienisasi sarana prasarana pelabuhan perikanan.

2. Program Perikanan Budidaya :

Indikator Program :

- a. Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan Budidaya tahun 2021 Rp. Rp. 14.474,73 M menjadi Rp. 15.958,39 M tahun 2023**
- b. Produksi Perikanan Budidaya tahun 2021 sebesar 3.898.767,4 ton menjadi 4.298.391,1 ton tahun 2023**
- c. Persentase ketersediaan benur berkualitas 100% per tahun**

Program ini diarahkan untuk mendukung keberhasilan pengembangan komoditas unggulan yaitu udang windu dan rumput laut serta komoditas ikan lainnya dimana dibutuhkan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangan yang diatur dalam UU 23 tahun 2014. Pemerintah provinsi selaku Pembina antar kabupaten/kota akan efektifkan fungsi koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan evaluasi. Adapun dukungan kegiatannya adalah sebagai berikut :

Program ini meliputi kegiatan :

1. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahax Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
 - b. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
 - c. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan
2. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/Atau Tenaga Kerja Asing

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
 - b. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
3. Penerbitan Izin kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai Dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/Atau Tenaga Kerja Asing

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT
 - b. Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT
4. Penerbitan Tanda daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) DI Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Dalam provinsi

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- b. Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

5. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
- c. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- d. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
- e. Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- f. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- g. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi
- h. Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- i. Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Program kegiatan ini adalah kelompok prioritas yang diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan dimana indikatornya fokus pada nilai hilirisasi produk. Program ini diarahkan untuk peningkatan produksi dan optimalisasi hilirisasi produk untuk mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 yaitu Pengembangan Hilirisasi Komoditas Unggulan yaitu **udang windu** dan **rumput laut** dengan melakukan Diseminasi teknologi dan Inovasi berbasis kawasan sampai tahun 2023. Adapun tujuan program adalah (1) Peningkatan Pendapatan, (2) Penyerapan Tenaga Kerja melalui usaha perikanan budidaya, 3) Pemulihan ekonomi pasca bencana alam dan pandemik global. Adapun produksi

komoditas unggulan perikanan budidaya pada tahun awal kondisi tahun 2018 dan 2020 dan rencana tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2021 dilakukan studi kelayakan terkait budidaya laut (*marine culture*) yang ramah lingkungan dan diharapkan dapat diterapkan di beberapa kabupaten/kota pada tahun 2022 dan 2023.

Selain itu Program tersebut diarahkan untuk menumbuh kembangkan industri strategis perikanan di Sulawesi Selatan dengan prioritas usaha adalah agroindustri dan industri yang memiliki keterkaitan industri/pasar didaerah lain termasuk luar negeri, melalui usaha ini akan memicu laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Selain itu dilakukan pengembangan kampung pembudidaya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, kampung ini diharapkan dapat memulihkan Ekonomi masyarakat dengan Corporate Farming dengan membangun Kampung-Kampung Perikanan Budidaya Tawar, Payau Dan Laut seperti *Kampung Lobster, Lele, Nila, Kakap, Kerapu, Rumput Laut, dll*.

Komoditas yang dikembangkan adalah komoditas yang bertumpu pada potensi yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal seperti Rumput Laut, Udang, Bandeng dan komoditas ikan lainnya. Dalam rangka pencapaian target kinerja maka implementasi program, kegiatan dan subkegiatan lebih diarahkan pada:

- a. Diseminasi pengembangan inovasi teknologi budidaya udang windu berbasis Kawasan dan ramah lingkungan dengan kluster pengembangan terbagi atas 3 kluster yaitu 1) Kluster I : Pinrang, Bone, Maros, Takalar, Pangkep, 2) Kluster II : Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Jeneponto, Bulukumba, 3) kluster III : Wajo, Barru, Makassar, Gowa, Sinjai, Selayar, Palopo, Bantaeng.
- b. Pengembangan budidaya rumput laut dengan melakukan pengembangan dari hulu yaitu pengembangan bibit hasil kultur jaringan dan hilir yaitu penanganan pasca panen di 19 kabupaten/kota serta percontohan budidaya laut (*marine culture*) yang ramah lingkungan di kabupaten/kota yang sesuai dengan potensi dan daya dukungnya.
- c. Pengembangan sarana dan prasarana perbenihan untuk produksi benur yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan benur pada program

prioritas dan permintaan masyarakat dalam mengembangkan usaha budidaya payau.

- d. Pengembangan budidaya air tawar sesuai kewenangan provinsi dan pemeliharaan sarpras instalasi Balai Benih Ikan Provinsi dalam rangka peningkatan produksi benih komoditas ikan air tawar dan memenuhi kebutuhan benih dalam rangka pemulihan ekonomi.
- e. Revitalisasi sarana dan prasarana perikanan budidaya payau dan air tawar dalam rangka peningkatan produksi dan pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana alam dan pandemik global.
- f. Pengendalian dan pengelolaan Kesehatan lingkungan budidaya payau, tawar dan laut.
- g. Koordinasi lintas sektor dalam mendukung program prioritas daerah.

Dalam rangka pengembangan komoditas unggulan dan komoditas lain perlu diperhatikan berbagai upaya salah satunya yaitu penguatan kelembagaan, akses permodalan, perluasan jejaring, kerjasama antar pemerintah, institusi, lembaga, swasta dan kemitraan serta mengoptimalkan hilirisasi produk yang dapat memberikan dampak perekonomian daerah.

3. Program Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Indikator Program :

- a. **Produksi garam rakyat tahun 2021 sebesar 46.500 ton menjadi 48.450 ton tahun 2023**
- b. **Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Perikanan tahun 2021 sebesar 50,17 %% menjadi 100% tahun 2023**

Dalam rangka pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil diupayakan pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya **pesisir dan pulau-pulau kecil** yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Program ini diarahkan pada pengembangan pengembangan dan

pengelolaan wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu program yang mendukung penanganan kemiskinan dan kesejahteraan nelayan. Perubahan sosial ekonomi di desa-desa pesisir dan pulau-pulau kecil atau desa nelayan telah memperjelas garis stratifikasi sosial masyarakatnya. Nelayan kecil merupakan lapisan yang paling banyak jumlahnya dimana mereka hidup dalam taraf kemiskinan dan tekanan-tekanan sosial ekonomi yang berakar pada faktor-faktor kompleks yang saling terkait. Salah satu strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran program yaitu meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan.

Adapun dukungan kegiatannya adalah sebagai berikut.

1. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- b. Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- c. Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- d. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Pada program, kegiatan dan sub kegiatan ini diarahkan pada pengembangan usaha garam juga menjadi prioritas pada program hilirisasi perikanan dimana input produksi memberikan dampak hasil yang cukup menjanjikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Potensi pengembangan berada pada 5 kabupaten yaitu kabupaten Jeneponto, kabupaten Takalar, kabupaten Pangkep , Kabupaten Maros dan kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun optimalisasi pengembangan dengan menyediakan fasilitas prasarana seperti gudang garam mini, penerapan teknologi produksi dan penanganan pasca panen. Dalam rangka mendukung industrialisasi garam dilakukan kerjasama lintas sektor dimana peran yang akan dilakukan yaitu dapat menjamin ketersediaan stok/bahan baku garam untuk industrialisasi dan melakukan inovasi produk garam menjadi produk

yang lebih berdaya saing.

4. Program Pengolahan dan Pemasaran Indikator Program :

- a. Nilai Hilirisasi Produk olahan ikan konsumsi dan non konsumsi tahun 2021 sebesar Rp. 304.96 Milyar menjadi Rp. 317,28 Milyar tahun 2023**
- b. Produksi olahan ikan konsumsi dan non konsumsi tahun 2021 sebesar 5.329,0 ton menjadi 5.544,1 ton tahun 2023**
- c. Persentase pembinaan mutu produk perikanan tahun 2021 sebesar 60% per tahun menjadi 100% tahun 2023**

Tahun 2021 – 2023 akan dilakukan upaya untuk mendukung hilirisasi produk perikanan dan melanjutkan kegiatan tahun sebelumnya. Dalam rangka peningkatan konsumsi ikan pada masyarakat untuk menghadapi masa pandemik dan menumbuhkan kembali usaha unit pengolah yang tahun 2020 mengalami masa sulit dalam berusaha akibat pandemik global maka optimalisasi pengembangan yang perlu dilakukan yaitu dengan melakukan fasilitasi bimbingan, pembinaan dan revitalisasi sarana prasarana pengolahan dan pemasaran dalam mendukung bahan baku industri serta melakukan inovasi olahan produk perikanan. Adapun dukungan kegiatan pada program ini adalah sebagai berikut :

- 1. Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**
- b. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**
- c. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**

2. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
- b. Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing

3. Penyediaan dan Penyaluran Bahan baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- b. Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- c. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran diarahkan pada program hilirisasi perikanan dengan melakukan inovasi produk pengolahan agar produk perikanan memiliki nilai tambah produk sehingga memberikan dampak hasil yang cukup menjanjikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu program ini mendukung pencapaian indikator SDGs untuk penurunan stunting dan pemulihan ekonomi. Selain itu dalam rangka mendukung industrialisasi, akan dilakukan pemetaan dan pemantauan bahan baku usaha pengolahan, pengujian sampel mutu produk, dan pengembangan informasi manajemen logistik ikan secara digitalisasi.

Tujuan : Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan

perikanan secara berdaya saing tanpa mengabaikan kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup

Sasaran : Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan

Didukung oleh program :

Program Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Indikator Program :

- a. Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan tahun 2021 sebesar 67,29% (674.229,5 Ha) menjadi 67,31% (674.339,5 Ha) tahun 2023**
- b. Cakupan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tahun 2021 sebesar 60 % menjadi 100% tahun 2023**

Program pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil diarahkan pada upaya pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya agar dapat menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Usaha tersebut sebagai perwujudan bagi Sulawesi Selatan sebagai Entitas Sosial Ekonomi yang berkeadilan. Tujuan yang dapat dicapai adalah untuk meningkatkan daya tarik wilayah terhadap investor termasuk kunjungan wisata dan sekaligus juga dapat memberi iklim yang kondusif bagi Sulawesi Selatan dalam pengembangan kegiatan konservasi sumberdaya Kelautan dan Perikanan serta mendukung penurunan/emisi karbon.

Pada program pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki kegiatan sebagai berikut :

1. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
 - b. Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
 - c. Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional
 - d. Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir
 - e. Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut
2. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- b. Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
- c. Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- d. Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Adapun upaya yang dilakukan pada subkegiatan adalah

- a. Melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan.
- b. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil
- c. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan

- d. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dan inovasi pemanfaatan dan pengelolaan.
- e. Penyusunan kebijakan tentang pengaturan serta prosedur administrasi penggunaan sumber daya yang diizinkan dan yang dilarang
- f. Pemanfaatan sumber daya sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan terakomodasikannya pertimbangan-pertimbangan hasil konsultasi publik dalam penetapan tujuan pengelolaan Kawasan serta revisi terhadap penetapan tujuan dan perizinan
- g. Mekanisme pelaporan yang teratur dan sistematis untuk menjamin tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat diakses
- h. Ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih untuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedurnya.
- i. Pengembangan Wisata Bahari dan pengembangan kawasan konservasi dan ekosistem pesisir dengan integrasi pengembangan lintas sektor serta edukasi kepada masyarakat.
- j. Menumbuh kembangkan kelompok-kelompok masyarakat untuk mendukung kelestarian kawasan konservasi dan melakukan pembinaan kelompok.

Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Indikator Program :

Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku tahun 2021 sebesar 87,48% menjadi 89,85% tahun 2023

Pada program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk memelihara dan melindungi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan, terutama Sumberdaya yang telah mengalami degradasi tingkat produktivitasnya. Upaya yang dapat dilakukan dalam mendukung program yaitu melalui pemberdayaan masyarakat dalam memelihara dan melindungi sumberdaya perikanan dan kelautan dengan membentuk system pengawasan berbasis masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana pengawasan

hususnya untuk pengawasan destructive fishing, illegal fishing, pengamanan sumberdaya ikan dan lingkungan, penataan dan penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana perikanan. Program ini juga diarahkan untuk penguatan kelembagaan organisasi masyarakat lokal sebagai upaya strategis dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dengan meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Program ini memiliki kegiatan sebagai berikut :

1. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil
- b. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil
- c. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil
- d. Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

2. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya
- b. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya
- c. Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Usaha yang dapat dilakukan dalam mendukung kegiatan yaitu :

1. Patroli dalam rangka pengawasan baik di laut, perairan umum dan darat serta koordinasi dan pengawasan terpadu bersama aparat terkait

dalam rangka melakukan penindakan jika terjadi pelanggaran dan penanganan kasus.

2. Kerjasama antar pemerintah pusat, kabupaten/kota maupun provinsi lain dalam rangka pengawasan wilayah laut dan perairan umum.
3. Sosialisasi kepada pelaku usaha perikanan terhadap larangan penggunaan bahan dan alat tangkap yang dapat merusak sumberdaya perikanan.
4. Intensifikasi pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan bahan terlarang untuk penanganan hasil perikanan
5. Pelatihan kesadaran masyarakat dalam rangka pengendalian kerusakan lingkungan sumberdaya perikanan
6. Menumbuh kembangkan kelompok-kelompok masyarakat Pengawas Perikanan disetiap daerah dan melakukan pembinaan
7. Himbauan dan larangan terhadap pengambilan terumbu karang dan biota - biota tertentu yang dianggap telah hampir punah.
8. Melalui usaha tersebut diatas, maka diharapkan tingkat kerusakan sumberdaya perikanan dan kelautan berkurang dan terjadi peningkatan produktivitas tangkapan ikan.

Untuk kelancaran dan dukungan operasional kegiatan maka terdapat Program Penunjang untuk mendukung Program Utama yaitu :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Indikator Program :

- a. Persentase realisasi kegiatan perangkat daerah
- b. Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan Sangat baik
- c. Persentase penurunan temuan berdasarkan LHP

Pada program ini akan dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

Adapun sub kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

Adapun sub kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. *Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*

Adapun sub kegiatan :

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
- d. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- e. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- f. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- g. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

4. *Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah*

Adapun sub kegiatan :

- a. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

- b. Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
- c. Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
- d. Pengolahan Data Retribusi Daerah
- e. Penetapan Wajib Retribusi Daerah
- f. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

5. *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*

Adapun sub kegiatan :

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- c. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- d. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- e. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- f. Pemulangan Pegawai yang Pensiun
- g. Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
- h. Pemindahan Tugas ASN
- i. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- j. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- k. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

6. *Administrasi Umum Perangkat Daerah*

Adapun sub kegiatannya :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- g. Penyediaan Bahan/Material
- h. Fasilitas Kunjungan Tamu
- i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- j. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

- k. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

7. *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*

Adapun sub kegiatannya :

- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pengadaan Alat Besar
- d. Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
- e. Pengadaan Mebel
- f. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- g. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- h. Pengadaan Aset Tak Berwujud
- i. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- j. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- k. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

8. *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

Adapun sub kegiatannya :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

9. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

Adapun sub kegiatannya :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
- d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
- e. Pemeliharaan Mebel
- f. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- g. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- h. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- i. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- j. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- k. Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah

Berdasarkan penetapan pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam bentuk rencana aksi untuk mendukung pencapaian visi dan misi maka indikator sasaran pembangunan kelautan dan perikanan yang hendak dicapai selama kurun waktu 5 tahun mendatang rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 6.2. yang bersumber dari Tabel T-C.27 .

Tabel 6.2

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Unit Kerja Penanggung Jawab dan Lokasi Kegiatan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Tujuan	Sasaran	Indikat or Sasara n	Kode					Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Data Capai an pada Tahun Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan										OPD Penanggung Jawab		
											Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
											Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			0	00	X.X X.0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP		0 %	0. 00	0 %	0.00	0 %	31,559 ,241,595. 00	0 %	36,421 ,961,970. 40	0 %	38,481,9 33,539.62	0 %	106,46 3,137,10 5.02	Dinas Kelautan dan Perikanan
				0 0	X .XX. 01	X .XX. 01.1 .01		X.XX.01.1.01 XXX Perencanaan Penganggara n dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0	0. 00	0	0.00	0	809,53 1,668.00	0	850,00 8,251.40	0	892,508, 663.97	0	2,552, 048,583. 37	Dinas Kelautan dan Perikanan
				0 0	X .XX. 01	X .XX. 01.1 .01	X. XX.0 1.1. 01.0 1	XXX Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (Dokumen)	15	0 Doku men	0. 00	0 Doku men	0.00	15 Doku men	112,36 5,500.00	15 Dokum en	117,98 3,775.00	15 Dokumen	123,882, 963.75	45 Dokum en	354,23 2,238.75	Dinas Kelautan dan Perikanan

(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			0	X	X	X	XXX	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun dan terkoordinasi (Dokumen)	48	0	0	0	0.0	48	56,58 8,500.0	48	59,41 7,925.0	48	62,388 ,821.25	144	178,3 95,246.25	Dinas Kelautan dan Perikanan
			0	.XX .01	.XX .01 1.0 1	.XX .01 1.0 2	XXX	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	30	0	0	0	0.0	30	14,79 7,500.0	30	15,53 7,375.0	30	16,314 ,243.75	90	46,64 9,118.75	Dinas Kelautan dan Perikanan
			0	.XX .01	.XX .01 1.0 1	.XX .01 1.0 4	XXX	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	30	0	0	0	0.0	30	25,36 0,000.0	30	26,62 8,000.0	30	27,959 ,400.00	30	79,94 7,400.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
			0	.XX .01	.XX .01 1.0 1	.XX .01 1.0 5	XXX	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	30	0	0	0	0.0	30	23,75 7,000.0	30	24,94 4,850.0	30	26,192 ,092.50	90	74,89 3,942.5	Dinas Kelautan dan Perikanan
			0	.XX .01	.XX .01 1.0 1	.XX .01 1.0 6	XXX	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	0	0	0	0.0	10	539,8 36,668.00	10	566,8 28,501.40	10	595,16 9,926.47	30	1,701 ,835,095.87	Dinas Kelautan dan Perikanan
			0					Jumlah data dan Informasi (Laporan) Jumlah Data Yang	2	0	0	0	0.0	2		2		2	6	18		
			0						6	0	0	0	0.0	6		6		6	18			

				0	X	X	X	XXX	Dipublikasikan (Jenis)	12	0	0	0	0.0	12	36,82	12	38,66	12	40,601	36	116,0	Dinas
				0	.XX .01	.XX .01 1.0 1	.XX .01 1.0 1.0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)		Doku men	.00	Doku men	0	Doku men	6,500.0 0	Doku men	7,825.0 0	Dokume n	,216.25	Doku men	95,541. 25	Kelautan dan Perikanan
				0	X	X		X.XX.01.1.02			0	0	0	0.0	0	25,60	0	28,04	0	29,447	0	83,09	Dinas
				0	.XX .01	.XX .01 1.0 2		02 XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			.00	.00	0	0	0	4,108,2 04.00	0	0,084,6 06.40		,343,067. 04		1,535,8 77.44	Kelautan dan Perikanan
				0	X	X	X	XXX	Jumlah	12	0	0	0	0.0	12	25,45	12	27,82	12	29,216	36	82,50	Dinas
				0	.XX .01	.XX .01 1.0 2	.XX .01 1.0 2.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	laporan Gaji dan Tunjangan ASN yang terkoordinasi dan tepat waktu (Laporan)		Lapor an	.00	Lapo ran	0	Lapo ran	9,573,4 36.00	Lapora n	5,000,0 00.00	Laporan	,250,000. 00	Lapora n	0,823,4 36.00	Kelautan dan Perikanan
				0	X	X	X	XXX	Jumlah		0	0	0	0.0	0	0.00	4	10,00	4	11,000	8	21,00	Dinas
				0	.XX .01	.XX .01 1.0 2	.XX .01 1.0 2.0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	laporan Administrasi pelaksanaan tugas ASN yang terverifikasi (Laporan)		Lapor an	.00	Lapo ran	0	Lapo ran		Lapora n	0,000.0 0	Laporan	,000.00	Lapora n	0,000.0 0	Kelautan dan Perikanan
				0	X	X	X	XXX	Jumlah	12	0	0	0	0.0	12	56,98	12	59,83	12	65,818	36	182,6	Dinas
				0	.XX .01	.XX .01 1.0 2	.XX .01 1.0 2.0 3	Pelaksanaan Penatausaha an dan PengujianVer ifikasi Keuangan SKPD	laporan penatausahaan dan pengujian/verifi kasi keuangan SKPD yang dilaksanakan (Laporan)		Lapor an	.00	Lapo ran	0	Lapo ran	5,768.0 0	Lapora n	5,056.4 0	Laporan	,562.04	Lapora n	39,386. 44	Kelautan dan Perikanan
				0	X	X	X	XXX	Jumlah	12	0	0	0	0.0	0	0.00	12	48,32	12	53,155	36	101,4	Dinas
				0	.XX .01	.XX .01 1.0 2	.XX .01 1.0 2.0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	laporan akuntansi SKPD yang dilaksanakan		Lapor an	.00	Lapo ran	0	Lapo ran		Lapora n	3,100.0 0	Laporan	,410.00	Lapora n	78,510. 00	Kelautan dan Perikanan

						4	SKPD	dan telah terkoordinasi (Laporan)															
				00	X.XX.01	X.XX.01.1.02	X.XX.01.1.02.05	XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang dilaksanakan dan telah terkoordinasi (Laporan)	1	0Laporan	0.00	0Laporan	0.00	1Laporan	2,895,000.00	1Laporan	3,039,750.00	1Laporan	3,343,725.00	3Laporan	9,278,475.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
				00	X.XX.01	X.XX.01.1.02	X.XX.01.1.02.06	XXX Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan dan dikelola (Laporan)	1	0Laporan	0.00	0Laporan	0.00	1Laporan	38,632,000.00	1Laporan	40,563,600.00	1Laporan	44,619,960.00	3Laporan	123,815,560.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
				00	X.XX.01	X.XX.01.1.02	X.XX.01.1.02.07	XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun dan telah terkoordinasi (Laporan)	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun dan telah terkoordinasi (Laporan)	18	0Laporan	0.00	0Laporan	0.00	18Laporan	46,022,000.00	18Laporan	48,323,100.00	18Laporan	53,155,410.00	54Laporan	147,500,510.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
				00	X.XX.01	X.XX.01.1.02	X.XX.01.1.02.08	XXX Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan analisis prognosis anggaran yang telah disusun (Laporan)		0Laporan	0.00	0Laporan	0.00	0Laporan	0.00	1Laporan	5,000,000.00	2Laporan	0.00	0Laporan	5,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
				00	X.XX.01	X.XX.01.1.03		X.XX.01.1.03 XXX Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	35,000,000.00	0	38,500,000.00	0	73,500,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
				00	X.XX	X.XX	X.XX	XXX Penyusunan	Jumlah laporan	1	0Lapor	0.00	0Lapo	0.00	0Lapo	0.00	1Lapora	5,000,000.00	1Laporan	5,500,000.00	2Lapora	10,500,000.0	Dinas Kelautan

					.01	.01. 1.0 3	01. 1.0 3.0 1	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	penyusunan perencanaan kebutuhan Barang Milik SKPD (Laporan)		an		ran		ran		n			n	0	dan Perikanan	
				0 0	X .XX .01	X .XX .01. 1.0 3	X .XX. 01. 1.0 3.0 2	XXX Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	0 Lapor an	0 .00	0 Lapo ran	0.0 0	0 Lapo ran	0.00	1 Lapora n	5,000 ,000.00	1 Laporan	5,500, 000.00	2 Lapora n	10,50 0,000.0 0	Dinas Kelautan dan Perikanan
				0 0	X .XX .01	X .XX .01. 1.0 3	X .XX. 01. 1.0 3.0 3	XXX Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	0 Lapor an	0 .00	0 Lapo ran	0.0 0	0 Lapo ran	0.00	1 Lapora n	5,000 ,000.00	1 Laporan	5,500, 000.00	2 Lapora n	10,50 0,000.0 0	Dinas Kelautan dan Perikanan
				0 0	X .XX .01	X .XX .01. 1.0 3	X .XX. 01. 1.0 3.0 4	XXX Pembinaan Pengawasan dan Pengendalia n Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)		0 lapor an	0 .00	0 lapor an	0.0 0	0 lapor an	0.00	1 lapora n	5,000 ,000.00	1 laporan	5,500, 000.00	2 lapora n	10,50 0,000.0 0	Dinas Kelautan dan Perikanan
				0 0	X .XX .01	X .XX .01. 1.0 3	X .XX. 01. 1.0 3.0 5	XXX Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	0 Lapor an	0 .00	0 Lapo ran	0.0 0	0 Lapo ran	0.00	1 Lapora n	5,000 ,000.00	1 Laporan	5,500, 000.00	2 Lapora n	10,50 0,000.0 0	Dinas Kelautan dan Perikanan
				0 0	X .XX .01	X .XX .01. 1.0 3	X .XX. 01. 1.0 3.0 6	XXX Penatausaha an Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	0 Lapor an	0 .00	0 Lapo ran	0.0 0	0 Lapo ran	0.00	1 Lapora n	5,000 ,000.00	1 Laporan	5,500, 000.00	2 Lapora n	10,50 0,000.0 0	Dinas Kelautan dan Perikanan

				0	X	X	X	XXX	(Laporan)		0	0	0	0.0	0	0.00	1	5,000	1	5,500,	2	10,50	Dinas
				0	.XX	.XX	.XX	Pemanfaatan	Jumlah		Lapor	.00	Lapo	0	Lapo		Lapora	,000.00	Laporan	,000.00	Lapora	0,000.0	Kelautan
					.01	.01.	1.0	Barang Milik	laporan		an		ran		ran		n					dan	
						3	3.0	Daerah SKPD	Pemanfaatan													Perikanan	
						7	7	SKPD	Barang Milik														
								(Laporan)	Daerah SKPD														
				0	X	X		X.XX.01.1.			0	0	0	0.0	0	0.00	0	20,00	0	21,000	0	41,00	Dinas
				0	.XX	.XX		04 XXX			.00	.00		0			0,000.0		,000.00		0,000.0	Kelautan	
					.01	.01.	1.0	Administrasi									0				0	dan	
						4	4	Pendapatan														Perikanan	
								Kewenanga															
								n Perangkat															
								Daerah															
				0	X	X	X	XXX	Jumlah	1	0	0	0	0.0	0	0.00	1	10,00	1	10,500	3	20,50	Dinas
				0	.XX	.XX	.XX	Perencanaan	laporan		Lapor	.00	Lapo	0	Lapo		Lapora	0,000.0	Laporan	,000.00	Lapora	0,000.0	Kelautan
					.01	.01.	1.0	Pengelolaan	perencanaan													dan	
						4	1.0	Retribusi	pengelolaan													Perikanan	
						4	4.0	Daerah	Retribusi														
							1	(Laporan)	Daerah														
				0	X	X	X	XXX Analisa	Jumlah laporan		0	0	0	0.0	0	0.00	1	10,00	1	10,500	3	20,50	Dinas
				0	.XX	.XX	.XX	dan	analisa		Lapor	.00	Lapo	0	Lapo		Lapora	0,000.0	Laporan	,000.00	Lapora	0,000.0	Kelautan
					.01	.01.	1.0	Pengembang	pengembangan													dan	
						4	1.0	an Retribusi	Retribusi													Perikanan	
						4	4.0	Daerah serta	daerah serta														
							2	Penyusunan	penyusunan														
								Kebijakan	kebijakan														
								Retribusi	retribusi daerah														
								Daerah	(Laporan)														
				0	X	X		X.XX.01.1.05			0	0	0	0.0	0	125,1	0	537,3	0	588,62	0	1,251	Dinas
				0	.XX	.XX		XXX			.00	.00			37,912.		84,807.		3,288.36		,146.00	Kelautan	
					.01	.01.	1.0	Administrasi							00		60				7.96	dan	
						5	5	Kepegawaia														Perikana	
								n Perangkat													n		
								Daerah															
				0	X	X	X	XXX	Jumlah		0	0	0	0.0	0	0.00	2	50,00	2 unit	52,500	4	102,5	Dinas
				0	.XX	.XX	.XX	Peningkatan	sarana dan		unit	.00	unit	0	unit		0,000.0		,000.00		00,000.	Kelautan	
					.01	.01.	1.0	Sarana dan	prasarana								0				00	dan	
						5	1.0	Prasarana	disiplin pegawai													Perikana	
						5	5.0	Disiplin	(unit)													n	
							1	Pegawai															

				0 0	X .XX .01	X .XX .01 1.0 5	X .XX .01 1.0 5.0 2	XXX Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan nya	Jumlah pakaian dinas beserta atributnya (Pasang)	20 5	0 Pasa ng	0 .00	0 Pasa ng	0.0 0	0 Pasa ng	0.00	209 Pasan g	182,4 90,000. 00	209 Pasang	200,73 9,000.00	627 Pasan g	383,2 29,000. 00	Dinas Kelautan dan Perikana n
				0 0	X .XX .01	X .XX .01 1.0 5	X .XX .01 1.0 5.0 3	XXX Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pendataan Administrasi kepegawaian yang diolah (Laporan)	12	0 Lapor an	0 .00	0 Lapo ran	0.0 0	12 Lapo ran	37,99 0,512.0 0	12 Lapora n	39,89 0,037.6 0	12 Laporan	43,879 ,041.36	36 Lapora n	121,7 59,590. 96	Dinas Kelautan dan Perikana n
				0 0	X .XX .01	X .XX .01 1.0 5	X .XX .01 1.0 5.0 4	XXX Koordinasi dan Pelaksanaaa n Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan data sistem informasi kepegawaian yang telah dikoordinasi (Laporan)		0 Lapor an	0 .00	0 Lapo ran	0.0 0	12 Lapo ran	26,85 7,400.0 0	12 Lapora n	28,20 0,270.0 0	12 Laporan	31,020 ,297.00	36 Lapora n	86,07 7,967.0 0	Dinas Kelautan dan Perikana n
				0 0	X .XX .01	X .XX .01 1.0 5	X .XX .01 1.0 5.0 5	XXX Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Laporan)	12	0 Lapor an	0 .00	0 Lapo ran	0.0 0	12 Lapo ran	60,29 0,000.0 0	12 Lapora n	63,30 4,500.0 0	12 Laporan	69,634 ,950.00	36 Lapora n	193,2 29,450. 00	Dinas Kelautan dan Perikana n
				0 0	X .XX .01	X .XX .01 1.0 5	X .XX .01 1.0 5.0 9	XXX Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan diklat pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang telah diikuti (Laporan)	1	0 Lapor an	0 .00	0 Lapo ran	0.0 0	0 Lapo ran	0.00	3 Lapora n	157,5 00,000. 00	3 Laporan	173,25 0,000.00	9 Lapora n	330,7 50,000. 00	Dinas Kelautan dan Perikana n
				0 0	X .XX .01	X .XX .01 1.0 5	X .XX .01 1.0 5.1	XXX Sosialisasi Peraturan PerundangU ndangan	Jumlah peserta Sosialisasi peraturan perundang-		0 Oran g	0 .00	0 Oran g	0.0 0	0 Oran g	0.00	100 Orang	8,000 ,000.00	100 Orang	8,800, 000.00	250 Orang	16,80 0,000.0 0	Dinas Kelautan dan Perikana

						0		undangan (Orang)														n
				0	X	X	XXX	Jumlah		0	0	0	0.0	0	0.00	100	8,000	100	8,800,	200	16,80	Dinas
				0	.XX	.XX	Bimbingan	peserta Bimtek		Oran	.00	Oran	0	Oran	Orang	,000.00	Orang	000.00	Orang	0,000.0	Kelautan	
					.01	.01.	Implementasi	Implementasi													dan	
						1.0	Peraturan	Peraturan													Perikana	
						5	PerundangU	Perundang-Undangan													n	
						1	undangan	(Orang)														
				0	X	X	X.XX.01.1.			0	0	0	0.0	0	1,032	0	1,192	0	1,251,	0	3,476	Dinas
				0	.XX	.XX	06 XXX				.00		0		,917,10		,209,30		819,770.2		,946,17	Kelautan
					.01	.01.	Administrasi								0.00		5.00		5		5.25	dan
						6	Umum														Perikana	
							Daerah														n	
				0	X	X	XXX	Jumlah	5	0	0	0	0.0	0	0.00	10	52,50	10	55,125	30	107,6	Dinas
				0	.XX	.XX	Penyediaan	komponen	Jenis	Jenis	Jenis	Jenis	Jenis	Jenis	Jenis	Jenis	Jenis	Jenis	Jenis	Jenis	Jenis	Kelautan
					.01	.01.	Komponen	instalasi listrik													dan	
						1.0	Instalasi	yang tersedia													Perikana	
						6	ListrikPenera	(Jenis)													n	
						1	ngan															
							Bangunan															
							Kantor															
				0	X	X	XXX	Jumlah	10	0	0	0	0.0	30	863,0	30	906,1	30	951,46	90	2,720	Dinas
				0	.XX	.XX	Penyediaan	Peralatan dan	Unit	.00	Unit	Unit	Unit	Unit	04,100.	Unit	54,305.	Unit	2,020.25	Unit	,620,42	Kelautan
					.01	.01.	Peralatan	perlengkapan							00		00				5.25	dan
						1.0	dan	kantor yang													Perikana	
						6	Perlengkap	tersedia (Unit)													n	
						2	n Kantor															
				0	X	X	XXX	Jumlah	20	0	0	0	0.0	20	89,10	200	93,55	200	98,232	600	280,8	Dinas
				0	.XX	.XX	Penyediaan	penggandaan	0	lamb	.00	lamb	0	0	0,000.0	lamb	5,000.0	lamb	,750.00	lamb	87,750.	Kelautan
					.01	.01.	Barang	Dinas Kelautan													dan	
						1.0	Cetakan dan	dan Perikanan													Perikana	
						6	Penggandaa	yang tersedia													n	
							n	(lamb)														
						5		Jumlah	40	0	0	0	0.0	40	40	40	40	40	120	120		
								barang cetakan	Jenis	Jenis	Jenis	Jenis	Jenis	Jenis	Jenis	Jenis	Jenis	Jenis	Jenis	Jenis	Jenis	
								kantor Dinas	cetak	cetak	cetak	cetak	cetak	cetak	cetak	cetak	cetak	cetak	cetak	cetak	cetak	
								Kelautan dan	an	an	an	an	an	an	an	an	an	an	an	an	an	
								Perikanan yang														
								tersedia (Jenis														
								cetakan)														

				0 0	X .XX .01	X .XX .01 1.0 6	X .XX .01 1.0 6.0 8	XXX Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi (Orang)		0 Oran g	0 .00	0 Oran g	0.0 0	15 0 Oran g	80,81 3,000.0 0	150 Orang	105,0 00,000. 00	150 Orang	110,25 0,000.00	450 Orang	296,0 63,000. 00	Dinas Kelautan dan Perikana n
				0 0	X .XX .01	X .XX .01 1.0 6	X .XX .01 1.0 6.1 0	XXX Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis pada SKPD yang ditatausahakan (Jenis)		0 Jenis	0 .00	0 Jenis	0.0 0	0 Jenis	0.00	1 Jenis	5,000 ,000.00	1 Jenis	5,250, 000.00	2 Jenis	10,25 0,000.0 0	Dinas Kelautan dan Perikana n
				0 0	X .XX .01	X .XX .01 1.0 6	X .XX .01 1.0 6.1 1	XXX Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah an Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikeloa SKPD (Jenis)		0 Jenis	0 .00	0 Jenis	0.0 0	0 Jenis	0.00	1 Jenis	30,00 0,000.0 0	1 Jenis	31,500 ,000.00	2 Jenis	61,50 0,000.0 0	Dinas Kelautan dan Perikana n
				0 0	X .XX .01	X .XX .01 1.0 6		X.XX.01.1. 06 XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah			0 .00	0 .00	0 .00	0.0 0	0	599,9 95,000. 00	0	660,5 00,000. 00	0	693,52 5,000.00	0	1,954 ,020,00 0.00	Dinas Kelautan dan Perikana n
				0 0	X .XX .01	X .XX .01 1.0 6	X .XX .01 1.0 6.0 3	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang telah tersedia (unit)	3	0 unit	0 .00	0 unit	0.0 0	10 unit	10,00 0,000.0 0	10 unit	10,50 0,000.0 0	10 unit	11,025 ,000.00	30 unit	31,52 5,000.0 0	Dinas Kelautan dan Perikana n
				0 0	X .XX .01	X .XX .01 1.0 6	X .XX .01 1.0 6.0 9	XXX Penyelenga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah peserta rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dihadiri (orang)	10 000	0 orang	0 .00	0 oran g	0.0 0	10 000 oran g	589,9 95,000. 00	100 00 orang	630,0 00,000. 00	1000 0 orang	661,50 0,000.00	30 orang	1,881 ,495,00 0.00	Dinas Kelautan dan Perikana n
				0 0	X .XX .01	X .XX .01		X.XX.01.1. 07 XXX			0 .00	0 .00	0 .00	0.0 0	0	0.00	0	850,0 00,000.	0	1,100, 000,000.0	0	1,950 ,000,00	Dinas Kelautan

					.01	.01. 1.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								00		0		0.00		dan Perikana n	
				0 0	X .XX .01	X .XX .01. 1.0 7	X .XX. 01. 1.0 7.0 1	XXX Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang telah diadakan Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang telah diadakan (unit)		0 unit	0 .00	0 unit	0.0 0	0 unit	0.00	1 unit	750,0 00,000. 00	0 unit	0.00	1 unit	750,0 00,000. 00	Dinas Kelautan dan Perikana n
				0 0	X .XX .01	X .XX .01. 1.0 7	X .XX. 01. 1.0 7.0 2	XXX Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang telah diadakan (Unit)		0 Unit	0 .00	0 Unit	0.0 0	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	1 Unit	350,00 0,000.00	1 Unit	350,0 00,000. 00	Dinas Kelautan dan Perikana n
				0 0	X .XX .01	X .XX .01. 1.0 7	X .XX. 01. 1.0 7.0 5	XXX Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang telah diadakan (Unit)		0 Unit	0 .00	0 Unit	0.0 0	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	5 Unit	50,000 ,000.00	5 Unit	50,00 0,000.0 0	Dinas Kelautan dan Perikana n
				0 0	X .XX .01	X .XX .01. 1.0 7	X .XX. 01. 1.0 7.0 8	XXX Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang telah diadakan (Jenis)		0 Jenis	0 .00	0 Jenis	0.0 0	0 Jenis	0.00	1 Jenis	100,0 00,000. 00	1 Jenis	100,00 0,000.00	2 Jenis	200,0 00,000. 00	Dinas Kelautan dan Perikana n
				0 0	X .XX .01	X .XX .01. 1.0 7	X .XX. 01. 1.0 7.1 0	XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang telah diadakan (unit)		0 unit	0 .00	0 unit	0.0 0	0 unit	0.00	0 unit	0.00	3 unit	400,00 0,000.00	3 unit	400,0 00,000. 00	Dinas Kelautan dan Perikana n

				0 0	X .XX .01	X .XX .01 1.0 7	X .XX .01 1.0 7.1 1	XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang telah diadakan (unit)		0 unit	0 .00	0 unit	0.0 0	0 unit	0.00	0 unit	0.00	2 unit	200,00 0,000.00	2 unit	200,0 00,000. 00	Dinas Kelautan dan Perikana n
				0 0	X .XX .01	X .XX .01 1.0 8		X.XX.01.1.08 XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah			0	0 .00	0	0.0 0	0	2,582 ,760,22 1.00	0	2,965 ,000,00 0.00	0	3,113, 250,000.0 0	0	8,661 ,010,22 1.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
				0 0	X .XX .01	X .XX .01 1.0 8	X .XX .01 1.0 8.0 1	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa Surat menyurat yang telah tersedia (Bulan)		0 Bulan	0 .00	0 Bula n	0.0 0	0 Bula n	0.00	12 Bulan	10,00 0,000.0 0	12 Bulan	10,500 ,000.00	24 Bulan	20,50 0,000.0 0	Dinas Kelautan dan Perikanan
				0 0	X .XX .01	X .XX .01 1.0 8	X .XX .01 1.0 8.0 2	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang telah tersedia (Bulan)		0 Bulan	0 .00	0 Bula n	0.0 0	12 Bula n	1,082 ,134,99 7.00	12 Bulan	1,260 ,000,00 0.00	12 Bulan	1,323, 000,000.0 0	36 Bulan	3,665 ,134,99 7.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
				0 0	X .XX .01	X .XX .01 1.0 8	X .XX .01 1.0 8.0 3	XXX Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengka n Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang telah tersedia (Jenis)		0 Jenis	0 .00	0 Jenis	0.0 0	0 Jenis	0.00	3 Jenis	15,00 0,000.0 0	3 Jenis	15,750 ,000.00	6 Jenis	30,75 0,000.0 0	Dinas Kelautan dan Perikanan
				0 0	X .XX .01	X .XX .01 1.0 8	X .XX .01 1.0 8.0 4	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor (Orang)		0 Oran g	0 .00	0 Oran g	0.0 0	14 7 Oran g	1,500 ,625,22 4.00	147 Orang	1,680 ,000,00 0.00	147 Orang	1,764, 000,000.0 0	441 Orang	4,944 ,625,22 4.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
				0	X	X		X.XX.01.1.09			0	0.	0	0.00	0	804,79	0	1,271,	0	1,335,36	0	3,411,	Dinas

				0	.XX. 01	.XX. 01.1 .09		XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				00				1,490.00		775,000. 00		3,750.00		930,240. 00	Kelautan dan Perikanan
				0 0	X .XX. 01	X .XX. 01.1 .09	X. XX.0 1.1. 09.0 1	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara dan bebas pajak (Unit)		0 Unit	0. 00	0 Unit	0.00	16 Unit	251,74 1,850.00	16 Unit	26,775 ,000.00	16 Unit	28,113,7 50.00	48 Unit	306,63 0,600.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
				0 0	X .XX. 01	X .XX. 01.1 .09	X. XX.0 1.1. 09.0 2	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang terpelihara dan bebas pajak (unit)		0 unit	0. 00	0 unit	0.00	8 unit	48,859 ,000.00	8 unit	52,500 ,000.00	8 unit	55,125,0 00.00	24 unit	156,48 4,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
				0 0	X .XX. 01	X .XX. 01.1 .09	X. XX.0 1.1. 09.0 8	XXX Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang terpelihara (Unit)		0 Unit	0. 00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	1 Unit	52,500 ,000.00	1 Unit	55,125,0 00.00	3 Unit	107,62 5,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
				0 0	X .XX. 01	X .XX. 01.1 .09	X. XX.0 1.1. 09.0 9	XXX PemeliharaanR ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang terpelihara/direha bilitasi (Unit)		0 Unit	0. 00	0 Unit	0.00	2 Unit	504,19 0,640.00	2 Unit	840,00 0,000.00	16 Unit	882,000, 000.00	20 Unit	2,226, 190,640. 00	Dinas Kelautan dan Perikanan
				0 0	X .XX. 01	X .XX. 01.1 .09	X. XX.0 1.1. 09.1 0	XXX PemeliharaanR ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara/direha bilitasi (Unit)		0 Unit	0. 00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	20 Unit	200,00 0,000.00	20 Unit	210,000, 000.00	40 Unit	410,00 0,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan

				0 0	X .XX. 01	X .XX. 01.1 .09	X. XX.0 1.1. 09.1 1	Lainnya XXX PemeliharaanR ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara/direha bilitasi (Unit)		0 Unit	0. 00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	20 Unit	100,00 0,000.00	20 Unit	105,000, 000.00	40 Unit	205,00 0,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			3	2 5	3.2 5.0 2			PROGRA M PENGELO L AAN KELAUTAN PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL	Produksi garam rakyat Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Perikanan Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	14 0.338 ,9 ton 4,3 5%	0 Ton 0 %	0 .00 0 %	0 Ton 0 %	0.0 0 0 %	0 Ton 0 %	10,85 7,763,8 52.00	0 Ton 0 %	14,12 1,000,0 00.00	0 Ton 0 %	14,827 ,050,000. 00	0 Ton 0 %	39,80 5,813,8 52.00	Dinas Kelautan dan Perikana n
				2 5	3 .25. 02	3 .25. 02. 1.0 1		3.25.02.1. 01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			0 0 %	0 .00 0 %	0 0 %	0.0 0 0 %	0 0 %	9,713 ,678,58 4.00	0 0 %	12,70 5,000,0 00.00	0 0 %	13,340 ,250,000. 00	0 0 %	35,75 8,928,5 84.00	Dinas Kelautan dan Perikana n
				2 5	3 .25. 02	3 .25. 02. 1.0 1	3 .25. 02. 1.0 2	Pengelola an Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Berdasarkan Penetapan	Jumlah sarana dan prasarana kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil (Unit)		0 Unit	0 .00	0 Unit	0.0 0	2 Unit	439,0 00,000. 00	2 Unit	525,0 00,000. 00	2 Unit	551,25 0,000.00	6 Unit	1,515 ,250,00 0.00	Dinas Kelautan dan Perikana n

								dari Pemerintah Pusat	Jumlah Kelompok Konservasi yang dibentuk dan dibina (Kelompok)		0 Kelo mpok	0 Kelo mpok		7 Kelo mpok		7 Kelom pok		7 Kelomp ok		21 Kelom pok		
									Jumlah Dokumen Peetapan Pencadangan Kawasan (Dokumen)		0 Doku men	0 Doku men		3 Doku men		3 Doku men		3 Dokume n		9 Doku men		
									Jumlah Regulasi Konservasi dan Penataan Ruang Laut (Regulasi)		0 Regul asi	0 Regu lasi		3 Regu lasi		3 Regul asi		3 Regulas i		9 Regul asi		
									Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Rencana Aksi WP3K (dokumen)		0 doku men	0 doku men		1 doku men		1 dokum en		1 dokume n		3 dokum en		
			2 5	3 .25. 02	3 .25. 02. 1.0 1	3 .25. 02. 1.0 1.0 3	Rehabilita si Wilayah Perairan Pesisir dan PulauPulau Kecil	Jumlah Tambatan Perahu yang terbangun (unit)	1	0 unit	0 .00	0 unit	0.0 0	12 unit	9,274 ,678,58 4.00	12 unit	12,18 0,000,0 00.00	12 unit	12,789 ,000,000. 00	36 unit	34,24 3,678,5 84.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
								Jumlah Prasarana Penanganan Sampah di pulau-pulau kecil (unit)		0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	3 unit		3 unit		3 unit		9 unit		
								Jumlah Rehabilitasi ekosistem pesisir (batang)	25 000	0 batan g	0 bata ng	0 bata ng	55 0000 bata ng		550 000 batang		5500 00 batang		165 0000 batang			
								Jumlah Rehabilitasi ekosistem Laut (unit)		0 unit	0 unit	0 unit	7 unit		7 unit		7 unit		21 unit			
								Jumlah Pengelolaan	1	0 Loka	0 Loka	0 Loka	5 Loka		5 Lokasi		5 Lokasi		15 Lokasi			

									dan Pembinaan Pantai Berseri (Lokasi)		si		si		si								
				2 5	3 .25. 02	3 .25. 02. 1.0 2		3.25.02.1. 02 Penerbitan Izin Pemanfaata n Ruang Laut di Bawah Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			0	0 .00	0	0.0 0	0	0.00	0	51,00 0,000.0 0	0	53,550 ,000.00	0	104,5 50,000. 00	Dinas Kelautan dan Perikanan
				2 5	3 .25. 02	3 .25. 02. 1.0 2	3 .25. 02. 1.0 2.0 1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah dokumen Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (dokumen)		0 doku men	0 .00	0 doku men	0.0 0	0 doku men	0.00	1 dokum en	10,00 0,000.0 0	1 dokume n	10,500 ,000.00	2 dokum en	20,50 0,000.0 0	Dinas Kelautan dan Perikanan
				2 5	3 .25. 02	3 .25. 02. 1.0 2	3 .25. 02. 1.0 2.0 2	Penerbitan Rekomendas i Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (rekomendasi)		0 reko mend asi	0 .00	0 reko men dasi	0.0 0	0 reko men dasi	0.00	4 rekom endasi	12,00 0,000.0 0	4 rekome ndasi	12,600 ,000.00	8 rekom endasi	24,60 0,000.0 0	Dinas Kelautan dan Perikanan
				2 5	3 .25. 02	3 .25. 02. 1.0 2	3 .25. 02. 1.0 2.0 3	Pelaksana an Fasilitas Penerbitan Rekomendas i Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut	Jumlah Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di		0 Reko mend asi	0 .00	0 Reko men dasi	0.0 0	0 Reko men dasi	0.00	4 Reko menda si	12,00 0,000.0 0	4 Rekome ndasi	12,600 ,000.00	8 Reko menda si	24,60 0,000.0 0	Dinas Kelautan dan Perikanan

								di Bawah Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional (Rekomendasi)														
				25	325.02	325.02.1.02	325.02.1.02.04	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir (Rekomendasi)		0Reko mend asi	0.00	0Reko men dasi	0.00	0Reko men dasi	0.00	4Reko menda si	12,000,000.00	4Rekome ndasi	12,600,000.00	8Reko menda si	24,600,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
				25	325.02	325.02.1.02	325.02.1.02.05	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Jumlah dokumen Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut (Dokumen)		0Doku men	0.00	0Doku men	0.00	0Doku men	0.00	1Doku men	5,000,000.00	1Dokume n	5,250,000.00	2Doku men	10,250,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
				25	325.02	325.02.1.03		3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan PulauPulau Kecil			0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,085,268.00	0	1,365,000,000.00	0	1,433,250,000.00	0	3,942,335,268.00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				25	325.02	325.02.1.03	325.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan PulauPulau Kecil	Jumlah Sarana Inovasi Teknologi Usaha Masyarakat Pesisir (Unit)		0Unit	0.00	0Unit	0.00	10Unit	107,600,000.00	10Unit	157,500,000.00	10Unit	165,375,000.00	30Unit	430,475,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
				25	325.02	325.02.1.03	325.02.1.03.02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana usaha garam (Unit)	1	0Unit	0.00	0Unit	0.00	10Unit	924,105,768.00	10Unit	1,050,000,000.00	10Unit	1,102,500,000.00	30Unit	3,076,605,768.00	Dinas Kelautan dan Perikanan

								Pesisir dan PulauPulau Kecil															
			25	25.02	325.02	325.02	325.02	Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Informasi Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi garam (Orang) Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan usaha alternatif masyarakat pesisir berbasis inovasi (Kelompok)	60	0 Orang	0 .00	0 Orang	0.0 0	720 Orang	112,379,500.00	720 Orang	157,500,000.00	720 Orang	165,375,000.00	2160 Orang	435,254,500.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
		3	25	325.03				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Tingkat operasional PPI Pelabuhan Perikanan Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan Tangkap Produksi perikanan tangkap Cakupan Bina Kelompok Nelayan Persentase	50,00% 30,18% Rp 6.525.95 M 398.565,2 Ton	0% 0% 0 Rp. M 0 Ton 0% 0%	0.00 0% 0 Rp. M 0 Ton 0% 0%	0% 0% 0 Rp. M 0 Ton 0% 0%	0.00 0% 0 Rp. M 0 Ton 0% 0%	0% 0% 0 Rp. M 0 Ton 0% 0%	26,513,904,272.00 0% 0 Rp. M 0 Ton 0% 0%	0% 0% 0 Rp. M 0 Ton 0% 0%	28,141,403,075.00 0% 0 Rp. M 0 Ton 0% 0%	0% 0% 0 Rp. M 0 Ton 0% 0%	29,984,973,228.75 0% 0 Rp. M 0 Ton 0% 0%	84,640,280,575.75 0% 0 Rp. M 0 Ton 0% 0%	Dinas Kelautan dan Perikanan	

								Produksi perikanan kelompok nelayan		%		%		%									
				25	325.03	325.03.1.01		3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan Mil		0	0.00	0	0.00	0	13,904,140,000.00	0	17,240,000,000.00	0	18,102,000,000.00	0	49,246,140,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				25	325.03	325.03.1.01	325.03.1.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil (Laporan)		0Laporan	0.00	0Laporan	0.00	0.00	1Laporan	100,000,000.00	0Laporan	105,000,000.00	2Laporan	205,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				25	325.03	325.03.1.01	325.03.1.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah kapal yang dibangun (Unit)	5	0Unit	0.00	0Unit	0.00	17Unit	17Unit	14,140,000,000.00	17Unit	14,847,000,000.00	51Unit	42,891,140,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				25	325.03	325.03.1.01	325.03.1.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah mesin usaha perikanan tangkap yang tersedia (Unit)	3	0Unit	0.00	0Unit	0.00	0Unit	0.00	20Unit	3,000,000,000.00	20Unit	3,150,000,000.00	40Unit	6,150,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
								Jumlah alat bantu tangkap (Unit)	4	0Unit		0Unit		0Unit	100Unit		100Unit	200Unit					
								Jumlah sarana alat tangkap (Unit)	5	0Unit		0Unit		0Unit	150Unit		150Unit	300Unit					
								Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi perikanan tangkap (Orang)	80	0Orang		0Orang	170Orang	287Orang		287Orang	744Orang						

								Jumlah peserta/nelayan difasilitasi dalam akses pendanaan dan jaminan perlindungan (Orang)		0 Orang		0 Orang		0 Orang		100 Orang		100 Orang		200 Orang		
			25	3.25.03	3.25.03.1.02	3	3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi		0	0.00	0	0.00	0	3,661,241,500.00	0	850,000,000.00	0	879,000,000.00	0	5,390,241,500.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			25	3.25.03	3.25.03.1.02	3	3.25.03.1.02	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya (Dokumen)	0 Dokumen	0.00	0 Dokumen	0.00	0 Dokumen	0.00	1 Dokumen	50,000,000.00	1 Dokumen	52,500,000.00	2 Dokumen	102,500,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			25	3.25.03	3.25.03.1.02	3	3.25.03.1.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah kapal yang dibangun dan diserahkan ke kelompok nelayan wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	2 Unit	500,000,000.00	2 Unit	525,000,000.00	4 Unit	1,025,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan

				2 5	3 .25. 03	3 .25. 03. 1.0 2	3 .25. 03. 1.0 2.0 3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	(Unit) Jumlah mesin usaha perikanan tangkap yang tersedia (Unit) Jumlah alat bantu tangkap untuk nelayan (Unit) Jumlah sarana alat tangkap untuk nelayan (Unit) Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi perikanan tangkap (Orang)		0 Unit	0 .00	0 Unit	0.0 0	20 Unit	3,661 ,241,50 0.00	5 Unit	300,0 00,000. 00	5 Unit	301,50 0,000.00	30 Unit	4,262 ,741,50 0.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
				2 5	3 .25. 03	3 .25. 03. 1.0 3		3.25.03.1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas GT sampai dengan GT			0	0 .00	0	0.0 0	0	0.00	0	50,00 0,000.0 0	0	52,500 ,000.00	0	102,5 00,000. 00	Dinas Kelautan dan Perikanan
				2 5	3 .25. 03	3 .25. 03. 1.0 3	3 .25. 03. 1.0 3.0 1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas GT	Jumlah Dokumen Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan		0 Doku men	0 .00	0 Doku men	0.0 0	0 Doku men	0.00	1 Doku men	10,00 0,000.0 0	1 Dokume n	10,500 ,000.00	2 Doku men	20,50 0,000.0 0	Dinas Kelautan dan Perikanan

								sampai dengan GT	Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT (Dokumen)														
				25	3.25.03	3.25.03.1.03	3.25.03.1.03.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas GT sampai dengan GT	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT (Rekomendasi)		0 Rekomendasi	0.00	0 Rekomendasi	0.00	0 Rekomendasi	0.00	100 Rekomendasi	30,000,000.00	100 Rekomendasi	31,500,000.00	200 Rekomendasi	61,500,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
				25	3.25.03	3.25.03.1.03	3.25.03.1.03.03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas GT sampai dengan GT	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT (Laporan)		0 Laporan	0.00	0 Laporan	0.00	0 Laporan	0.00	1 Laporan	10,000,000.00	1 Laporan	10,500,000.00	2 Laporan	20,500,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
				25	3.25.03	3.25.03.1.04		3.25.03.1.04 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil			0.00	0	0.00	0	0.00	0	55,000,000.00	0	57,750,000.00	0	112,750,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				2	3	3	3	Penetapan	Jumlah		0	0	0	0.0	0	0.00	1	10,00	1	10,500	2	20,50	Dinas

			5	.25.03	.25.03.1.04	.25.03.1.04.1	Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	Dokumen Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Bukan di Miliki Oleh Nelayan Kecil (Dokumen)		Dokumen	.00	Dokumen	0	Dokumen		Dokumen	0,000.00	Dokumen	,000.00	Dokumen	0,000.00	Kelautan dan Perikanan
			25	3.25.03.1.04	3.25.03.1.04.2	3.25.03.1.04.2	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Bukan di Miliki oleh Nelayan Kecil (Rekomendasi)		0 Rekomendasi	0.00	0 Rekomendasi	0.00	0 Rekomendasi	0.00	150 Rekomendasi	45,000,000.00	150 Rekomendasi	47,250,000.00	300 Rekomendasi	92,250,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			25	3.25.03.1.05	3.25.03.1.05.5	3.25.03.1.05.5	3.25.03.1.05.5 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan GT di Laut Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan			0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	42,500,000.00	0	44,625,000.00	0	87,125,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan

			2 5	3 .25. 03	3 .25. 03. 1.0 6	3 .25. 03. 1.0 6.0 2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Penyediaan Sarana prasarana Pelabuhan Yang Terbangun di Wilayah 1 (Unit)	2	0 Unit	0 .00	0 Unit	0.0 0	3 Unit	8,140 ,071,53 6.00	3 Unit	9,000 ,000,00 0.00	3 Unit	9,900, 000,000.0 0	9 Unit	27,04 0,071,5 36.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
								Jumlah Penyediaan Sarana prasarana Pelabuhan Yang Terbangun di Wilayah 2 (Unit)	1	0 Unit		0 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		6 Unit		
			2 5	3 .25. 03	3 .25. 03. 1.0 6	3 .25. 03. 1.0 6.0 3	Pelaksanaan Fungsi Pemerintah n dan Pengusaha n Pelabuhan Perikanan	Jumlah Layanan Operasional pelabuhan perikanan wilayah 1 (%)	60	0 %	0 .00	0 %	0.0 0	80 %	709,0 19,736. 00	100 %	745,5 00,000. 00	100 %	782,77 5,000.00	100 %	2,237 ,294,73 6.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
								Jumlah Layanan Operasional pelabuhan perikanan wilayah 2 (%)	75	0 %		0 %		10 0 %		100 %		100 %		100 %		
			2 5	3 .25. 03	3 .25. 03. 1.0 7		3.25.03.1.07 Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengkut Ikan dengan Ukuran di atas GT sampai dengan GT			0	0 .00	0	0.0 0	0	0.00	0	25,00 0,000.0 0	0	26,250 ,000.00	0	51,25 0,000.0 0	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2 5	3 .25.	3 .25.	3 .25.	Penetapan Persyaratan	Jumlah dokumen		0 Doku	0 .00	0 Doku	0.0 0	0 Doku	0.00	1 Doku	5,000 ,000.00	1 Dokume	5,250, 000.00	2 Doku	10,25 0,000.0	Dinas Kelautan

					03	03.1.07	03.1.07.01	dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas GT sampai dengan GT	Persyaratan Penertiban Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT (Dokumen)		men		men		men		men		n		men	0		dan Perikanan
				25	3.25.03	3.25.03.1.07	3.25.03.1.07.02	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas GT sampai dengan GT	Jumlah Surat Keterangan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai Dengan 30 GT (Surat Keterangan)		0 Surat Keterangan	0	0 Surat Keterangan	0.00	0 Surat Keterangan	0.00	20 Surat Keterangan	20,000,000.00	20 Surat Keterangan	21,000,000.00	40 Surat Keterangan	41,000,000.00		Dinas Kelautan dan Perikanan
				25	3.25.03	3.25.03.1.08		3.25.03.1.08 Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan GT di Laut Sungai danau Waduk			0	0	0	0.00	0	0.00	0	7,000,000.00	0	7,350,000.00	0	14,350,000.00		Dinas Kelautan dan Perikanan

							Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas KabupatenK ota dalam satu Daerah Provinsi																
				2 5	3 .25. 03	3 .25. 03. 1.0 8	3 .25. 03. 1.0 8.0 1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan GT	Jumlah dokumen Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut,Sungai,danau,waduk,Rawa,dan Genangan air Lainnya Dapat diusahakan Lintasan Kabupaten/Kot a dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)		0 Doku men	0 .00	0 Doku men	0.0 0	0 Doku men	0.00	1 Doku men	5,000 ,000.00	1 Dokume n	5,250, 000.00	2 Doku men	10,25 0,000.0 0	Dinas Kelautan dan Perikanan
				2 5	3 .25. 03	3 .25. 03. 1.0 8	3 .25. 03. 1.0 8.0 2	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan	Jumlah Surat Keterangan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan		0 Surat Ketera ngan	0 .00	0 Surat Ketera ngan	0.0 0	0 Surat Ketera ngan	0.00	2 Surat Ketera ngan	2,000 ,000.00	2 Surat Keteran gan	2,100, 000.00	4 Surat Ketera ngan	4,100 ,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan

								Ukuran sampai dengan GT	Ukuran Sampai Dengan 10 GT (Surat Keterangan)														
				2 5	3 .25. 03	3 .25. 03. 1.0 9		3.25.03.1.09 Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas GT sampai dengan GT			0	0 .00	0	0.0 0	0	0.00	0	10,00 0,000.0 0	0	15,750 ,000.00	0	25,75 0,000.0 0	Dinas Kelautan dan Perikanan
				2 5	3 .25. 03	3 .25. 03. 1.0 9	3 .25. 03. 1.0 9.0 1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas GT sampai dengan GT	Jumlah dokumen Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT (Dokumen)		0 Doku men	0 .00	0 Doku men	0.0 0	0 Doku men	0.00	1 Doku men	5,000 ,000.00	1 Dokume n	5,250, 000.00	2 Doku men	10,25 0,000.0 0	Dinas Kelautan dan Perikanan
				2 5	3 .25. 03	3 .25. 03. 1.0 9	3 .25. 03. 1.0 9.0 2	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas GT sampai dengan GT	Jumlah Surat Keterangan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT (Surat Keterangan)		0 Surat Ketera ngan	0 .00	0 Surat Ketera ngan	0.0 0	0 Surat Ketera ngan	0.00	10 Surat Ketera ngan	5,000 ,000.00	10 Surat Ketera ngan	10,500 ,000.00	20 Surat Ketera ngan	15,50 0,000.0 0	Dinas Kelautan dan Perikanan
				2 5	3 .25. 03	3 .25. 03. 1.1 0		3.25.03.1.10 Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan GT yang Beroperasi di Laut Sungai			0	0 .00	0	0.0 0	0	0.00	0	12,00 0,000.0 0	0	7,350, 000.00	0	19,35 0,000.0 0	Dinas Kelautan dan Perikanan

								Danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas KabupatenK ota dalam satu Daerah Provinsi															
				2 5	3 .25. 03	3 .25. 03.1.1 0	3 .25. 03.1.1 0.0 1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan GT	Jumlah dokumen Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran Sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut,Sungai,da nau,waduk,Raw a,dan Genangan air Lainnya Dapat diusahakan Lintasan Kabupaten/Kot a dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)		0 Doku men	0 .00	0 Doku men	0.0 0	0 Doku men	0.00	1 Doku men	10,00 0,000.0 0	1 Dokume n	5,250, 000.00	2 Doku men	15,25 0,000.0 0	Dinas Kelautan dan Perikanan
				2 5	3 .25. 03	3 .25. 03.1.1 0	3 .25. 03.1.1 0.0 2	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan GT	Jumlah Surat Keterangan Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran Sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di		0 Surat Keter anga n	0 .00	0 Surat Keter anga n	0.0 0	0 Surat Keter anga n	0.00	2 Surat Ketera ngan	2,000 ,000.00	2 Surat Keteran gan	2,100, 000.00	4 Surat Ketera ngan	4,100 ,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan

									Laut,Sungai,danau,waduk,Raw a,dan Genangan air Lainnya Dapat diusahakan Lintasan Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Surat Keterangan)														
			3	25	3.25.04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai Hilirisasi produksi perikanan budidaya Produksi perikanan budidaya Persentase ketersediaan benur berkualitas	Rp . 9.594 .52 M 3.6 62.76 1,4 ton	0 Rp. M 0 Ton 0 %	0 .00 0 Ton 0 %	0 Rp. M 0 Ton 0 %	0.0 0 0 Ton 0 %	19,64 0,016,7 64.00	0 Rp. M 0 Ton 0 %	28,63 9,899,0 34.00	0 Rp. M 0 Ton 0 %	21,506 ,694,460. 00	0 Rp. M 0 Ton 0 %	69,78 6,610,2 58.00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				25	3 .25. 04	3 .25. 04. 1.0 1		3.25.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah KabupatenKota dalam satu Daerah Provinsi			0	0 .00	0	0.0 0	0	0	60,00 0,000.0 0	0	63,000 ,000.00	0	123,0 00,000. 00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				25	3 .25. 04	3 .25. 04. 1.0 1	3 .25. 04. 1.0 1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha	Jumlah dokumen Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin		0 Doku men	0 .00	0 Doku men	0.0 0	0 Doku men	0.00	1 Doku men	5,000 ,000.00	1 Dokume n	5,250, 000.00	2 Doku men	10,25 0,000.0 0	Dinas Kelautan dan Perikanan

						1	Perikanan Bidang Pembudiday aan Ikan	Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaa n Ikan (Dokumen)															
				2 5	3 .25. 04	3 .25. 04. 1.0 1	3 .25. 04. 1.0 1.0 2	Penerbitan Rekomendas i Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudiday aan Ikan	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaa n Ikan (Rekomendasi)		0 Reko mend asi	0 .00	0 Reko men dasi	0.0 0	0 Reko men dasi	0.00	5 Reko menda si	5,000 ,000.00	5 Rekome ndasi	5,250, 000.00	10 Reko menda si	10,25 0,000.0 0	Dinas Kelautan dan Perikanan
				2 5	3 .25. 04	3 .25. 04. 1.0 1	3 .25. 04. 1.0 1.0 3	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudiday aan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaa n Ikan (Laporan)		0 Lapora n	0 .00	0 Lapo ran	0.0 0	0 Lapo ran	0.00	1 Lapora n	50,00 0,000.0 0	1 Laporan	52,500 ,000.00	2 Lapora n	102,5 00,000. 00	Dinas Kelautan dan Perikanan
				2 5	3 .25. 04	3 .25. 04. 1.0 2		3.25.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudiday aan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan Mil Serta Tidak Menggunak an Modal Asing danatau Tenaga Kerja Asing			0 .00	0	0.0 0	0	0.00	0	15,00 0,000.0 0	0	15,750 ,000.00	0	30,75 0,000.0 0	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				2 5	3 .25. 04	3 .25. 04. 1.0 1	3 .25. 04. 1.0 1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan	Jumlah dokumen Persyaratan dan Prosedur		0 Doku men	0 .00	0 Doku men	0.0 0	0 Doku men	0.00	1 Doku men	5,000 ,000.00	1 Dokume n	5,250, 000.00	2 Doku men	10,25 0,000.0 0	Dinas Kelautan dan Perikanan

						2	2.0	Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan (Dokumen)														
				25	3.25.04	3.25.04.1.02	3.25.04.1.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang diterbitkan (Rekomendasi)		0	0	0	0.00	0	0.00	100	10,000,000	100	10,500,000.00	200	20,500,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
				25	3.25.04	3.25.04.1.03	3.25.04.1.03	3.25.04.1.03 Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasi nya serta tidak Menggunakan Modal Asing dan atau Tenaga Kerja Asing			0	0	0	0.00	0	0.00	0	7,000,000.00	0	7,350,000.00	0	14,350,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
				25	3.25.04	3.25.04.1.03	3.25.04.1.03	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil	Jumlah dokumen Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil		0	0	0	0.00	0	0.00	1	5,000,000.00	1	5,250,000.00	2	10,250,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan

								Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan GT	hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran Sampai Dengan 30 GT (dokumen)														
				25	3.25.04	3.25.04.1.03	3.25.04.1.03.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan GT	Jumlah rekomendasi Izin kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran Sampai dengan 30 GT (Rekomendasi)		0Rekomendasi	0.00	0Rekomendasi	0.00	0Rekomendasi	0.00	2Rekomendasi	2,000,000.00	2Rekomendasi	2,100,000.00	4Rekomendasi	4,100,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
				25	3.25.04	3.25.04.1.04	3.25.04.1.04	3.25.04.1.04 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil TDPIK di Laut dan Lintas Daerah KabupatenK ota dalam satu Daerah Provinsi			0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	15,000,000.00	0	15,750,000.00	0	30,750,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
				25	3.25.04	3.25.04.1.04	3.25.04.1.04.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil TDPIK di Laut dan Lintas Daerah	Jumlah dokumen Persyaratan dan Prosedur PenerbitanTanda daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) DI Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kot		0dokumen	0.00	0dokumen	0.00	0dokumen	0.00	1dokumen	5,000,000.00	1dokumen	5,250,000.00	2dokumen	10,250,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan

[illegible]

				25	304	305		KabupatenKota			0	000	000	000	4,468,584,804.00	0	13,371,467,074.00	0	6,233,412,500.00	0	24,073,464,378.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
				25	304	305	305	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah KabupatenKota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Lporan)		0Lporan	000	0Lporan	000	0.00	1Lporan	50,000,000.00	1Lporan	52,500,000.00	2Lporan	102,500,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
				25	304	305	305	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah kebun laut yang tersedia (Unit) Jumlah sarana prasarana budidaya laut (Unit)	100	0Unit 0Unit	000 0Unit	000 0Unit	000 130Unit	3,347,542,280.00	3Unit 130Unit	3,517,500,000.00	3Unit 130Unit	3,535,087,500.00	7Unit 390Unit	10,400,129,780.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
				25	304	305	305	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas	Jumlah Prasarana Budidaya yang terbangun (Unit) Jumlah Prasarana Perbenihan Yang di operasionalkan (Unit)		0Unit 0Unit	000 0Unit	000 0Unit	000 0Unit	0.00	2Unit 2Unit	8,617,467,074.00	2Unit 2Unit	1,400,000,000.00	4Unit 4Unit	10,017,467,074.00	Dinas Kelautan dan Perikanan

							Daerah KabupatenKo ta																
				2 5	3 .25. 04	3 .25. 04. 1.0 5	3 .25. 04. 1.0 5.0 4	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudiday aan Ikan di Laut	Jumlah induk unggul untuk menghasilkan benih (Ekor)	65 0	0 Ekor	0 .00	0 Ekor	0.0 0	75 0 Ekor	202,9 86,512. 00	750 Ekor	215,2 50,000. 00	750 Ekor	226,01 2,500.00	225 0 Ekor	644,2 49,012. 00	Dinas Kelautan dan Perikanan
				2 5	3 .25. 04	3 .25. 04. 1.0 5	3 .25. 04. 1.0 5.0 6	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah KabupatenKo ta	Jumlah Pengendalian Kualitas Lingkungan Perikanan Budidaya Perbenihan (Unit)	7	0 Unit	0 .00	0 Unit	0.0 0	13 Unit	136,8 14,512. 00	13 Unit	147,0 00,000. 00	13 Unit	154,35 0,000.00	39 Unit	438,1 64,512. 00	Dinas Kelautan dan Perikanan
				2 5	3 .25. 04	3 .25. 04. 1.0 5	3 .25. 04. 1.0 5.0 7	Pembinaan dan Pemantauan Pembudiday aan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan pembinaan dan pemantauan Pembudidayaa n Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi (Laporan)	1	0 Lapora an	0 .00	0 Lapo ran	0.0 0	1 Lapora ran	781,2 41,500. 00	1 Lapora n	824,2 50,000. 00	1 Laporan	865,46 2,500.00	3 Lapora n	2,470 ,954,00 0.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			3	2 5	3.2 5.0 5			PROGRAM PENGAWAS AN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Penurunan tindakan IUU Fishing Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	9.8 3%	0 %	0 .00	0 %	0.0 0	0 %	11,13 9,152,6 08.00	0 %	8,926 ,999,86 0.84	0 %	8,951, 051,132.3 2	0 %	29,01 7,203,6 01.16	Dinas Kelautan dan Perikanan

				2 5	3 .25. 05	3 .25. 05. 1.0 1		3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan Mil			0	0 .00	0	0.0 0	0	11,13 9,152,6 08.00	0	8,706 ,999,86 0.84	0	8,729, 951,132.3 2	0	28,57 6,103,6 01.16	Dinas Kelautan dan Perikanan
				2 5	3 .25. 05	3 .25. 05. 1.0 1	3 .25. 05. 1.0 1	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan Mil	Jumlah jenis Biota laut yang dilindungi (Jenis)	0 Jenis	0 .00	0 Jenis	0.0 0	1 Jenis	108,2 65,768. 00	1 Jenis	108,8 07,096. 84	1 Jenis	109,35 1,132.32	3 Jenis	326,4 23,997. 16	Dinas Kelautan dan Perikanan	
									Jumlah peserta koordinasi teknis pengawasan dan pengendalian SDKP (Orang)	0 Oran g		0 Oran g		12 0 Oran g		120 Orang		120 Orang		360 Orang			
									Jumlah Pokmaswas yang diberdayakan (Kelompok)	0 Kelo mpok		0 Kelo mpok		30 Kelo mpok		30 Kelom pok		30 Kelomp ok		90 Kelom pok			
									Jumlah laporan pengawasan terpadu (Laporan)	0 Lapor an		0 Lapo ran		1 Lapo ran		1 Lapora n		1 Laporan		3 Lapora n			
				2 5	3 .25. 05	3 .25. 05. 1.0 1	3 .25. 05. 1.0 2	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan Mil	Jumlah usaha perikanan tangkap yang mendapatkan Pengawasan IUU Fishing dan Pemantauan Kapal Perikanan (Unit)	0 Unit	0 .00	0 Unit	0.0 0	7 Unit	11,03 0,886,8 40.00	7 Unit	8,478 ,192,76 4.00	7 Unit	8,500, 000,000.0 0	21 Unit	28,00 9,079,6 04.00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
									Jumlah sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya	3 Unit	0 Unit	0 Unit		31 Unit		33 Unit		36 Unit		100 Unit			

								kelautan dan perikanan (Unit)		0		0		10		100		100		300		
				2	3	3	3	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan Mil	Jumlah usaha pembudidaya di laut sampai dengan 12 mil yang mendapatkan pengawasan (Unit)	0	0	0	0.0	0	0.00	1	50,00	1 Unit	50,250	2	100,2	Dinas Kelautan dan Perikanan
				5	.25.05	.25.05.1.01	.25.05.1.03	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas POKMASWAS	Jumlah Pokmaswas yang diberdayakan (Kelompok)	0	0	0	0.0	0	0.00	14	70,00	14	70,350	28	140,3	Dinas Kelautan dan Perikanan
				5	2	3	3	3.25.05.1.02		0	0	0	0.0	0	0.00	0	220,0	0	221,10	0	441,1	Dinas Kelautan dan Perikanan
					.25.05	.25.05.1.02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas KabupatenKota dalam satu Daerah Provinsi								00,000.00		0,000.00		00,000.00		

				2 5	3 .25. 05	3 .25. 05. 1.0 2	3 .25. 05. 1.0 2.0 1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas KabupatenKo ta dalam satu Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangan nya	Jumlah usaha perikanan tangkap pada Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang mendapatkan pengawasan (Unit) Jumlah sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya (Unit)	0 Unit	0 .00	0 Unit	0.0 0	0 Unit	0.00	1 Unit	110,0 00,000. 00	1 Unit	110,55 0,000.00	2 Unit	220,5 50,000. 00	Dinas Kelautan dan Perikanan
				2 5	3 .25. 05	3 .25. 05. 1.0 2	3 .25. 05. 1.0 2.0 2	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidaya an Ikan di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas KabupatenKo ta dalam satu Daerah Provinsi	Jumlah usaha pembudidaya ikan di perairan umum yang mendapatkan pengawasan (unit)	0 unit	0 .00	0 unit	0.0 0	0 unit	0.00	1 unit	50,00 0,000.0 0	1 unit	50,250 ,000.00	2 unit	100,2 50,000. 00	Dinas Kelautan dan Perikanan

							sesuai dengan Kewenangannya															
			5	2 25.05	3 25.05.1.02	3 25.05.1.02.3	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten Kota dalam satu Daerah Provinsi	Jumlah usaha pemasaran dan pengolahan ikan yang mendapatkan pengawasan (Unit)		0 Unit	0 .00	0 Unit	0.0 0	0 Unit	0.00	1 Unit	60,00 0,000.00	1 Unit	60,300 ,000.00	2 Unit	120,3 00,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			3	2 5	3.2 5.06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi olahan konsumsi dan non konsumsi Persentase pengujian mutu produk perikanan Nilai Produksi olahan konsumsi dan non konsumsi	16 6.373 .20 Ton	0 Ton	0 .00	0 Ton	0.0 0	0 Ton	2,390 ,927,923.00	0 Ton	2,624 ,427,923.00	0 Ton	2,520, 602,923.00	0 Ton	7,535 ,958,769.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			5	2 25.06	3 25.06.1.01		3.25.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten Kota dalam satu Daerah			0	0 .00	0	0.0 0	0	0.00	0	63,50 0,000.00	0	66,675 ,000.00	0	130,1 75,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan

				2 5	3 .25. 06	3 .25. 06. 1.0 1	3 .25. 06. 1.0 1	Provinsi			0 doku men	0 .00	0 doku men	0.0 0	0 doku men	0.00	1 dokum en	5,000 ,000.00	1 dokume n	5,250, 000.00	2 dokum en	10,25 0,000.0 0	Dinas Kelautan dan Perikanan
				2 5	3 .25. 06	3 .25. 06. 1.0 1	3 .25. 06. 1.0 2	Penerbitan Rekomendas i Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah KabupatenKo ta dalam satu Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (Satu) daerah Provinsi (Rekomendasi)		0 Reko mend asi	0 .00	0 Reko men dasi	0.0 0	0 Reko men dasi	0.00	85 Reko menda si	8,500 ,000.00	85 Rekome ndasi	8,925, 000.00	170 Reko menda si	17,42 5,000.0 0	Dinas Kelautan dan Perikanan
				2 5	3 .25. 06	3 .25. 06. 1.0 1	3 .25. 06. 1.0 3	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (Satu) daerah Provinsi (Laporan)	Jumlah data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (Satu) daerah Provinsi (Laporan)		0 Lapor an	0 .00	0 Lapo ran	0.0 0	0 Lapo ran	0.00	1 Lapora n	50,00 0,000.0 0	1 Laporan	52,500 ,000.00	2 Lapora n	102,5 00,000. 00	Dinas Kelautan dan Perikanan

				2 5	3 .25. 06	3 .25. 06. 1.0 2		Daerah Provinsi			0	0 .00	0	0.0 0	0	2,390 ,927,92 3.00	0	2,500 ,927,92 3.00	0	2,390, 927,923.0 0	0	7,282 ,783,76 9.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
				2 5	3 .25. 06	3 .25. 06. 1.0 2	3 .25. 06. 1.0 2.0 1	3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			0	0 .00	0	0.0 0	2 Kegi atan prom osi	342,3 26,000. 00	2 Kegiat an promo si	352,3 26,000. 00	2 Kegiatan promosi	342,32 6,000.00	6 Kegiatan promosi	1,036 ,978,00 0.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
								Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah promosi yang diikuti (Kegiatan promosi)		0 Kegiatan promosi	0 .00	0 Kegiatan promosi	0.0 0	2 Kegiatan promosi	342,3 26,000. 00	2 Kegiatan promosi	352,3 26,000. 00	2 Kegiatan promosi	342,32 6,000.00	6 Kegiatan promosi	1,036 ,978,00 0.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
								Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi olahan (Orang)	60	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0.0 0	60 Orang	342,3 26,000. 00	60 Orang	352,3 26,000. 00	60 Orang	342,32 6,000.00	180 Orang	1,036 ,978,00 0.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
								Jumlah sarana prasarana pengolahan sesuai standar usaha (Unit)	1	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0.0 0	1 Unit	342,3 26,000. 00	1 Unit	352,3 26,000. 00	1 Unit	342,32 6,000.00	3 Unit	1,036 ,978,00 0.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
								Jumlah Unit Usaha Pengolah Yang Mendapatkan Pengembangan mutu produk (UPI)	70	0 UPI	0 UPI	0 UPI	0 UPI	0.0 0	70 UPI	342,3 26,000. 00	70 UPI	352,3 26,000. 00	70 UPI	342,32 6,000.00	210 UPI	1,036 ,978,00 0.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
				2 5	3 .25. 06	3 .25. 06. 1.0 2	3 .25. 06. 1.0 2.0	Pelaksanaan Bimbingan Fasilitasi Pemantauan dan Evaluasi	Jumlah Unit Usaha Pengolah Yang Mendapatkan Pengembangan	10 0	0 UPI	0 .00	0 UPI	0.0 0	10 0 UPI	2,048 ,601,92 3.00	100 UPI	2,148 ,601,92 3.00	100 UPI	2,048, 601,923.0 0	300 UPI	6,245 ,805,76 9.00	Dinas Kelautan dan Perikanan

						2	terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan Berdaya Saing	mutu produk (UPI)													
								Jumlah Sampel Produk yang Dilakukan Pengujian Mutu (Hasil uji Mutu)	100	0 Hasil uji Mutu	0 Hasil uji Mutu		100 Hasil uji Mutu	100 Hasil uji Mutu	100 Hasil uji Mutu	300 Hasil uji Mutu					
								Jumlah validasi sarana prasarana laboratorium pengujian (Unit)	2	0 Unit	0 Unit		2 Unit	5 Unit	5 Unit	12 Unit					
								Jumlah laporan penerapan prosedur mutu (Jenis)	-	0 Jenis	0 Jenis		1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	3 Jenis					
								Jumlah Inovasi Teknologi Produk Olahan Hasil KP Konsumsi dan Non Konsumsi (Jenis Produk Inovasi)	1	0 Jenis Produk Inovasi	0 Jenis Produk Inovasi		2 Jenis Produk Inovasi	2 Jenis Produk Inovasi	2 Jenis Produk Inovasi	6 Jenis Produk Inovasi					
				25.06	3.25.06.1.03	3	3.25.06.1.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah KabupatenK ota dalam satu Daerah Provinsi			0	0.00	0	0.00	0	60,000,000.00	0	63,000,000.00	0	123,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				25.06	3.25.06.1.03	3	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha PengolahanD	Jumlah laporan Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/dis		0 Lporan	0.00	0 Lporan	0.00	1 Lporan	50,000,000.00	1 Lporan	52,500,000.00	2 Lporan	102,500,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan	

								istribusi Ikan Lintas Daerah KabupatenKo ta dalam satu Daerah Provinsi	tribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Lporan)														
				2 5	3 .25. 06	3 .25. 06. 1.0 3	3 .25. 06. 1.0 3.0 3	Pengembang an Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah KabupatenKo ta dalam satu Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kot a Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan)		0 Lapor an	0 .00	0 Lapo ran	0.0 0	0 Lapo ran	0.00	1 Lapora n	10,00 0,000.0 0	1 Laporan	10,500 ,000.00	2 Lapora n	20,50 0,000.0 0	Dinas Kelautan dan Perikanan
Grandtotal										0.00	0.00	102,101,007, 014.00	102,739,562,70 4.00	116,272,305,283. 69	337,249,004,160. 93								

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja yang mengacu pada RPJMD

Indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD adapun kinerja penyelenggaraan urusan yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci.

7.1.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah dalam mendukung sasaran pembangunan daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada Renstra Perubahan

No	Sasaran Strategis dan Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	
SS1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah						
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,61	85.81	86,01	86,21	86,41	
2	Persentase capaian kinerja Program Perangkat Daerah (%)	95	97,5	98	98,5	95	
3	Persentase Nilai Temuan Material LHP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100	100	
SS2.1	Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah faktor produksi dan produktivitas produksi						
1	Produksi Perikanan (ton)	4.061.326,7	4.147.630,5	4.342.259,8	4.546.138,0	4.759.871,9	
2	Kontribusi PDRB Perikanan (%)	8.4	4.2	4.6	5.1	5.6	
SS2.2	Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan						
1	NilaiTukar Nelayan (NTN)	107	101.35	102.37	102.78	103.19	
SS2.3	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan						
1	Konsumsi Ikan (kg/kap/th)	64.7	55	59.50	62.7	65.90	
SS3.1	Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan						
1	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial (%)	1,01	1,03	1,05	1,07	1,09	
2	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	48.85	35.37	35.72	38.58	42.44	
3	Prosentase Penurunan tindakan IUU Fishing (%)	5,88%	17,24%	20,83%	26,32%	35,71%	

7.1.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah untuk sektor kelautan dan perikanan merupakan indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masa jabatan pemerintah daerah 2018 - 2023. Indikator Kinerja Kunci disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan

kewenangan pemerintah provinsi. Penetapan indikator kinerja kunci untuk sektor kelautan dan perikanan selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
B	Layanan Urusan Pilihan						
8	Kelautan dan Perikanan						
1	Produksi Perikanan (%)	82,54	100	100	100	100	
2	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	49.66	50.60	52.10	53.60	55.10	
3	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (%)	0.24	1,01	1.03	1.05	1,07	
4	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	30,18	33.20	36.51	40,17	44,18	
5	Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	40,00	21.82	23.32	24.82	26.32	
6	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (%)	107	101.35	102.37	102.78	103.19	
7	Konsumsi Ikan (%)	120.71	84.27	97.07	113	121.20	
8	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)dari seluruh Kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP) (ton)	4,061,326.7	4.092.881.4	4.342.259,8	4.546.138,0	4.759.871,9	
9	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (%)	82,40	86,88	87,48	88,73	89,85	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan yang telah mengalami pergeseran kebijakan baik nasional maupun daerah yang diimplementasikan pada tugas penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan. dalam kurun waktu 3 (lima) tahun kedepan dari tahun 2021-2023.

Dengan melaksanakan Renstra Perubahan ini sangat diperlukan adanya partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan karena akan menentukan suatu keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan mengikuti paradigma pergeseran kebijakan. Dengan demikian Renstra Perubahan ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansi merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders dan merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan berkesinambungan.

LAMPIRAN – LAMPIRAN